

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 259
13 - 26 Jumadil Akhir 1441 H
7 - 20 Februari 2020

Media ^{t a b l o i d}umat

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam

TRIAS KORUPSI INDONESIA

Legislatif

Yudikatif

Eksekutif

■ MEDIA NASIONAL

100 Hari Rezim Jokowi
Pengamat:
Kondisi Bangsa Memburuk

■ FOKUS

Pernyataan
Mahfud MD
Menyalahi Syariat

■ WAWANCARA

Ichsanuddin Noorsy,
Pengamat Kebijakan Publik
Tidak Hanya
Trias Korupsi

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali di ruang baca Anda. Semoga kehadiran kami senantiasa menambah wawasan Anda ketika menghadapi berbagai fenomena yang berkembang.

Pembaca yang dirahmati Allah, kita berada di musim penghujan. Air dari langit yang kita tunggu beberapa waktu lalu akhirnya dicurahkan oleh Allah. Sayangnya, kita tidak siap menerima kucuran air hujan yang berlimpah itu. Banjir di mana-mana. Demikian juga ada tanah yang longsor. Tokoh-tokoh yang selama ini membanggakan diri sebagai orang yang berhasil menangani banjir, terdiam karena air bah tak bisa dikalahkan.

Bagaimana tidak banjir jika ruang terbuka hijau tak ada lagi? Kalau pun ada sangat minim. Bagaimana air tidak mengalir deras dari hulu ke hilir jika lahan-lahan di hulu telah dialihfungsikan sebagai perumahan? Di tengah jalan, air melewati tembok-tembok semen dan tak ada lagi jalan untuk meresap ke bumi. Bagaimana tidak banjir jika rakyat dibiarkan membuang sampah sembarangan? Dan masih banyak alasan yang bisa kita ungkapkan.

Di tengah kondisi yang susah ini, Bank Dunia menyebut sebanyak 115 juta penduduk Indonesia rentan masuk kembali ke dalam golongan penduduk miskin. Ini terjadi jika ekonomi Indonesia terus memburuk.

Sudah begitu, korupsi terus melanda negeri ini. Sepertinya para koruptor tidak pernah kapok dengan ancaman penjara. Satu pejabat dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat lainnya kemudian menyusul. Sepertinya, korupsi sudah menjadi kebiasaan. Soal siapa yang tertangkap, seolah hanya soal nasib saja. Mengapa?

Karena sistem demokrasi saat ini memang memicu terjadinya korupsi.

Pembaca yang dirahmati Allah, seperti apa korupsi ini bisa terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, Media Utama kali ini menguraikannya. Dan yang lebih penting, bagaimana korupsi ini sendiri bisa diatasi agar berkurang atau hilang sama sekali. Cukupkah hanya dibentuk lembaga anti korupsi seperti sekarang? Kalau tidak, apakah perlu ada lembaga lainnya lagi? Bahkan yang lebih ekstrim, beberapa kalangan sekarang mendesak KPK dibubarkan karena dianggap keberadaannya seperti tidak ada gunanya. Seperti itu?

Yang jelas, kita melihat kasus-kasus korupsi ini tak bisa dilepaskan di belakangnya dari kepentingan partai politik dan penguasa. Mereka saling sandera karena masing-masing mengetahui kejahatan yang lainnya. Dan, lembaga yudikatif pun masuk dalam pusaran kepentingan. Akhirnya, rakyat hanya melihat betapa sulitnya menuntaskan kasus yang terkait dengan penguasa dan partainya. Beda kalau yang kena kasus rakyat biasa.

Pembaca yang dirahmati Allah, di tengah kondisi seperti itu, rasanya ada saja pihak-pihak yang membuat suasana gaduh. Mereka menebar kebencian kepada Islam dan ajarannya. Ada juga yang membuat kerajaan-kerajaan partikelir. Semua diarahkan untuk mengelabui umat. Fokus mengangkat tema tentang haramnya sistem pemerintahan Islam ala Nabi Muhammad SAW.

Akhirnya, kami berharap para pembaca bisa menjadi jembatan bagi kami untuk menyebarkan media ini kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum pernah membacanya. Semoga langkah Anda menjadi amal shalih. Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Dahsyatnya Makar Allah

Virus corona adalah tentara-tentara yang Allah SWT turunkan untuk memberi peringatan kepada pemerintah Cina yang selama ini membenci Islam. Buktinya, pemerintah Cina mengarangtina 1 juta Muslim Uighur untuk dicuci otaknya. Jelas ini adalah tindakan yang sangat jahat. Rezim Cina memurtadkan secara massal penduduk Xinjiang.

Balasannya, belasan juta warga Cina harus dikarantina karena terjangkit virus Corona. Pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak kecuali mengisolasi wilayahnya.

Tentu ini bukan kejadian alam biasa. Inilah peringatan Allah yang dahsyat. Tapi tidak semua manusia bisa menangkap tanda-tandanya. **Ummu Rezqy.**

Baleendah. +62 821-1940-9xxx

Hakikat Pemuda

Pemuda adalah penerus perjuangan peradaban ini. Sebagai pemuda Muslim harus memiliki kepribadian yang bersyakhshiyah Islam terlebih dalam keimanan, ketakwaan, serta adab, karena dengan bersyakhshiyah Islam dapat menaikkan kualitas kita di dunia dan di akhirat. Seorang pemuda Muslim yang sejati akan mengedepankan adab dan akhlakul karimah dalam bersikap, tak salah jika dunia ini mencetak generasi yang hebat karena dasarnya saja kokoh nan kuat.

Wahai para pemuda, sesungguhnya penentu perjuangan ada pada tangan kalian Jadilah generasi yang bermanfaat bagi umat, memiliki tingkat keimanan serta ketakwaan yang terbaik serta adab yang terjaga, sehingga di tangan kalianlah perubahan dunia ini. Karena pada hakikatnya seorang pemuda dengan iman dan takwa.

Fatin Rohmani. SMAIT Al-Amri. Probolinggo.
081217207xxx

Jilbab Pakaian Wajib

Di zaman sekarang ini, sebagian Muslimah berpendapat bahwa jilbab itu adalah kerudung. Jadi kalau sudah pakai kerudung dia berpendapat sudah pakai jilbab walaupun pakaianya tidak syar'i, seperti pakai celana jeans atau pakai rok potong-potong. Mereka juga tidak memahami tentang kewajiban memakai jilbab dan menutup aurat.

Ditambah lagi oleh pandangan seseorang tokoh yang berpendapat bahwa muslimah tak harus memakai jilbab, dan jilbab bukan suatu kewajiban bagi para perempuan jadi para perempuan semakin sekuler dalam kehidupannya.

Padaahal, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya baik bagian dalam maupun luarnya, demikian pula lengannya termasuk aurat.

Adapun kewajiban berjilbab bagi Muslimah di tetapkan berdasarkan firman Allah SWT: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan istri-istri kaum Mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.'" (TQS al-Ahzab) (33):59).

Kewajiban berjilbab bagi Muslimah ini juga diperkuat oleh riwayat Ummu 'Athiyah yang berkata: Pada dua hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum Muslim dan doa mereka. Namun wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkah dia keluar)? Lalu Rasul SAW bersabda, "Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Andaikan berjilbab bagi Muslimah tidak wajib, niscaya Nabi SAW, akan mengizinkan kaum Muslimah keluar dari rumah mereka tanpa perlu berjilbab. Hadits ini pun menegaskan kewajiban berjilbab bagi para Muslimah.



Sekira 250 orang mengikuti Diskusi Media Umat: di Balik Gurita Korupsi Negara Demokrasi, Kamis, (30/1/2020) di Aula DHN Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Mantan Stafsus Menteri ESDM Muhammad Said Didu; Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin; dan Ustaz Rokhmat S Labib hadir sebagai pembicara.[]

MediaUmat tabloid
mediaumat.news Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Menara 88 Casablanca, Tower A.10E. Jl. Raya Casablanca No.88, Jakarta Selatan. 12870. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.



Ayat dan hadits itu sangat jelas. Karenanya, kedudukan memakai jilbab sama dengan wajibnya dengan perintah shalat. Maka kalau tidak melaksanakannya nanti di akhirat akan mendapat siksa yang pedih. **Arum R. Kp. Sukadana.** +62 899-6886-xxx

Habis Konstantinopel, Roma

Sejarah mencatat bahwa upaya serius penaklukan Konstantinopel telah berlangsung sejak lama, sejak masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (660-669 M) dan baru berhasil di era Khilafah Utsmaniyah. Para sahabat bertanya kepada Rasul "Di antara dua kota ini manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu: Konstantinopel ataukah Roma?" Beliau menjawab: "Kota heraklius ditaklukkan terlebih dahulu yaitu konstantinopel."

Janji nabi itu ternyata memotivasi setiap Khalifah untuk merealisasikannya. Konstantinopel yang dikenal dengan benteng-bentengnya yang kuat, dikelilingi yaitu selat Baskhorus, laut Marema dan Tanduk Emas, sehingga kapal musuh sulit memasukinya. Daratannya juga dijaga oleh benteng yang kokoh.

Berbagai usaha penaklukan dilakukan tapi selalu gagal. Akhirnya 8 abad berlalu Allah SWT mengabulkan impian tersebut melalui kepemimpinan seorang pemuda yang gagah, yang shalih, yang memiliki ruh jihad yang kuat dialah Muhammad Al-Fatih. Dia bersungguh-sungguh menjemput janji nabi SAW, setelah dia diangkat menjadi sultan.

Muhammad Al-Fatih menyiapkan segalanya dengan sangat matang. Pasukan ditambah hingga lebih dari 200 ribu. Mereka dilatih dengan berbagai seni tempur dan ketangkasan bersenjata. Hampir 2 bulan pasukan Al-Fatih melakukan pengepungan dan serangan-serangan ke Konstantinopel yaitu dari 26 Rabiul Awal-19 Jumadil Ula 857 H (6 April-28 Mei 1453). Muhammad al-Fatih mengerahkan berbagai strategi di antaranya memindahkan kapal melalui bukit, membuat terowongan-terowongan dan benteng bergerak dari kayu. Akhirnya 20 Jumadil Ula 857 H (29 Mei 1453 M) Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh pasukan kaum muslim dengan sempurna.

Kemenangan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia akan datang dengan proses yang panjang yang kadang kala harus mengorbankan segenap jiwa dan raga. Bisarah penaklukan Konstantinopel telah berlalu tetapi masih ada bisarah selanjutnya yaitu penaklukan Kota Roma. Ini yang harus kita perjuangkan saat ini sebagaimana perjuangan para sahabat menaklukan Kota Konstantinopel. Allahu Akbar. **Isah. Ciparay .+62 895-2545-6xxx**

Banjir dan Pembangunan Kapitalistik

Peristiwa hujan deras di Jakarta sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 mengakibatkan hampir semua wilayah Jakarta lumpuh. Tercatat ada 63 titik banjir yang menyebar di kawasan Jakarta.

Kenapa banjir terus saja berulang setiap tahunnya? Tentu hal ini bukan karena faktor alam semata atau problem teknis (tidak berfungsinya drainase, resapan air atau kurangnya kanal). Tapi jauh dari itu, masalah yang tersistemik yang lahir dari berlakunya sistem kapitalistik.

Tata kota dan pembangunan infrastruktur yang diserahkan sepenuhnya pada kemauan kaum kapitalis tak mengindahkan lingkungan dan keselamatan rakyat.

Jelas, banjir yang terjadi di daerah Jabodetabek ini hasil dari ulah kerakusan kaum kapitalis. Pencegahan banjir tidak cukup hanya dilakukan dengan pembersihan gorong-gorong, sungai, rekayasa teknologi pengendalian hujan dan pembuatan bendungan. Akibatnya, hanya berujung pada solusi yang pragmatis dan parsial saja.

Banjir adalah kuasa Allah yang menggendaki hambanya untuk kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan aturan Allah dengan menerapkan syariat-Nya. Tata kelola tanah dan negara harus dihindarkan dari kepentingan bisnis. **Inang Handayani. Tulungagung. +62 838-5454-1xxx**



Membangun Optimisme Bangsa

Sikap optimis sangatlah diperlukan untuk kemajuan sebuah bangsa atau negara. Negara atau bangsa yang pesimis, tidak akan pernah bangkit dari ketinggalannya, dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Ujung-ujungnya, bangsa seperti ini akan menjadi pengekor negara-negara yang menindasnya. Bahkan pasrah atas penindasan yang terjadi. Inilah cerminan negara gagal.

Melihat catatan perjalanan negeri ini, justru sikap optimisme inilah yang semakin berkurang, bahkan bisa nyaris hilang. Banyak pihak yang tidak yakin kepada rezim sekarang akan bisa membawa negeri ini bangkit. Negeri ini justru didera berbagai persoalan yang sepertinya tidak bisa diselesaikan. Dalam masalah ekonomi, utang semakin bertambah. Hampir semua pihak pesimistis utang ini bisa diselesaikan. Korupsi semakin menggurita. Apalagi setelah KPK dilemahkan dengan undang-undang. Kalau ditanya, hampir semua orang akan mengatakan, pesimistis korupsi bisa diselesaikan.

Terhadap penegakan hukum pun sama. Hukum yang dikendalikan oleh kekuatan politik berkuasa, membuat hukum tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan adil. Hukum telah dikendalikan untuk kepentingan penguasa. Siapa yang diproses, siapa yang dibiarkan, tergantung kepentingan penguasa.

Penegakan hukum begitu tajam kalau terkait dengan pihak yang berseberangan dengan Istana, ulama yang kritis, intelektual yang membongkar bobrok penguasa. Beda halnya dengan pihak-pihak yang diduga dekat dengan Istana atau paling tidak sejalan dengan kepentingan Istana. Nyaris tidak tersentuh, prosesnya begitu lambat, atau berhenti sama sekali.

Lantas bagaimana membangun optimisme negeri ini? *Pertama*, penting memahami apa yang menjadi penyebab masalah negeri ini hingga sulit menyelesaikan masalahnya. Kapitalisme liberal yang diadopsi negeri ini, inilah pangkal masalahnya. Korupsi tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang mahal, yang membuat politisi memilih jalan korupsi untuk mengembalikan modal politiknya, balas budi terhadap cukong kekuasaannya, atau untuk mempertahankan kekuasaannya.

Tak jauh berbeda dengan ekonomi liberal yang menjadi panglima dalam kebijakan ekonomi. Inilah yang telah menjerumuskan negeri ini pada keterpurukan. Utang ditutup dengan utang. Sementara kekayaan alam dijarah penguasa rakus baik dalam maupun luar negeri dengan alasan investasi dan pembangunan. Rakyat sengsara. Penguasa tak peduli. Mereka lebih mementingkan penjajah Barat daripada bangsanya sendiri. Demi rakyat, demi negara hanyalah retorika.

Kedua, bangsa ini harus tahu, apa yang justru menjadi kekuatan. Jawabannya, tidak lain adalah Islam. Kembali kepada Islam, inilah jalan optimisme untuk menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini. Secara keimanan, ajaran Islam yang bersumber dari Allah SWT, adalah sempurna. Karena berasal dari Dzat yang Maha Sempurna. Sebagai petunjuk untuk manusia, pasti akan bisa menyelesaikan persoalan manusia. Ajaran Islam, sebagai ajaran yang *rahmatan lil alamin*, kalau diterapkan pasti akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia.

Karena itu seruan kepada syaria Islam sebagai solusi bangsa ini, sudah seharusnya disambut positif. Kalau pun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan krusial terkait dengan penegakan syaria Islam, seharusnya bisa dibahas secara terbuka dan objektif. Bukan sebaliknya rezim sekarang malah menutup pintu diskusi dan dialog. Syaria Islam sudah dicap sebagai perusak negeri ini. Yang memperjuangkannya dianggap penjahat. Inilah penghalang mendapatkan kebenaran Islam. Pintu dialog dan diskusi pun menjadi tertutup.

Dalam membangun optimisme, bangsa ini harus belajar dari sukses hebat penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih. Sejak kecil, Al-Fatih, sudah ditanamkan sikap optimisme dan visioner. Bahwa dialah penakluk Konstantinopel yang dijanjikan Rasulullah pasti terjadi. Dialah sebaik-baik panglima perang dengan pasukan yang terbaik pula. Yakin pada janji kemenangan dari Allah SWT dan kabar gembira dari Rasulullah inilah yang membangun optimism Muhammad al-Fatih.

Namun keyakinan dan kerinduan untuk meraih kemuliaan dalam Islam, membutuhkan amal yang sungguh-sungguh dengan mengikuti sunnatullah dan kaidah kausalitas (sebab akibat). Tidak cukup yakin, tidak cukup berdoa, namun ada ikhtiar nyata. Inilah yang dilakukan oleh Muhammad al-Fatih dan kaum Muslimin sebelumnya.

Muhammad al-Fatih juga menyadari, untuk meraih kemenangan Allah dibutuhkan ketaatan dan kedekatan dengan Allah SWT. Inilah jalan turunnya kemenangan dari Allah SWT. Dan dimulai dari dirinya sendiri, sang Panglima yang tidak pernah berhenti berdoa agar dirinya, pasukannya, dan umat Islam, diberikan kemenangan. Shalat tahajud menghiasi malam-malamnya. Pasukannya pun dipastikan olehnya sendiri, agar tidak berbuat maksiat, yang bisa menghalangi datangnya pertolongan Allah SWT.

Inilah jalan optimisme untuk negeri ini. Kembali kepada Islam, yakin akan janji kemenangan dari Allah SWT, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan senantiasa membangun keterikatan dengan syaria Islam. Masih ada kabar gembira Rasulullah yang tersisa untuk kita: penaklukan Roma, kembalinya khilafah, dan peperangan melawan Yahudi. Inilah kesempatan emas generasi kita, kesempatan untuk meraih janji kemuliaan dari Allah, kesempatan menoreh sejarah dengan tinta emas. Allahu Akbar! [] **farid wadji**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



Trias Korupsi

Siapa yang tak geram dengan korupsi di Indonesia. Bukannya hilang, di era reformasi ini, korupsi seakan telah membudaya. Tak salah jika korupsi berlangsung secara terstruktur, sistemik, dan masif (TSM).

Keberadaan lembaga hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, tidak cukup untuk memberantas korupsi. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu menutup kelemahan lembaga hukum sebelumnya, nasibnya sama. Kian hari makin tak berdaya.

Korupsi kian subur di era demokrasi. Tiga pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semuanya sudah dimasuki virus korupsi. Sistem demokrasi yang berbiaya tinggi 'memaksa' pilar-pilarnya mencari modal. Di sisi lain, para pemodal memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan ekonomi.

Jangan heran bila ada yang bilang, "Apa sih yang tidak bisa diatur di Indonesia ini selama mempunyai uang?" Semua bisa selesai dengan uang. Bahkan hukum pun bisa dibeli jika tersedia uang yang cukup. Lihat saja, ada koruptor yang bisa libur dulu dari penjara dan berjalan-jalan ke mal atau ke tempat lainnya.

Itulah mengapa, Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212, mencatat, berbagai kasus mega korupsi merupakan modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zalim, licik, dan rakus. Rezim seperti ini, menurut Ormas tersebut, harus dilawan.

Novel Bamukmin, Ketua Media Center PA 212 mengaku prihatin karena pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa. Bayangkan Ketua KPK bisa dipanggil oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.

Ia menyebut, di Jepang, negara yang tidak menganut Pancasila sebagai ideologi yang diagung-agungkan, pejabat-pejabat yang terlibat atau bahkan hanya disebut namanya dalam suatu peristiwa korupsi akan segera meletakkan jabatan dan bahkan harakiri karena sangat malu dengan perbuatan korupsi. Di Indonesia? Tahu sendiri. Bahkan tak ada yang menyebut para koruptor sebagai anti Pancasila.

Hukuman bagi koruptor pun begitu ringan sehingga tak ada efek jera. Tak sebanding dengan uang yang telah digarongnya. Bahkan, konon, koruptor bisa memesan 'penjara' yang nyaman.

Parahnya, korupsi terjadi di tengah masyarakat yang lagi susah karena perekonomian negara yang terus memburuk. Begitu tega mereka bergembira, merampas harta, di saat banyak rakyat sengsara.

Akankah kondisi seperti ini terus berlangsung? Selama demokrasi menjadi sistem ketatanegaraan Indonesia, peluang korupsi sangat besar. Sebab, demokrasi itu sendiri sumber korupsi.

Maka tidak ada jalan lain kecuali mengubah sistem yang rusak itu dengan sistem yang baik. Pilihannya adalah Islam. Tak perlu takut dikatakan tidak menerapkan *trias politica*, bila prinsip itu menghancurkan bangsa dan negara.

Sistem Islam menyandarkan prinsip-prinsip bernegara berdasarkan syariah Islam. Kedaulatan ada di tangan Allah, sementara kekuasaan di tangan manusia. Manusia sekadar menjalankan hukum yang ada, bukan membuat hukum sesuai hawa nafsu dan kepentingannya.

Lebih dari itu, sistem itu wajib untuk diterapkan. Dan pasti akan membawa kebaikan manusia. [] **mujiyanto**



'Virus' Korupsi Serang Pilar Demokrasi

Belum kellar kasus korupsi yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, rakyat kembali disuguhi wajah-wajah wakil rakyat yang diduga sebagai koruptor. Mereka adalah 14 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap, Kamis (30/1).

Penetapan tersangka ini diduga terkait kasus sebelumnya yang menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Suap yang diberikan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bertujuan agar DPRD menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014; menyetujui perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014; mengesahkan APBD Pemprov Sumut 2014 dan 2015; serta menolak penggunaan hak interpelasi pada 2015.

"Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima *fee* berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang seba-

gai anggota DPRD Sumatera Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta.

Dengan penetapan sebagai tersangka ini, total anggota DPRD Sumut yang harus mengenakan rompi kuning KPK ada 64 orang. Di antara mereka adalah Japormen Saragih, yang menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan, Sumatera Utara.

"Kasus ini sekali lagi menunjukkan bagaimana korupsi yang dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing ataupun mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya," kata Ali.

Dalam kasus ini, pemberi suap yakni Gatot Pujo Nugroho sudah divonis 4 tahun 2 bulan penjara karena terbukti menyuap para anggota DPRD sebesar Rp 61 miliar.

Kasus Besar

Sementara itu, publik masih menunggu ujung dari skandal

Jiwasraya. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp 13,7 triliun akibat PT Asuransi Jiwasraya berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah. Bahkan, informasi terakhir, kerugian itu membengkak menjadi Rp 16 triliun karena ada beberapa kewajiban yang jatuh tempo.

Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin menilai, perusahaan BUMN ini diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar *high return*.

Ia menjelaskan, perusahaan plat merah itu menempatkan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari Aset Finansial. Menurutnya, dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan 95 persen dana sisanya ditempatkan di saham berkinerja buruk.

Kemudian, Burhanuddin mengatakan PT Asuransi Jiwasraya itu juga menempatkan reksadana 59,1 persen dengan nilai mencapai Rp 14,9 triliun dari Aset Finansial. Menurutnya, dari jumlah tersebut, hanya 2 persen yang dikelola oleh manager investasi



Semua pilar demokrasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah terjangkiti 'virus' korupsi.

Indonesia dengan kinerja baik dan 98 persen sisanya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

Anehnya, ada upaya meredam skandal Jiwasraya ini. Wakil rakyat di DPR ramai-ramai menolak membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk membongkar kasus tersebut. Hanya Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ngotot pembentukan Pansus. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru menggalang dukungan untuk menolak pembentukan Pansus.

Sebelumnya, mantan presiden SBY menyebut adanya dugaan keterkaitan kasus Jiwasraya dengan aliran uang untuk Pemilu 2019. Dalam tulisan yang diunggah di Facebook pada Senin (27/1), Yudhoyono meminta publik diberi pencerahan apakah memang benar ada uang mengalir dan dipakai untuk kepentingan pemilu, terlebih ke kas-kas partai politik.

"Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?" tulis SBY.

Menurut SBY, investigasi penting dilakukan karena sudah

banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat. Karenanya, perlu dijawab dengan mengusut tuntas benar tidaknya ada aliran dana dari Jiwasraya untuk kepentingan politik.

"Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu mau pun tim kandidat presiden," tulis SBY.

Majalah Tempo edisi 1 Februari 2020 mengungkap, ada upaya rezim Jokowi meredam kasus Jiwasraya ini menjadi besar. Dalam tulisan berjudul *Gaduh Hilang Fulus Terbilang* itu, Istana melobi partai koalisi agar tidak menggunakan hak angket di DPR dengan membentuk Pansus. Menteri BUMN Erick Thohir di hadapan partai koalisi memaparkan strategi penyelamatan Jiwasraya.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yakin ada tindak pidana korupsi di Jiwasraya. Keyakinan itu didasarkan atas kondisi Jiwasraya sendiri yang sebelumnya tergolong sehat. "Terjadi perampokan (di Jiwasraya). Perusahaan yang sangat

sehat pada 2016-2017, lalu defisit puluhan triliun di tahun berikutnya, berarti ada penyedotan dana yang terjadi," ujar Said di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menurutnya, ini bukan masalah gagal bayar karena disebabkan kesalahan dalam proses berbisnis. "Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998. *Enggak* mungkin bocor sampai puluhan triliun, kalau risiko bisnis *enggak* sebesar itu," kata dia.

Belum tuntas kasus Jiwasraya mencuat kasus yang tak kalah besarnya yakni PT Asabri (Persero). Perusahaan asuransi plat merah yang fokus memberikan perlindungan pada prajurit TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan itu terkena dugaan korupsi dengan nilai di atas Rp 10 triliun.

Isu dugaan korupsi ini awalnya dimunculkan Menkopolhukam Mahfud MD. Ia menduga, ada korupsi di atas Rp 10 triliun. "Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1).

Temuan Transparency International Indonesia

Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan hasil penelitian mereka tentang indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia di Jakarta, Kamis (23/1).

Berdasarkan survei yang dilakukan, IPK Indonesia tahun 2019 naik dua poin, dari 38 menjadi 40. IPK Indonesia berada di peringkat empat di antara negara-negara Asia Tenggara. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan 85 poin, kedua Brunei Darussalam 60, dan Malaysia 53.

Namun ada beberapa sektor yang perlu diwaspadai dalam indeks persepsi korupsi, yakni: pengendalian pemerintah terhadap korupsi; grade korupsi; prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik; korupsi politik dan korupsi birokrasi; serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan kepolisian.

Masing-masing sektor tersebut indeksnya masih di bawah angka 40. Poin terendah ada pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan kepolisian. Angkanya 21 poin.

"Perhatian terhadap *rule of law*, masih ada penyalahgunaan wewenang di pejabat eksekutif yudikatif dan legislatif," ucap Wawan Heri, peneliti TII. [] **emje**

KPK yang Lemah

Sementara itu, pengungkapan kasus suap terhadap Komisisioner KPU Wahyu Setiawan sepertinya menemui jalan buntu. Tersangka kasus suap KPU Harun Masiku, hingga tulisan ini ditulis masih buron. Publik mempertanyakan, mengapa begitu sulit menangkap orang yang sangat jelas identitasnya itu. Fotonya pun sudah menyebar ke mana-mana. Bandingkan dengan tersangka teroris yang begitu mudahnya ditangkap.

Harun Masiku, caleg dari PDIP ini, diduga memiliki informasi penting terkait dengan orang-orang penting di partainya. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto diduga berada di balik suap tersebut karena orang dekat Hasto yang sudah ditangkap KPK, Saeful Bahri, mengaku uang suap itu berasal dari Hasto.

Dalam kasus suap ini, terlihat begitu ngototnya PDIP 'memaksa' KPU agar Harun menjadi anggota DPR. Ini yang jadi pertanyaan publik. Padahal, di daerah pemilihannya, ia hanya menduduki urutan kelima dalam perolehan suaranya. Hingga tiga kali DPP PDIP melayangkan surat ke KPU dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Banyak analisis bermunculan terkait hal ini. Namun, yang tampak, KPK giginya mulai ompong. Jaksa yang diduga menjadi penyidik dalam kasus ini, Yadyn Palebangan, tiba-tiba ditarik oleh Kejaksaan Agung, Jumat (31/1). Penarikan tiba-tiba ini memunculkan dugaan bahwa keputusan itu berkaitan dengan penanganan kasus suap Harun Masiku.

Yadyn mengetahui secara mendalam kasus ini karena ia mengikuti kasus itu dari awal. Jaksa berperan sebagai pengendali penanganan perkara. Dalam

setiap operasi tangkap tangan, selalu ada peran jaksa untuk menganalisis kasus korupsi untuk memastikan terjadinya tindak pidana dalam perkara yang tengah diselidiki. "Peranan jaksa di situ ada dalam penyelidikan tertutup," katanya dikutip *tempo.co* (31/1).

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai penarikan pegawai secara tiba-tiba bisa jadi salah satu cara untuk melemahkan komisi antirasuah tersebut. Dengan begitu, penanganan perkara di KPK akan terhambat.

Trias Korupsi

Korupsi telah menggurita. Semua pilar demokrasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah terjangkiti 'virus' korupsi. Bahkan, menurut pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, pers—sebagai lembaga kontrol—pun andil dalam atmosfer korupsi ini.

Tak tanggung-tanggung, hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara tersangkut korupsi. Dari legislatif tercatat: Setya Novanto (Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar); Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR RI); Irman Gusman (Ketua DPD RI); termasuk Romahurmuziy (Ketua Umum PPP dan anggota Komisi III DPR RI). Dari yudikatif, yang paling fenomenal adalah Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Sekjen Mahkamah Agung Nurhadi—jadi tersangka korupsi Rp 46 miliar. Di jajaran eksekutif—kabinet Jokowi: Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi; Menteri Sosial Idrus Marham; dan yang masih dalam proses penyidikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kasus suap anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus temuan uang di kantornya sebesar Rp 180 juta dan 30 ribu USD. [] **emje**



Politik Transaksional, Korupsi Membudaya

"Mau rugi enggak? Apa benar saya (kepala daerah) mau mengabdikan kepada negara terus rugi. Bullshit."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berdiri sekian tahun lamanya. Alih-alih menyelesaikan masalah korupsi, justru korupsi kian marak. Lembaga yang diharapkan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi itu kini malah ompong.

Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara tiba-tiba tak berani mengeledah kantor partai? Publik kemudian bertanya-tanya, benarkah ada kaitan antara komisioner KPK atau Dewan Pengawas KPK dan petinggi partai tersebut?

Fakta menunjukkan, para komisioner KPK dipilih oleh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Logikanya, tak mungkin DPR memilih petinggi KPK yang akan menghancurkan partainya atau mencokok anggota Dewan seperti sebelumnya. Dan ini terlihat sebelumnya dengan revisi UU KPK di mana tindakan penyadapan/pengeledahan oleh KPK harus mendapat izin Dewan Pengawas—yang ditunjuk oleh presiden. Maka, apa yang dikhawatirkan oleh kalangan pegiat anti korupsi terjadi. KPK tak bisa berbuat apa-apa.

Politik Transaksional

Terjeratnya orang-orang dari tiga pilar demokrasi yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak lepas dari sistem politik demokrasi. Sistem ini berbiaya tinggi. Tidak mungkin seorang akan menjadi pemimpin, termasuk wakil rakyat, tanpa modal. Mereka harus menyiapkan modal yang cukup. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut seorang calon bupati, minimal harus memiliki modal sebesar Rp 30 miliar – Rp 50 miliar.

Jumlah ini tidak sebanding dengan gaji seorang bupati yang berkisar Rp 6 juta per bulan. Bila dihitung selama lima tahun, jumlahnya hanya Rp 360 juta. "Mau rugi enggak? Apa benar saya (kepala daerah) mau mengabdikan kepada negara terus rugi. Bullshit," kata Tito.

Jumlah lebih besar diperlukan oleh seorang yang ingin men-

jadi gubernur, apalagi presiden. Modal juga diperlukan oleh para calon wakil rakyat baik di daerah maupun di pusat. Sudah menjadi rahasia umum, mereka harus menyiapkan dana miliaran. Sebagai contoh, calon Partai Nasdem, modal awal mereka minimal Rp 5 miliar untuk menjadi anggota DPR.

Pertanyaannya, dari mana modal itu? Apakah dari kocek sendiri? Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyebut, munculnya kasus-kasus korupsi sangat terkait dengan keberadaan para investor atau cukong politik yang bermain dalam setiap momentum pemilihan para pejabat negara, termasuk anggota dewan maupun kepala daerah.

Transaksi politik seperti inilah yang diyakini mendorong munculnya korupsi. Pegiat media sosial M Said Didu menyebut, korupsi di BUMN bahkan berlangsung secara TSM (terstruktur, sistemik, dan masif).

Modus Korupsi

Mega skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri, menurut Menkopolkum Mahfud MD memiliki kesamaan modus, bahkan pelakunya. Perusahaan asuransi itu menginvestasikan dana nasabah dengan membeli saham-saham yang tidak produktif dengan harapan mendapat keuntungan yang berkali lipat. Istilah populer adalah membeli saham gorengan.

Yang terjadi kemudian, harga saham jelek dan bahkan tidak bernilai sehingga perusahaan itu tak mampu membayar premi para nasabah. Sebagai jalan keluar, perusahaan minta pemerintah mem-bail out (menyuntik) dana dalam jumlah triliunan untuk menutupi kerugian perusahaan. Padahal, sebelumnya perusahaan itu konon dalam kondisi sehat.

Menurut pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, BUMN dijadikan kendaraan politik bagi penguasa. Skandal mega korupsi seperti Bank Century, mengindikasikan ada permainan untuk mengeruk uang dari sana. Bagaimana dengan skandal Jiwasraya, Asabri, dll, perlu dibuktikan.

Menyimak kasus Setya No-

vanto, korupsi dilakukan sejak masa penganggaran e-KTP di DPR. Ketua DPR ini mengatur pihak ketiga agar proyek e-KTP gol. Atas 'jasanya' itu, ia mendapatkan duit total USD 7,3 juta. Model Setya Novanto itu terjadi pula di birokrasi. Mainnya di penganggaran, dan pejabat yang berwenang 'menitipkan' bagiannya dalam penganggaran itu.

Setya pun sebelumnya tersangkut kasus 'Papa Minta Saham' PT Freeport. Sayangnya kasus ini berhenti di tengah jalan karena konon melibatkan pejabat tinggi yang lainnya. Modusnya, Setya meminta bagian saham perusahaan emas itu agar perpanjangan kontraknya bisa dilanjutkan.

Khusus korupsi di bank BUMN, menarik yang disampaikan ekonom senior Faisal Basri. Seperti dikutip *CNBIIndonesia*, ia menyebutkan setidaknya ada lima modus.

Pertama, Bank BUMN terus memberikan utang kepada proyek yang "gagal", namun pembayaran cicilan dan bunganya dilakukan oleh perusahaan "induk" di luar negeri. "Utang diperlakukan sebagai utang lancar, lalu di-top up lagi," tulis Faisal dalam paparannya.

Kedua, utang proyek A macet, lalu mengajukan proyek B untuk membiayai proyek A. "Makanya yang memperoleh pinjaman dari bank cenderung itu-itu saja (4L), banyak yang dekat dengan kekuasaan atau di lingkaran kekuasaan."

Ketiga, utang dari bank BUMN untuk membangun gedung perkantoran milik seorang menteri. "Gedung itu tak laku, lalu BUMN lain diminta untuk merenovasi dan menyewanya selama lima tahun," tulisnya.

Keempat, supaya tidak perlu izin dari komisaris dan tidak mencapai BMPK, kredit dipecah-pecah dalam jumlah yang kecil-kecil dengan berbagai nama.

Kelima, ada satu bank swasta sakit 'berat', bank-bank BUMN diminta untuk menyelamatkan.

Sementara korupsi di daerah, menurut mantan juru bicara KPK Johan Budi, modus operandi tindak pidana korupsi setiap ta-

hun terus mengalami perkembangan. "Saya lihat lima atau enam tahun belakangan ini modus operandi korupsi tidak lagi konvensional. Kalau dulu pengadaan barang dan jasa kemudian anggaran di-markup, itu dulu, tapi sekarang saya lihat ada modus baru," kata Johan.

Modus baru yang dimaksud Johan adalah 'perselingkuhan' antara lembaga legislatif dengan eksekutif, yaitu bupati, wali kota maupun gubernur dengan pihak DPRD setempat. Kongkalikong itu

sendiri terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari proses penganggaran APBD, pengesahan hingga laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Bahkan ia menyebut beberapa perkara yang ditangani KPK adalah terkait dengan LPJ kepala daerah.

"Biasanya dalam praktik tersebut, pihak legislatif meminta sejumlah uang kepada kepala daerah agar laporannya diterima dan disahkan oleh DPRD," jelasnya. **emje**





Indahnya Sistem Islam

Dengan hukum seperti ini, tidak mungkin lagi ada permainan untuk mengutak-utik hukum demi kepentingan penguasa, partai politik, dan elite-elite kekuasaan.

Hampir semua koruptor adalah orang-orang yang berkecukupan. Mungkin tak ada koruptor yang miskin. Bahkan banyak di antaranya memiliki kekayaan yang luar biasa dibandingkan rakyat pada umumnya. Tapi mengapa masih saja mau korupsi?

Ternyata sistem politik demokrasi sumber masalahnya. Bagaimana tidak, sistem itu mengharuskan penguasa dan pejabat negara memiliki modal yang besar untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya. Tak ada lembaga politik dan masyarakat yang menolak argumentasi tersebut.

Di sisi lain, sistem demokrasi telah mengesampingkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Rasa takut para penguasa dan aparaturnya kepada Allah telah luntur dimakan jargon demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tak ada Tuhan di dalamnya.

Wajar bila suap menyuap, gratifikasi, dan tindakan menyalahgunakan kekuasaan menjadi pemandangan sehari-hari. Dari level paling rendah hingga level tertinggi. Semua berlangsung secara sengaja. Dalam perkembangannya, administrasi negara diutak-atik sedemikian rupa agar 'korupsi' itu menjadi sah/legal.

Kalau bisa, hukum pun dipermainkan agar mereka yang terjerat kasus bisa dibebaskan begitu saja. Undang-undang dibuat untuk melindungi aparat negara dan para pembuat hukumnya agar bisa leluasa mengeruk uang rakyat.

Sistem Islam

Sistem Islam dibangun di atas landasan keimanan kepada

Allah SWT. Semua perbuatan siapa pun, baik pejabat dan rakyat, dikaitkan pertanggungjawaban kepada Allah. Sistem ini memiliki sistem pengawasan melekat, yang menyatu dalam setiap diri manusianya.

Di tambah lagi, di dalam sistem itu hidup suasana saling mengontrol antar masyarakat. Amar makruf nahi mungkar menjadi pilar pemelihara umat dari perbuatan maksiat. Ini bisa terjadi karena masyarakatnya terbentuk dari manusia-manusia yang bertakwa, yang tak ingin saudara mereka terjerumus dalam dosa.

Di sisi lain, negara menerapkan hukum-hukum Islam. Hukum tersebut bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga hukum ini bersifat tetap dari waktu ke waktu, meskipun penguasa silih berganti. Dengan hukum seperti ini, tidak mungkin lagi ada permainan untuk mengutak-utik hukum demi kepentingan penguasa, partai politik, dan elite-elite kekuasaan seperti dalam sistem pembuatan hukum dalam demokrasi.

Sistem ketatanegaraan ini akan mencegah para cukong/kapitalis untuk memainkan kepentingannya. Pintu-pintu masuknya telah ditutup oleh Islam. Proses legislasi hukum tidak ada karena hukum sudah fiks dan terus berlaku. Sementara, para penguasa hanyalah melaksanakan hukum yang ada. Bukan membuat hukum baru seperti dalam sistem demokrasi di mana ada kalangan legislatif secara terus menerus membuat dan mengubah hukum, sehingga sangat mudah diintervensi oleh para cukong/kapitalis dan penguasa itu sendiri.

Dalam Islam, penguasa tidak dibatasi masa kerjanya. Dia bisa memimpin sampai akhir hayatnya. Yang membatasi masa kerjanya hanyalah ketaatannya pada

hukum Islam. Manakala ada pelanggaran hukum Islam, dia bisa diberhentikan. Inilah yang menjadikan para penguasa Islam tidak memikirkan bagaimana menyiapkan diri secara periodik—seperti dalam sistem demokrasi—agar terpilih kembali. Sistem pemilu berulang setiap lima tahun justru menghabiskan anggaran yang besar. Perhatikan Pilpres Indonesia yang menghabiskan Rp 24 triliun lebih, hanya untuk menjadikan Joko Widodo menjadi presiden kembali. Orangnya sama.

Sistem ketatanegaraan Islam bisa menghemat biaya yang tidak perlu hanya untuk pemilu. Kepala daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota dipilih oleh khalifah. Tugas mereka pun sama, melaksanakan aturan Islam di daerah.

Baik penguasa di pusat dan di daerah, diawasi oleh wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. Standar pengawasannya adalah syariah Islam. Rakyat bisa mengadukan kepala daerah bila mereka tak

melayani rakyat dengan baik atau melanggar ketentuan syariah. Penguasa daerah pun bisa diberhentikan kapan saja. Di sinilah, aparaturnya dalam sistem Islam akan bekerja dengan baik bagi kepentingan rakyat.

Dari sisi hukum, khilafah adalah negara hukum (*rechtstaat*) sejati. Mengapa? Karena, hukum benar-benar menjadi panglima. Khilafah bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) di mana kekuasaan menguasai hukum [baca: hukum menjadi alat/legitimasi negara]. Harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan terjamin. Semua punya kedudukan yang sama di depan hukum, tak terkecuali penguasa. Tidak ada yang memiliki keistimewaan di hadapan hukum.

Mungkin ada yang bertanya, tidakkah sistem ini akan memunculkan kediktatoran sebab kekuasaan ada di satu tangan yakni khalifah? Jawabannya, jika landasannya sistem demokrasi seperti sekarang, pasti yang terjadi adalah kediktatoran—manakala presi-

den menguasai semua partai politik dan lembaga yudikatif. Di dalam Islam, sistem hukumnya yang tidak memungkinkan seorang pemimpin menjadi diktator. Seorang khalifah, dia tidak boleh melanggar syariah. Patut dicatat, kediktatoran terjadi karena ada kewenangan untuk membuat hukum. Sementara, khalifah tidak memiliki kewenangan itu. Hanya melaksanakan saja.

Walhasil, ketika sistem Islam diterapkan, *insyaallah* korupsi akan berkurang bahkan musnah sama sekali. Para pengusaha bisa berbisnis dengan aman dan nyaman tanpa harus membayar pungutan ini dan itu. Rakyat pun bisa menerima bagian dari kekayaan alam miliknya yang dikelola oleh negara dengan sepenuhnya. Semua saling mengawasi dan sama-sama mencari ridha ilahi.

Apakah tidak senang hidup dalam sistem indah seperti ini?[]
mujiyanto

Khilafah Sistem Manusiawi

Sistem Islam adalah sistem yang manusiawi. Khalifah dan para pembantunya adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Makanya, dibuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan kontrol, *muhasabah* kepada mereka.

Inilah yang tergambarkan pada diri Abu Bakar as-Shiddiq ra, orang paling dekat Nabi Muhammad SAW, saat mengucapkan pidato ketika diangkat sebagai khalifah yang pertama menggantikan Nabi SAW memimpin negara.

"Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan

kebohongan itu adalah pengkhianatan. 'Orang lemah' di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. 'Orang kuat' di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiiku." []



Ichsanuddin Noorsy,
Pengamat Kebijakan Publik

Tidak Hanya *Trias Korupsi*

Kekuasaan itu dibagi-bagi menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif agar tidak terkumpul pada satu orang sehingga memudahkan baginya untuk korupsi. Namun setelah dibagi-bagi menjadi tiga kekuasaan, korupsi tetap marak. Merata di semua kekuasaan. Yang terjadi bukan pencegahan namun pembagian dan pemerataan korupsi. Sehingga jargon trias politica berubah menjadi trias korupsi. Dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, ternyata korupsi itu bukan hanya dilakukan trias politica tetapi sudah menjalar ke seluruh lini kehidupan. Berikut petikannya.

Apakah Anda melihat trias politica di Indonesia telah menjelma menjadi trias korupsi?

Di dalam demokrasi yang berbasis kekuatan kapital, yang saya sebut demokrasi korporasi, korupsi akan masuk ke semua lini kehidupan. Jadi dia tidak hanya trias korupsi, tetapi sesungguhnya juga korupsi pada bidang yang lain, korupsi pada pemberitaan misalnya.

Pemberitaan bagaimana maksudnya?

Ketika media tidak mau lagi menyampaikan kebenaran, ketika media kehilangan fungsi untuk menjadi penyampai suara hati nurani rakyat. Ketika media tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat, maka sesungguhnya bukan hanya trias korupsi, media pun sudah melakukan korupsi.

Dampaknya dari demokrasi korporasi itu terjadi krisis moral. Ini yang saya sebut sebagai demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi situasi sekarang sudah sampai pada situasi demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memangnya seberapa parah korupsi yang terjadi?

Saya mengatakan korupsi yang terjadi sudah sistematis, terstruktur, dan masif. Saya *ngomong kayak gini* bukan baru sekarang tapi sejak tahun 2004. Ketika pemilu 2004, saya sudah menggunakan istilah demokrasi korporasi.

Itu basisnya adalah bagaimana Amerika mendayagunakan korporasi besarnya untuk kepentingan pemilu. Bedanya dengan

Indonesia, Amerika secara terbuka korporasinya memberikan sumbangan ke Partai Republik atau Partai Demokrat. Tapi berikutnya, siapa saja yang berkuasa akan mengembalikan dukungan itu dengan berbagai macam kebijakan.

Contoh sederhana ketika George W Bush melakukan serangan ke Irak pada 19 Maret 2003. Dia mengembalikan kepada kekuatan Exxon dan Carlyle. Exxon mendapatkan sumur-sumur minyak di Irak sedangkan Carlyle yang memasok senjatanya.

Kalau contoh kasus di Indonesia?

Di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat pada cerita Ahok. Bagaimana Ahok mengatakan Jokowi tidak bisa menjadi presiden kalau tidak didukung oleh sejumlah konglomerat.

Berarti erat kaitannya dengan menjadikan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina ya?

Karena pengakuan Ahok sebagai temannya presiden, kita harus melihat begitu kuatnya kemauan Jokowi menempatkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Sementara kita tahu, proyek terbesar dalam BUMN ada di Pertamina. Tentu ada gula ada semut.

Apa akar masalahnya sehingga terjadi trias korupsi?

Amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 itu mengubah posisi partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Sedangkan parpolnya sendiri dikooptasi oleh kekuatan korporasi. Terjadilah oligarki

partai, oligarki politik, dan oligarki bisnis. Kedua oligarki ini kerja sama akhirnya, baik partai politik maupun korporasi, mengkooptasi negara.

Mengapa parpol terkooptasi korporasi?

Karena parpol tidak mempunyai sumber dana yang memadai. Karena biaya politik demokrasi korporasi itu tinggi. Dalam Pilpres Amerika 2016 yang dimenangkan Donald Trump, *New York Time* memperkirakan dana yang dihabiskan oleh kekuatan korporasi mencapai 8 miliar dolar Amerika. Ya... sama dengan Indonesia, yang terbuka beberapa triliun dilaporkan ke KPU. Yang tidak terbuka berapa? Kita tidak tahu.

Dan para korporasi itu minta kompensasi berupa kebijakan yang menguntungkan mereka?

Dalam dunia bisnis, ada investasi ada pengembalian. Cara pengembaliannya bagaimana? Terserah.

Alih-alih lahir pemerintah dan oposisi yang sehat malah jadi politik transaksional?

Suka tidak suka karena memang basisnya transaksional material. Dan siapa saja yang tidak setuju akan terlibas oleh kekuatan kombinasi oligarki politik dan oligarki bisnis.

Kombinasi bagaimana!?

Koalisi parpol itu adalah oligarki politik. Ketika para konglomerat bersatu maka menjadi oligarki bisnis. Dan ketika oligarki bisnis bergabung dengan oligarki politik terjadilah yang saya sebut kombinasi oligarki politik dan oligarki bisnis. Maka jadilah kombinasi oligarki

ini menguasai negara. Tidak ada yang bisa melawan mereka karena sistemnya dibuat begitu.

Dampaknya?

Demoralisasi. Demoralisasi akan mengakibatkan macam-macam. Harga-harga naik, tidak terkendali, rakyat menjadi tereksplotasi. Macam-macam dampak yang serba negatif. Karena yang dipikirkan hanyalah keuntungan pada parpol dan pebisnis. Rakyat? Rakyat sekadar objek.

Sekarang, perekonomian diserahkan kepada Omnibus Law. Dengan posisi Omnibus Law perekonomian diserahkan kepada kekuatan investasi asing.

BUMN juga banyak merugi...

Karena BUMN sudah menjadi kendaraan politik. BUMN dijadikan kendaraan politik bagi kekuatan penguasa. Itu masalah besarnya. Maka kelihatan, BUMN menjalankan perintah pada saat yang sama dia merugi. Contoh sederhana adalah Krakatau Steel yang merugi.

Dalam bahasa yang sederhana muncul pertanyaan. Kalau timbul kerugian di BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kalau begitu siapa sesungguhnya yang untung? *Kan* begitu, kalau ada pihak yang rugi, pasti ada pihak yang untung.

Maka pertanyaan itu harus dijawab. Bagaimana model bisnisnya? Di situlah muncul jawaban bahwa sesungguhnya pembangunan infrastruktur tidak menguntungkan Indonesia.

Contohnya MRT. Sekilas itu menguntungkan masyarakat Jakarta. Tetapi itu sesungguhnya yang menanggung utang ke

Jepang adalah dua generasi Indonesia. Begitu juga ketika bicara jalan tol. Jalan tol itu *kan* jalan berbayar, bukan jalan masyarakat umum.

Jadi sudah terjadi krisis moral yang parah ya...?

Ini krisis moral atau demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah masuk ke semua lini. Dia bukan cuma sakit pada pikiran tetapi juga sakit pada mental. Sehingga orang sudah tidak sungkan-sungkan lagi melanggar hukum.

Beberapa contohnya: betapa banyaknya bupati dan gubernur yang terkena kasus korupsi; begitu juga anggota DPR; kita juga bisa melihat Harun Masiku dalam kontruksi Hasto Kristiyantonya.

Itu gambaran demoralisasi. Pada saat yang sama masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi hajat hidupnya. Misalnya ribut soal kenaikan LPG 3 kg; atau kenaikan BPJS yang awalnya dijanjikan tidak naik; atau impor garam yang tadinya dibilang "saya akan hentikan rezim impor" tapi ternyata belum triwulan pertama selesai impor garam sudah terjadi. Itu menyedihkan di tengah posisi Indonesia sebagai negara yang garis pantainya terpanjang kedua di dunia tetapi ternyata garamnya impor.

Begitu juga ribut-ribut soal korupsi di berbagai lembaga. Itu menggambarkan ada persoalan mendasar yang tidak selesai di bangsa ini, yang akar masalahnya ada di sistem ekonomi dan sistem politik yang sesat. Basisnya adalah demokrasi korporasi.[]

Rokhmat S Labib,
Cendekiawan Muslim

Khilafah Mencegah dan Memberantas Korupsi

Meratanya korupsi di semua pilar demokrasi semestinya membuat kaum Muslimin sadar bahwa yang bermasalah bukan hanya para penyelenggara negara tetapi memang sistem kufur tersebutlah yang mendorong para pejabat korup. Berbeda dengan demokrasi, khilafah adalah sistem pemerintahan yang mencegah dan memberantas korupsi. Bagaimana caranya? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ustaz Rokhmat S Labib. Berikut petikannya.

Apa yang membuat eksekutif, legislatif dan yudikatif kompak korupsi?

Korupsi itu kejahatan. Sebagaimana layaknya kejahatan, itu terjadi ketika berkumpul dua hal, yakni keinginan dan kesempatan. Ada keinginan korupsi, namun tidak ada kesempatan dan peluang melakukannya, maka korupsi tidak terjadi. Demikian juga sebaliknya, ada kesempatan dan peluang, namun tidak ada keinginan, maka korupsi juga terjadi.

Nah, kedua hal itu berkumpul pada semua lembaga kekuasaan itu. Maka, terjadilah korupsi.

Mengapa itu bisa terjadi?

Coba dijawab dengan jujur. Apa motivasi utama banyak orang berebut menjadi anggota DPR dan DPD? Demikian pula menjadi bupati, gubernur, dan presiden serta hakim dan aparat penegak hukum lainnya? Apakah motivasi pengabdian atau finansial? Motivasi finansial yang jauh lebih dominan. Nah, sistem yang ada makin mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Bagaimana mendorongnya?

Sudah jamak diketahui, biaya politik di negara ini sangat mahal. Menurut Mendagri Tito Karnavian, untuk menjadi bupati diperlukan modal sekitar 30 sampai 50 miliar rupiah. Sementara gajinya, sekitar Rp 200 juta. Dikalikan 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar. Dikalikan 5 tahun masa jabatan, dapat Rp12 miliar. Pertanyaan, rugi atau untung? Maka dia katakan, hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak

pidana korupsi.

Fakta juga menunjukkan bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada bupati atau gubernur merugi setelah menjabat. Sebaliknya, justru hartanya bertambah banyak. Pertanyaannya, dari mana kekayaan itu bertambah? Sudah bisa ditebak dari mana kekayaan itu didapat.

Jadi secara sistem, demokrasi mendorong para pejabatnya untuk korup ya?

Ya, begitulah.

Tetapi kan menurut undang-undang korupsi tetap dianggap sebagai kriminal dan ada hukuman bagi pelakunya...

Masalahnya juga di situ.

Mengapa?

Yang membuat UU itu lembaga legislatif. Sementara perilaku anggotanya banyak yang korup. Penyebabnya juga sama dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Biaya politik untuk menjadi anggota DPR dan DPD sangat mahal. Kalau ingin menang, masih ditambah lagi dengan *money politic*. Maka, jangan heran jika di lembaga itu perilaku korup juga marak. Banyak kalangan yang sudah mengungkap tentang adanya fenomena jual beli pasal undang-undang dalam proses legislasi.

Nah, jika begitu kondisinya, apakah akan ada undang-undang yang berlaku tegas terhadap koruptor dan perilaku korupsi? Contoh terbaru adalah revisi UU KPK. Banyak yang mengatakan, UU itu justru melemahkan KPK. Bukan

memperkuat. Bagaimana korupsi bisa dihentikan jika lembaga yang ditugaskan untuk memberantasnya justru dilemahkan?

Ini menunjukkan kebobrokan sistem demokrasi yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum. Hukum diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk membuatnya. Akibatnya, hukum mengikuti keinginan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang harus tunduk kepada hukum yang benar.

Berarti tak cukup ganti rezim saja dong tetapi juga harus ganti sistem?

Ya, tidak cukup. Kalau cuma ganti rezim, itu hanya ganti orangnya. Orangnya memang berubah namun perilakunya tidak berbeda, tetap kondisinya tidak berubah. Tetap korup.

Dulu Orba dikritik habis karena KKN. Lalu diganti dengan beberapa presiden. Keadaannya tidak berubah. Bahkan banyak orang mengatakan korupsi di era reformasi lebih merajalela. Realitas ini menunjukkan, masalahnya bukan hanya orang, namun juga sistemnya.

Sistemnya harus diubah dengan sistem yang bisa mencegah dan memberantas korupsi. Bukan sistem yang memproduksi korupsi.

Apa sistem penggantinya?

Hanya satu, Islam dengan sistem pemerintahannya yakni khilafah.

Memangnya sistem khilafah tidak mendorong pejabatnya untuk korup?

Dari sisi orangnya, Islam

mensyaratkan orang yang menjadi khalifah wajib memiliki sifat adil. Adil itu lawannya fasik. Oleh karena itu, tidak sah orang yang fasik diangkat menjadi khalifah.

Sifat adil itu lahir dari keimanan yang kuat. Ketika dia meyakini kewajiban menaati hukum Allah SWT, maka motivasi menjadi pejabat didorong oleh motivasi ibadah. Mencari ridha Allah SWT. Bukan mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya.

Pada saat yang sama, sistemnya juga mencegah dan memberantas korupsi. Dalam khilafah, dasar pendidikannya adalah akidah Islam. Maka, semua pendidikan harus menciptakan pribadi yang memiliki keimanan yang kuat. Jika imannya kuat, akan tangguh menghadapi godaan harta sehingga tidak melakukan korupsi.

Dalam Islam, hak legislasi, yakni otoritas membuat hukum di tangan Allah SWT. Kekuasaan yang dalam sistem pemerintahan demokrasi dipegang legislatif ditiadakan dalam Islam. Ini juga berarti menghilangkan satu kekuasaan yang biasanya menjadi lahan subur bagi korupsi.

Di samping itu, tidak boleh ada yang mengotak-atik hukum agar sesuai dengan hawa nafsunya. Korupsi dalam hukumnya haram. Demikian juga suap dan semua harta yang diambil secara tidak sah, seperti hadiah kepada pejabat, dan lain-lain. Ketentuan hukum *syara'* itu tidak boleh diubah oleh siapa pun.

Dalam kekuasaan eksekutif, yang dipilih oleh rakyat hanya khalifah. Itupun tidak mengenal

periodisasinya. Selama tidak melanggar ketentuan *syara'*, maka dia tidak boleh diberhentikan. Sementara para kepala daerah diangkat khalifah. Tidak ada biaya politik yang dikeluarkan.

Tapi bila ternyata ada pejabat yang korup, bagaimana sistem khilafah mengatasinya?

Islam sangat tegas terhadap pelaku korupsi. Dari sisi harta yang dikorupsi, wajib disita. Sementara orangnya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Beratnya hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya. Jika korupsi sangat besar, negara dalam keadaan krisis dan sebagainya, pelakunya bisa dihukum mati.

Misal, selain khilafah, ada sistem yang efektif berantas korupsi. Apakah kaum Muslimin boleh pakai sistem itu atau harus tetap pakai khilafah?

Tidak boleh. Pemerintahan bukan hanya soal korupsi, namun perintah Allah SWT. Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan syariah-Nya secara kaffah. Pada saat yang sama dilarang untuk menerapkan hukum dan sistem selain-Nya. Yang bisa memenuhi kriteria itu hanya khilafah. Sistem pemerintahan yang ditetapkan Islam. Inilah satu-satunya pemerintahan yang boleh dan wajib ditegakkan. Bukan yang lain.[]



Mereka Bicara

Korupsi yang Menggurita



Said Didu,
Pegiat Media Sosial dan Mantan
Sesmen BUMN

Dikendalikan Cukong

Negara hanya butuh orang 30-an yang betul-betul mau melawan korupsi. Saya pernah praktikkan, saya hampir 6 tahun di Kementerian BUMN dan menyeleksi hampir 10 ribu orang.

Itu sederhana kok, tapi contohkan kepada diri Anda dulu, baru membersihkan. Bangsa ini kalau bersih di atas, pasti bersih ke bawah. Karena sebenarnya sangat sederhana membersihkan ini. Tapi begini yang pertama disingkirkan oleh pemerintahan yang korup pasti orang bersih.

Kenapa korupsi terjadi? Yang menentukan negeri ini adalah para cukong kekuasaan. Cukong kekuasaan itu-itulah saja orangnya. Penguasanya ganti-ganti, cukongnya tetap. Cukong itulah yang merampok setiap saat, dan kita tahu etnisnya sama. Itulah yang membiayai partai, parpol, pilpres, pilkada. Mau sampai kapan kita menyerahkan negeri ini pada cukong kekuasaan?

Selama rakyat masih mau disogok, maka Anda menyerahkan negeri ini pada cukong kekuasaan. Tunjukkan saat bupati atau walikota yang terpilih bukan karena cukong kekuasaan? Mungkin bisa dihitung jari. Daerah Kalimantan pasti yang menang adalah yang disponsori perusahaan tambang dan perkebunan, daerah-daerah kota itu pasti perusahaan *real estate*. Lalu kita mau berharap pada penegak hukum, nanti tambah sakit hati kita.

Jadi saya katakan eksekutif, yudikatif, legislatif itu adalah oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan sumbernya adalah para cukong kekuasaan. Cukong kekuasaan sudah membidik siapa jaksa yang mulai mendaftar terus naik-naik pangkatnya, di eksekutif juga begitu. Apalagi sekarang sistem lelang jabatan maka itu sudah gampang sekali.[]



Anton Tabah,
Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat

Semua Dilemahkan

Pasca dilantiknya Jokowi jadi presiden periode kedua ibarat lagi duduk di kursi langsung dikejutkan kasus-kasus mega korupsi yang melanda BUMN dari Jiwasraya yang konon riilnya mencapai 30-an triliun rupiah, Asabri 16 triliun rupiah dan lainnya. Ini melebihi kasus-kasus sebelumnya. Belum lagi sampai SBY yang buat kajian khusus. Dan semua menuduh kasus ini untuk kemenangan Jokowi yang dipaksakan dan lain sebagainya.

Harus dibongkar apa benar untuk memaksakan kecurangan dalam pemilu kemarin kalau lihat indikasi-indikasinya sangat banyak?

Di tengah kepemimpinan nasional yang ingkar janji ini, ternyata korupsi dan nepotisme dominan serta semakin terang-terangan. Korupsi jabatan di kabinet kedua pun parah, kepada timses-timses benar-benar bagi kue, juga ke parpol yang pro pemerintah. Pokoknya nepotisme juga makin parah. Lihat anak-anak dan mantu-mantu Jokowi ma'ruf Amin sudah bisa nyalon bupati dan nyalon walikota di beberapa kota.

Pada reformasi itu dulu ingin membasmi KKN. Dulu awal reformasi putra BJ Habibie, Ilham Habibi yang ahli pesawat jabatan di PTDI pun dicopot. Sekarang KKN malah *edan-edanan*.

Terlihat ada pelemahan sistem, pelemahan keadilan, pelemahan hukum, ubah UU pemilu. Jadilah pemilu terburuk NKRI, bahkan pelemahan media *mainstream*, semua bungkam hanya TVOne yang terus netral.[]



Slamet Maarif,
Ketua Umum PA 212

Kekuasaan Zalim, Licik dan Rakus

Berdasarkan catatan saya, bahwa kasus-kasus mega korupsi dan kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi-jadi dan menggila. Bahkan ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik.

Di antara kasus korupsi yang justru ditutup-tutupi dan melibatkan *inner circle*, baik sebagai pelaku maupun sebagai aktor yang berperan membangun skenario untuk menutup kasus agar tidak terbongkar di antaranya kasus Jiwasraya dan Asabri. Lalu kasus korupsi yang melibatkan komisioner KPU dan petinggi PDI Perjuangan.

Ini adalah sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zalim, licik dan rakus. Saya mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup, zalim dan penipu.

Saya juga mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang-halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku.

Pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa. Contoh, Ketua KPK menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan tupoksi KPK. Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.

Saya juga mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya *gate* dan Asabri *gate*, serta membongkar keterlibatan para pejabat di Kantor Sekretariat Presiden.

Dan terakhir mendesak agar para pejabat dan elite partai yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi tersebut untuk segera mundur dan berhenti tampil sebagai tokoh publik, karena Anda-Anda sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk terus berkuasa.

Hanya orang yang sudah tidak punya malu dan bermoral rendah serta cacat integritas yang masih bermuka badak untuk terus tampil menjadi pejabat publik maupun tokoh publik.[]



Ahmad Khozinudin,
Ketua LBH Pelita Umat

Ciri Khas Demokrasi

Kenapa korupsi itu terjadi? Karena negara ini bukan negara hukum, negara ini negara politik. Politik itu demokrasi yang transaksional, membutuhkan uang. Sehingga ketika sudah menjadi pejabat tentu dia akan mencari uang

pengembalian. Bukan hanya pengembalian tapi lengkap dengan benefit untuk tahun-tahun politik berikutnya. Korupsi bahkan menjadi ciri khas sistem politik demokrasi.

Dulu sebelum KPK dilemahkan saja sudah kesulitan untuk memproses tindak pidana korupsi khususnya yang menunjukkan kerugian keuangan negara. Sudah ada laporan kerusakan lingkungan yang disebabkan Freeport 185 triliun dari BPK—lembaga otoritatif, KPK tak bergerak.

Berulang kali presiden menyatakan tidak ada pelemahan KPK, ini dusta. *Pertama*, sekarang diberi kewenangan SP3 tapi sisi lain juga mundur. Kenapa dulu tidak diberi kewenangan SP3, agar penyidik lebih hati-hati dan jujur. Sehingga jika sudah tertangkap dugaannya kuat bisa sampai ke persidangan dan vonis.

Kedua, proses pembuktian pada kerugian negara itu sulit karena butuh proses yang panjang dan melelahkan, harus proses audit BPK. Masalahnya tafsir kerugian itu masih bisa dipatahkan oleh hakim. Makanya andalan KPK adalah OTT, itu harusnya diperkuat. Karena OTT diawali dengan penyadapan, sekarang dilemahkan dengan dewan pengawas. Karena kewenangan untuk menyadap dari dewan pengawas, sedangkan jika sudah ada informasi dikhawatirkan bocor.[]



Asy'ari Usman,
Pengamat Sosial Politik

Pemandulan KPK Langsung Punya 'Barang Bukti'

Pemerintah Jokowi di kabinet Indonesia Maju ditandai oleh jatuh tempo berbagai skandal korupsi. Begitu banyak skandal di jajaran BUMN. PT Asuransi Jiwasraya rugi belasan triliun. Asabri puluhan triliun. Jokowi melaksanakan Omnibus Law. Sekarang terbongkar bahwa Omnibus Law itu diduga pesanan para pengusaha. Itu yang memicu demo kaum buruh.

Jokowi ikut memandulkan KPK. Dia setuju pemberantasan korupsi dilemahkan. Buktinya? Jokowi membiarkan revisi UU tentang KPK. Revisi ini membuat misi tunggal KPK sebagai lembaga antikorupsi, hancur berantakan. Di bawah naungan Jokowi, seleksi pimpinan KPK berlangsung sesuai dengan skenario pelemahan lembaga ini. Semua orang berteriak agar Firli Bahuri jangan dipilih menjadi ketua KPK karena dia figur yang bermasalah. Tapi, Jokowi merestunya. Pemandulan KPK langsung punya 'barang bukti'. Kantor DPP PDIP tidak bisa digeledah oleh KPK. Partai Banteng menolak. Para petugas KPK disandera dan dipesan urin ketika mereka mau menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PTIK. Ini pelecehan telak terhadap KPK oleh PDIP. Penghinaan.

Soal korupsi sangat krusial. Kalau Jokowi meneruskan sikapnya yang melemahkan KPK, jangan harap reputasinya bisa membaik. Seluruh rakyat ingin korupsi diberantas. Sayangnya, Jokowi menunjukkan kesan bahwa dia tidak mendukung pemberantasan korupsi. Kita paham bahwa Jokowi menghadapi masalah besar di tengah parpol-parpol yang mendukungnya. Jokowi memerlukan dukungan politik dari mereka tetapi pada saat bersamaan, Jokowi tersandera oleh para pendukungnya terutama parpol yang banyak tersangkut kasus korupsi. [] **ghifary ramadhan**

Kepastian Hari Kebangkitan

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat (41) (Yaitu) pada hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari kubur) (42); Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan dan kepada Kami tempat kembali (semua makhluk) (43); (Yaitu) pada hari (ketika) bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami (44); (QS Qaf [50]: 41-44).

Dalam ayat sebelumnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbih dengan memuji Tuhan sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Diperintahkan juga untuk bertasbih kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat.

Hari Kiamat, pada hari malaikat penyeru menyerukan dari tempat yang tidak jauh."

Kata *Wa[i]s'tami'* termasuk kata kerja yang memerlukan *maf'ûl* (objek). Namun dalam ayat ini *maf'ûl*-nya tidak disebutkan. Diperkirakan, kata yang dihilangkan itu adalah *al-nidâ' wa al-shawt wa al-shaiḥah* (seruan, suara, atau teriakan). Sehingga, perkiraan ka-

malaikat Jibril. Sebagian lain berpendapat bahwa itu adalah malaikat Israfil yang berseru, "Wahai tulang-belulang yang rapuh, persendian-persendian yang terputus, daging-daging yang tercabik, dan rambut yang rontok terpisah-pisah. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian supaya bersatu kembali untuk persidangan."

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan-Nya adalah Allah SWT. Alasannya adalah kelanjutan ayat ini: *min makân qarib* (dari tempat yang dekat). Ini mengisyaratkan bahwa seruan itu didengar oleh setiap orang secara sama dalam pendengarannya. Berdasarkan itu, tidak terlalu jauh jika dikatakan bahwa *al-munâdi* di sini maksudnya adalah Allah SWT. Sebab, yang dimaksud dengan *min makân qarib* (dari tempat yang dekat) bukanlah tempat itu sendiri. Namun jelasnya seruan tersebut, bahwa itu berasal dari Allah SWT merupakan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini sebagaimana diberitakan dalam surat ini juga: *Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya* (QS Qaf [50]: 16). Ini bukan dari segi tempat.

Lalu ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah, "Dengarkanlah seruan orang-orang kafir yang menyerukan kehancuran dan kebinaasaan jarak yang sangat dekat" yakni semua orang mendengarnya karena seruan itu berjarak tidak jauh dari mereka.

Pasti terjadi

Kemudian Allah SWT berfirman: *Yawma yasma'ûna al-shayḥah bi al-ḥaqq* ([Yaitu] pada hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya). Ayat ini merupakan *badal muthâbiq* dari ayat sebelumnya (*pada hari (ketika) penyeru ([malaikat])*). Yang dimaksud *al-shayḥah bi al-ḥaqq* adalah tiupan sangkakala yang benar-benar terjadi yang dahulunya mereka meragukan keberadaannya.

Lalu dilanjutkan dalam firman-Nya: *Dzâlika yawm al-khulûd* (itulah hari keluar [dari kubur]). Maksudnya, pada hari keluarnya mereka dari kuburnya masing-masing.

Kemudian Allah SWT berfir-

man: *Innâ Nahnu Nuhyî wa Numîtu* (sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan dan kepada Kami tempat kembali [semua makhluk]). Yaitu, Allah menghidupkan yang telah mati dan mematikan yang hidup. Dan hanya kepada-Nya lah seluruh makhluk akan kembali. Dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir, Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya kembali sebagaimana penciptaan pada permulaan. Tentulah itu lebih mudah bagi-Nya.

Firman-Nya: *Wa ilaynâ al-mashîr* (dan kepada Kami tempat kembali). Artinya, dan hanya kepada-Nya kembali semua makhluk, lalu Dia akan membalas tiap-tiap makhluk sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik; dan jika amal perbuatan buruk, maka balasannya buruk pula.

Kemudian Allah SWT berfirman: *Yawma tasyaqqqa al-ardh 'anhum sirâ'a[n]* ([yaitu] pada hari [ketika] bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat). Diterangkan Ibnu Katsir, hal itu terjadi setelah Allah SWT menurunkan hujan dari langit yang karenanya semua tubuh makhluk bangun dari kuburnya masing-masing seperti tumbuhnya biji dari dalam tanah karena disirami air. Ketika semua jasad telah sempurna, maka Allah SWT memerintahkan kepada Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, lalu ia meniup sangkakala. Pada saat itu, semua ruh tersimpan pada tiap-tiap lubang yang ada di dalamnya.

Manakala Malaikat Israfil meniup sangkakala itu, maka keluarlah semua ruh yang berhamburan di antara langit dan bumi, lalu Allah SWT berfirman: "Demi Keagungan dan Kemuliaan-Ku, setiap ruh benar-benar harus kembali ke tubuh yang pernah dihuninya." Maka kembalilah setiap ruh kepada tubuhnya masing-masing dan merasuk ke dalamnya seperti halnya racun yang menyebar pada tubuh manusia yang dipatuknya. Bumi pun terbelah mengeluarkan mereka, lalu mereka bangkit menuju tempat hisab dengan cepat dan bersegera menghadap kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman: *Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata. "Ini adalah hari yang berat* (TQS al-Qamar [54]: 8)

IKHTISAR:

1. Seluruh manusia akan dihidupkan dan dibawa ke tempat hisab untuk dihisab amalnya.
2. Menghidupkan dan mematikan sangat mudah bagi Allah.

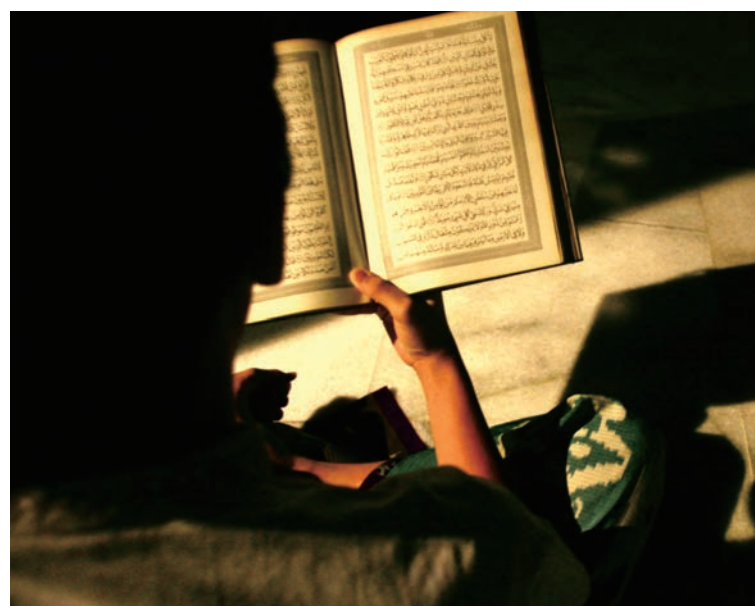
Disebutkan juga dalam firman Allah SWT: *Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja* (TQS al-Isra [17]: 52).

Di dalam hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW pernah bersabda: *Aku adalah pemimpin anak Adam, orang yang pertama kali keluar dari perut bumi (dibangkitkan) dan orang yang pertama kali memberi syafaat dan mendapat izin untuk memberikannya* (HR Abu Dawud).

Kemudian Allah SWT berfirman: *Dzâlika hasyr[un] 'alaynâ yasîr* (yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami). Ayat ini mengabarkan bahwa menghimpunkan semua makhluk itu setelah menghidupkan mereka kembali amat mudah bagi Kami. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: *Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata* (TQS al-Qamar [54]: 50).

Dalam ayat ini *al-zharf* didahulukan: *'alaynâ (bagi Kami)* berguna *li al-ikhtishâsh* (pengkhususan). Sebab, menghidupkan setelah kematian dan mengumpulkan untuk ditunjukkan amalnya dan dihisab tidaklah mudah kecuali oleh Zat Yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa; yang tidak disibukkan oleh sebuah urusan dengan meninggalkan urusan lainnya, sebagaimana firman-Nya: *Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat* (QS Luqman [31]: 28).

Demikianlah, Hari Kiamat pasti akan terjadi. Semua manusia pasti dibangkitkan kembali setelah kematian. Ini merupakan keimanan yang sangat penting. Siapa pun yang mengingkarinya, tergolong kafir. *WaL-lâh a'lam bi al-shawâb.* []



Ayat ini kembali mengingatkan tentang peristiwa di akhirat yang akan dialami seluruh manusia.

Seruan Penghidupan

Allah SWT berfirman: *Wa[i]s'tami' yawma yunâdi al-munâdi min makân qarib* (dan dengarkanlah [seruan] pada hari (ketika) penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat). Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, *khithâb* atau seruan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Sementara hari ketika ada penyeru yang menyeru adalah Hari Kiamat. Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman, "Wahai Muhammad, dengarkanlah seruan

limat lengkapnya adalah, "Dengarkanlah seruan, suara, atau tiupan. Yakni, tiupan pada Hari Kiamat. Itulah tiupan pertama."

Menurut al-Zamakhshari, ayat ini bermakna, "Dengarkanlah apa yang telah dikabarkan kepadamu tentangnya pada Hari Kiamat." Di sini terdapat acaman menakutkan dan mengagungkan urusan yang diberitakan dan dibiarkan.

Kemungkinan lainnya: "Dengarkanlah seruan penyeru."

Dalam ayat ini disebutkan kata *al-munâdi* (penyeru). Disebutkan secara jelas siapa yang menyeru. Ada yang mengatakan bahwa yang dengannya adalah

Diskusi Media Umat: Cara Islam Memangkas Korupsi!

Maka sebenarnya ketika Islam diterapkan, insya Allah, korupsi bisa dikurangi bahkan dimusnahkan sama sekali.

Di tengah maraknya korupsi yang semakin menggurita di negara demokrasi, Ustadz Rokhmat S Labib mengulas tata cara Islam memangkas perbuatan nista tersebut.

"Dalam Islam ada sistem yang mencegah orang untuk melakukan korupsi," bernya dalam *Diskusi Media Umat: di Balik Gurita Korupsi Negara Demokrasi*, Kamis, (30/1) di Aula DHN Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Secara pribadi, orang dibangun akidahnya. "Agar dengan akidah itu dia meyakini setiap tindakan dirinya termasuk korupsi itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan pada saat yang sama sistemnya itu ada (ditegakkannya sistem pemerintahan Islam/khilafah),"ujarnya.

Menurutnya, sistem tersebut mencegah terjadinya korupsi. Sedangkan demokrasi justru mendorong para pejabat untuk korupsi.

"Dalam demokrasi, pemilu itu mulai dari presiden, gubernur, bupati sampai kades. Semua butuh uang. Semua itu mengharuskan orang untuk korupsi. DPR tidak jauh berbeda. Hukum dibuat oleh DPR, berarti sebenarnya Indonesia bukan negara hukum tetapi negara politik. Tetapi jangan salah para politisi ini bisa duduk di DPR maupun jadi pejabat karena dibiayai oleh para cukong atau pemodal. Jadi hakikatnya demokrasi itu adalah negara kapita-

lisme. Para kapitalis inilah yang sejatinya mengatur negara,"ungkapnya.

Pembuat Hukum Dipangkas

Dalam Islam, lanjut Labib, aspek-aspek seperti ini dipangkas semua. Yang pertama kali dipangkas oleh Islam adalah pembuatan hukum. Jadi tidak ada manusia pembuat hukum. Karena kalau manusia membuat hukum bisa diutak-atik. Suatu yang tadinya kejahatan bisa dikatakan bukan kejahatan, ya tinggal dilegalkan saja oleh DPR. Mereka yang membuat aturan, ja-di terserah mereka.

Contoh misalnya pembuktian terbalik. Dalam sistem khilafah pembuktian terbalik adalah cara yang efektif untuk menjerat pejabat korup. Salah satu kisah yang populer terkait pembuktian terbalik adalah ketika Khalifah Umar bin Khatthab melakukan pembuktian terbalik kepada para gubernur.

Pembuktian terbalik itu sebenarnya sederhana. Kalau ada bupati, gubernur bahkan presiden, sebelum menjabat melaporkan kekayaannya sekian. "Misal, kekayaannya saya 10 miliar. Setelah menjabat lima tahun laporan lagi. Kekayaan saya bertambah sekian miliar."

"Ya, tinggal dihitung saja tingkat kewajarannya. Dia dapat gaji berapa dan seterusnya. Kalau kelebihanannya dia tidak bisa menunjukkannya dapat dari mana se-

cara legal, maka itu disebut korupsi. Itu kan sederhana."

Tapi pasal pembuktian terbalik dalam RUU Tipikor tersebut ketika beberapa tahun lalu diusulkan, langsung ditolak DPR. Mengapa? Karena kalau itu disahkan berarti akan menangkap dirinya sendiri, akan menjerat dirinya sendiri. Mana mungkin mereka membuat hukum yang akan menjerat dirinya sendiri. Maka dibuatlah hukum, meskipun bernama pemberantasan korupsi, yang sifatnya hanyalah pinggiran-pinggiran saja. Jadi tidak menyentuh substansinya.

"Ini menunjukkan bahwa yang bermasalah adalah sistemnya tadi!" tegasnya di hadapan sekira 250 peserta yang hadir.

Kalau dalam Islam, hukum dari Allah SWT. Tidak boleh diutak-atik. Wajib tunduk, taat. Dan ketaatan itu berhubungan dengan akhirat. "Kalau sudah berhubungan dengan akhirat itu insya Allah taat," ungkapnya.

Hemat Biaya

Yang kedua, soal pemilu. Dalam Islam juga ada pemilu. Tapi pemilunya cukup sekali. Pemilu memilih seorang khalifah saja. Sedangkan jabatan gubernur, wali kota dan lainnya ditunjuk khalifah. Sehingga hanya butuh biaya untuk pemilu khalifah saja.

"Dan itu tidak menghabiskan dana be-



sar. Karena pemilihan khalifah itu waktunya cuma tiga hari setelah khalifah sebelumnya wafat atau berhenti dan seterusnya. Jadi kalau ada waktu kampanye, cuma tiga hari,"kata Labib.

Khalifah tak dibatasi masa jabatannya. Tapi tidak diktator. Menurutnya, diktator itu ditentukan oleh sistemnya, hukumnya itu. Khalifah pun walau dia kepala negara, dia tidak boleh melanggar syariah. Maka tidak akan terjadi diktatorisme. Karena diktator itu ada di kewenangan membuat hukum tadi, sedangkan khalifah tidak mempunyai kewenangan membuat hukum.

"Maka sebenarnya ketika Islam diterapkan, insya Allah, korupsi bisa dikurangi bahkan dimusnahkan sama sekali," pungkasnya.

Dalam acara tersebut hadir pula pembicara lainnya yakni mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu dan Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin. **abintoro/joy**

100 Hari Rezim Jokowi Pengamat: Kondisi Bangsa Memburuk

"Mohon maaf saja, kapabilitas dan kapasitas Jokowi masih saja menjadi problem."

Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah berumur 100 hari. Bagaimana kinerjanya? Kok seperti belum ada gebrakan yang berarti. Mantan wartawan BBC London Asyari Usman menilai, ada perubahan yang terjadi di periode kedua 100 hari, yaitu perubahan menuju ke arah keadaan yang lebih buruk.

"Jika ditanya apakah ada perubahan? Ada. Perubahan menuju keadaan yang lebih buruk," ucapnya di Jakarta, Ahad (2/2).

Menurutnya, itu ditandai dengan utang makin besar. Harga-harga naik. Termasuk iuran BPJS Kesehatan, harga gas, dan kenaikan-kenaikan lainnya.

"Apakah bisa ini disebut prestasi 100 hari? Malah perekonomian sekarang semakin sulit," ujar Asyari Usman.

Asyari melihat usia 100 hari kabinet Indonesia Maju ditandai oleh jatuh tempo berbagai skandal korupsi. Begitu banyak skandal di jajaran BUMN. PT Asuransi Jiwasraya rugi belasan triliun. Asabri puluhan triliun. Jokowi melaksanakan Omnibus Law. Sekarang terbongkar bahwa Omnibus Law itu diduga pesanan para pengusaha. Itu yang memicu demokaus buruh.

Belum lagi, lanjutnya, penegakan hukum sela-ma 100 hari ini juga bermasalah besar. Jokowi ikut meman-dulkan KPK dan setuju pemberantasan korupsi dilemahkan. Bukti? Jokowi membiarkan revisi UU tentang KPK. Revisi

ini membuat misi tunggal KPK sebagai lembaga antikorupsi hancur berantakan.

Di bawah naungan Jokowi, seleksi pimpinan KPK berlangsung sesuai dengan skenario pelemahan lembaga ini. Semua orang berteriak agar Firli Bahuri jangan dipilih menjadi ketua KPK karena dia figur yang bermasalah. Tapi, Jokowi merestunya. Pemandulan KPK langsung punya 'barang bukti'. Kantor DPP PDIP tidak bisa digelegah oleh KPK. Partai Banteng menolak. Para petugas KPK disandera dan dities urin ketika mereka mau menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PTIK.

"Ini pelecehan telak terhadap KPK oleh PDIP. Ini penghinaan," ungkapnya.

Satu lagi, upaya pemberantasan narkoba hampir tak dibicarakan dalam 100 hari ini. Padahal, penyelundupan, pengedaran dan penggunaan narkoba semakin meningkat. Tidak banyak orang yang memberikan perhatian. Asyari lalu menguraikan fakta-fakta kerusakan tersebut.

Pertama, karena Jokowi terlalu banyak menghabiskan sumber daya pemerintah untuk membangun infrastruktur. Terlalu banyak uang yang dikeluarkan di sini. Sedangkan manfaat langsung untuk rakyat terbesar, tidak terlalu banyak untuk tidak mengatakan tidak ada. "Coba saja hitung siapa-siapa saja yang memerlukan jalan tol atau kereta api luks," katanya.

Kedua, Jokowi tidak tahu atau tidak paham kesulitan

rakyat. Dia tak memahami kerusakan di segala bidang kehidupan.

Ketiga, karena Jokowi tidak bisa bergerak bebas. Semua pihak yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun kekuasaan finansial, menggunakan pengaruh mereka untuk kepentingan masing-masing. Ini menyebabkan proses penentuan prioritas menjadi terganggu.

Banyak aspek fundamental dari rekrutmen politik. Periode pertama Jokowi hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Yang menjadi masalah, penekanan pada infrastruktur secara berlebihan merugikan bidang-bidang lain. Indonesia mengalami defisit pembangunan sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak. Rakyat perlu pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis yang berkelas.

Selain itu, kata Asyari, Jokowi menghadapi masalah besar di tengah parpol-parpol yang mendukungnya. Dia memerlukan dukungan politik dari mereka tetapi pada saat bersamaan, Jokowi tersandera oleh para pendukungnya terutama parpol yang banyak tersangkut kasus korupsi.

"Pemerintah Jokowi telah membuang waktu selama 100 hari ini. Banyak keputusan penting untuk kemaslahatan rakyat yang tidak bisa diambil atau dilaksanakan, dan Mohon maaf saja, kapabilitas dan kapasitas Jokowi masih saja menjadi problem. Dan akan menjadi ganjalan terus selama lima tahun mendatang," pungkasnya. **ghifari**

Fenomena Kerajaan Palsu Alihkan Persoalan Bangsa

Banyak orang yang mengalami halusinasi sehingga mengklaim mempunyai kerajaan dan kekuasaan seperti itu.

Awal tahun 2020 rakyat Indonesia dihebohkan dengan kerajaan-kerajaan palsu yang bermunculan. Dimulai dari Keraton Agung Sejagat, lalu Sunda Empire, dan King of The King dan lainnya. Masing-masing mempunyai klaim menguasai dunia. Hingga berita ini dimuat, sudah ada tiga kerajaan yang pemimpinnya ditangkap oleh aparat kepolisian.

Menanggapi hal ini, pengamat sosial dan politik Iwan Januar menilai munculnya fenomena kerajaan palsu ini berbahaya. Pasalnya, kasus ini bisa mengalihkan masalah negeri yang sebenarnya dan sangat penting untuk diselesaikan dengan serius.

"Ini tidak produktif karena mengacaukan perhatian publik dari berbagai persoalan bangsa yang lebih *urgent* semisal utang luar negeri, korupsi Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan lain-lain," jelasnya kepada *Media Umat*.

Iwan menilai, kasus ini juga berbahaya karena bisa memengaruhi sebagian orang awam dan menipu mereka. "Bahayanya ini bisa menipu sebagian warga yang awam, mudah terpesona dengan pemberitaan, lalu dimanfaatkan dengan cara uang mereka dikeruk," katanya.

Iwan juga mengomentari penanganan masalah bermunculannya kerajaan fiktif ini karena memang pada awalnya belum



ada hukum yang bisa memperkarakan mereka. Tidak ada pihak yang dirugikan hingga akhirnya ada yang meraih keuntungan dengan menipu masyarakat.

"Lamban karena bisa jadi belum masuk kategori pelanggaran hukum. Tidak ada pihak yang dirugikan. Sampai nanti terbukti mereka memanfaatkan popularitas untuk penipuan, dan sebagainya," jelas Iwan.

Melihat banyaknya fenomena sejenis bermunculan di Indonesia, Iwan melihat ada beberapa kemungkinan. Menurutnya, banyak orang yang mengalami halusinasi sehingga mengklaim mempunyai kerajaan dan kekuasaan seperti itu.

"Atau, mereka orang yang mencari sensasi, ingin terkenal dengan cara pansos, panjat sosial," ungkap Iwan.

Iwan juga menambahkan bisa jadi fenomena tersebut sengaja direkayasa

untuk mengalihkan persoalan-persoalan yang semakin parah di Indonesia. Pasalnya fenomena ini seperti kompak muncul.

"Bisa jadi ada rekayasa untuk menimbulkan kehebohan untuk meng-cover berbagai masalah bangsa yang sedang terpuruk. Jadi, semacam pengalih perhatian," ungkapnya.

Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Sunyoto Usman menilai, fenomena munculnya kerajaan-kerajaan yang didirikan sejumlah orang akhir-akhir ini dapat dilihat dari beberapa dimensi.

Dari sisi pengikutnya, ungkapnya, mereka datang dari lapisan masyarakat yang kurang paham betul tentang latar belakang sejarah.

"Mereka sebetulnya itu kurang paham betul tentang latar belakang sejarah sehingga dapat informasi dari elitnya atau

tokohnya itu dianggap sebagai kebenaran, jadi persoalan informasi," katanya.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati menilai, ada dua hal yang harus dilihat di balik maraknya fenomena ini, yaitu motif dan tren meningkatnya ketidakpercayaan publik. Menurutnya, kemunculan Keraton Agung Sejagat memiliki motif yang berbeda dibandingkan dengan tiga kerajaan fiktif lainnya.

Kerajaan Agung Sejagat memiliki motif ekonomi sama seperti investasi bodong MeMiles guna menggalang dana ilegal dari masyarakat. "Ini yang berbahaya. Apalagi bila ini pidana, (ada unsur) kebohongan, ini tentu berbahaya. Ini sama saja dengan kasus MeMiles yang memang kriminal," kata Devie. **fs**

"Rezim sekarang ini yang tidak mampu hadir melindungi rumah-rumah ibadah, dan menjamin keamanan penganut agama yang akan beribadah."

Mushala di Minahasa Dirusak Negara Tak Sensitif



Sebuah mushala di Perum Agape Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dirusak oleh segerombolan orang yang diduga sebagai Laskar Manguni, Rabu (29/1). Tidak ada korban dalam penyerangan itu, namun beberapa kaca jendela pecah.

Video serangan ke Mushala Al Hidayah itu menyebar di media sosial. Masyarakat Muslim pun terpenggil ke wilayah tersebut dan berusaha mencari gerombolan perusak mushala. Berbagai kecaman pun muncul atas tindakan intoleran dan brutal itu.

Direktur Pamong Institute Wahyudi Al

Maroki mengecam keras tindakan barbar itu. "Saya mengutuk keras tindakan barbar seperti itu dan saya prihatin penguasa tidak bertindak cepat. Rezim sekarang ini yang tidak mampu hadir melindungi rumah-rumah ibadah, dan menjamin keamanan penganut agama yang akan beribadah," ujarnya, Senin (3/2) di Jakarta.

Menurutnya, tindakan para perusak itu tergolong intoleran. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama belum harmonis. Mereka yang suka menuding Muslim dengan tuduhan intoleransi ternyata justru mereka sendiri yang intoleran.

"Ini sekali lagi membuka mata masyarakat Indonesia bahwa terjadi intoleransi

justu terjadi di daerah-daerah yang minoritas Muslimnya dan orang-orang kafirnya mayoritas," jelasnya.

Kejadian ini berdampak pada kerugian material dan secara psikologis kaum Muslimin terintimidasi dan terancam kehidupannya dalam kebebasan menjalankan agamanya. Menurutnya, kalau dibiarkan maka kelompok-kelompok intoleran semakin berani dan sesuka-sukanya melakukan tindakan barbar.

Pandangan Islam

Menurutnya, Islam telah mengajarkan toleransi. Islam bisa hidup dengan pemeluk agama lain karena ajaran Islam mengatur hal itu. Dalam Islam pun diajarkan untuk tidak merusak rumah ibadah agama lain.

"Umat Islam tentu sangat toleran, cinta damai, dan ingin hidup berdampingan dengan agama lain. Ini dicatat dalam sejarah kehidupan ketika mayoritasnya Muslim atau ketika hidup di dalam pemerintahan Islam atau dalam sistem khilafah maupun dalam kehidupan nabi di zaman negara Madinah," jelas Wahyudi.

Bahkan, dalam pandangan Islam, siapa pun yang merusak rumah ibadah, itu termasuk kejahatan yang luar biasa dan harus dihukum keras. "Bisa kena ta'zir hukuman mati, kalau memang sangat merugikan masyarakat. Ini termasuk tindakan kejahatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat dan dampaknya besar terhadap kehidupan masyarakat yang lain," ungkapnya.

Menurutnya, inilah bedanya pemerintahan Islam dengan pemerintahan sekuler seperti sekarang. Sistem khilafah terbukti dalam catatan sejarah begitu melindungi seluruh warganya, dan sistem sekuler sekarang hanya pencitraan yang menunjukkan kalau mereka toleran tapi faktanya intoleran.

Ia pun mengecam pernyataan Menteri Agama Fachru Razi yang seolah mengecilkan permasalahan perusakan mushala itu. Menurutnya, pemerintah tidak sensitif dan tidak mampu melindungi warga negaranya serta tidak mampu menjamin kebebasan beragama. **ghifari**

"Jadi faktor yang menyebabkan kejahatan seksual itu muncul karena memang sistem hari ini terlalu banyak membanjiri umat ini dengan hal-hal yang membangkitkan naluri seksual."

Kejahatan Seksual Marak Akibat Sistem yang Rusak



Akhir-akhir ini muncul berbagai kejahatan seksual di area publik. Ada begal payudara, begal bokong, hingga masturbasi di depan umum. Video aksi pelecehan seksual itu viral di media sosial dalam dua pekan terakhir.

Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rochmah mengaku sangat prihatin atas kejadian itu. "Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kita semua dan semestinya memang kita mencari akar persoalannya, dan negara

harus bertanggung jawab akan hal ini," ujarnya di Jakarta, Senin (2/1).

Apa yang dilakukan negara dan kelompok masyarakat selama ini, menurutnya, ternyata tidak cukup efektif untuk mengatasi kejahatan seksual itu. Ini bisa dilihat dari angka kejahatan itu yang cenderung meningkat, bukan menurun.

Ia berpendapat, kejahatan seksual atau *jarimah al jinsiyah* itu muncul karena adanya naluri seksual yang meluap-luap tidak terkendali, sampai kemudian terjadi

kejahatan itu. Mengapa? Sebab, sistem sekuler kapitalis memang menempatkan dorongan seksual menjadi sesuatu yang menguntungkan kemudian dieksploitasi. Banyaknya film-film porno, cerita, dan hal-hal yang membangkitkan naluri seksual lahir dari sistem sekuler ini.

Di sisi lain, kata Iffah, banyak wanita yang tidak menutup aurat. "Jadi faktor yang menyebabkan kejahatan seksual itu muncul karena memang sistem hari ini terlalu banyak membanjiri umat ini dengan hal-hal yang membangkitkan naluri seksual," jelasnya.

Solusinya, menurut Iffah, dengan membangun sistem Islam. Sistem ini mampu melepaskan manusia dari kejahatan dan kriminalitas, termasuk kriminalitas seksual. Bagaimana caranya? Islam menetapkan dengan jelas batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh, yang ini berlaku untuk semua orang di semua kondisi.

Ia menjelaskan, nilai-nilai Islam menetapkan dengan sangat jelas bagaimana batasan memakai pakaian yang pantas kepada orang asing, yakni yang menutup aurat maka tidak akan ada perbedaan soal kepantasan berpakaian bagi seorang perempuan. Tidak ada perbedaan terhadap apa yang dimaknai sebagai pakaian yang sopan.

Islam juga mengatur perilaku yang layak antar laki-laki dan perempuan.

Bahwa mereka tidak boleh saling memandang kecuali seperlunya yang dibolehkan syariat ada perintah untuk menundukkan pandangan, tidak boleh memandang dengan syahwat dan seterusnya.

Lebih lanjut, kata Iffah, Islam melarang mengambil untung dalam bentuk apapun dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Misalnya mengambil untung dari bangkitnya naluri seksual dengan memproduksi video porno atau tayangan yang memancing naluri seksual, kemudian digemari oleh masyarakat sehingga produsennya mendapatkan untung.

Media pun dilarang memaparkan misalnya gambar-gambar porno karena disukai oleh masyarakat dan mereka mendapatkan keuntungan dari sana. Islam juga ada sistem saling menasihati atau amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat, karena dalam Islam juga disadari manusia itu bukan robot yang selalu dapat terikat pada aturan. Manusia adalah tempatnya salah, maka saling amar makruf nahi mungkar apalagi pada keluarga, maka ini dapat juga mencegah terjadinya kejahatan seksual sedini mungkin.

Yang terakhir, di dalam Islam juga ada sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Pelaku yang melakukan akan dihukum sesuai dengan tindak kejahatannya. **[ghifari]**

MAJELIS BENGKEL PENGUSAHA

Negara Korporasi, Mau?

Kopi pahit yang sedang nikmat diseduh tiba-tiba keluar dengan tak beraturan alias rada 'muncrat'. Kenapa? Tetiba Abah ditanya. Negara korporasi? Apa itu Abah? Masyaallah pagi yang sejuk dan damai berubah jadi penuh krikuk di kepala. Hehehe.

Baiklah. Kalau negara mengurus hajat hidup rakyatnya, itu memang sudah semestinya. Pakai Islam lho! Kaffah lagi! Tapi kalau negara mengurus kepentingan bisnis pihak lain atau malah menjadi alat bisnis pihak lain atau malah menjadikan semua instrumen layanan menjadi berbayar seperti bisnis, ini jelas penyimpangan. Nah ini juga definisi paling sederhana praktek negara korporasi. Pastinya bukan pakai Islam, apalagi kaffah!

Karena sistem kenegaraan khas ini berasal dari kapitalisme yang dibuat oleh akal manusia yang terbatas dan sudah pasti bertentangan dengan aturan Allah SWT, maka semua hal tentangnya pastilah bersifat buruk dunia akhirat. Kalaulah ada yang dianggap baik, sudah pasti semu! Setiap masalah selesai, maka pasti akan muncul masalah baru! Pasti itu!

Dengan kasat mata, semua bisa merasakannya. Ruyam memang. Ini karena semua sendi kebijakan negara bertumpu pada bersenyawanya kepentingan pengusaha dan penguasa.

Dalam sistem seperti ini juga makin tumbuh subur praktek bisnis haram. Dari data lawas saja sudah cukup

untuk mengetahuinya. Siap? Ini dia. Minuman keras misalnya, perusahaan penghasil minuman keras PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mencatat omset pemasaran hingga Rp 1,7 triliun sepanjang 2011. Total konsumsi bir di negeri mayoritas Muslim ini telah mencapai 2 juta hektoliter per tahunnya pada 2011! (www.infobanknews.com/2012). Wow, ngeri. Di subsektor narkoba, tercatat nilai transaksi ekstasi mencapai Rp 9 triliun per tahun. Sabu nilainya terus meningkat, dan diprediksi mencapai Rp 25 triliun per tahun. Sementara, omset heroin di tanah air melambung hingga Rp 163 triliun tiap tahun (www.tribunnews.com/nasional/2013; www.balipost.co.id/2005)

Sama parahnya di dunia bisnis esek-esek. Seperti yang diwartakan dalam www.tempo.co/read/news/2008, Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) mengungkapkan jumlah uang sedunia yang beredar untuk belanja pornografi cukup besar yakni mencapai US\$3,075 juta per detik. Pendapatan dari pornografi di seluruh dunia di tahun 2006 mencapai US\$97,06 miliar. Masih banyak lagi bisnis haram lainnya yang sama-sama mengerikannya bagi peri kehidupan kita.

Ini semua pemandangan yang kontras dengan sistem Islam yang kaffah. Dalam Islam, semua bisnis haram tak akan ada. Mengapa? Karena Islam sama sekali tidak membolehkan berdirinya bisnis haram atas nama apapun!

Kalau sudah begini, abah jadi ingat sama Rutherford presiden AS di tahun 1876 yang membongkar karakter asli demokrasi sebagai 'from Company, by Company and for Company'. Kok demokrasi? Ya karena Rutherford sudah mengingatkan kita sejak 144 tahun yang lalu bahayanya demokrasi yang punya sifat asli condong dan selalu memfasilitasi bisnis, bukan mengurus rakyat! Jadi... demokrasi yang kita terus pertahankan setiap lima tahun sekali itu ternyata menjadi pengokoh praktek negara korporasi! Makjleb!

Kita yang terpelajar dan mau sedikit meleak berpikir harusnya paham bahwa demokrasi itu *democracy* antara penguasa hitam dengan pengusaha hitam! Sungguh tak layak menggunakannya dalam sistem kehidupan ini! Rasanya cukup sudah nestapa umat ini berlangsung.

Atas semua itu jelas sudah, satu-satunya posisi yang layak bagi Pengusaha Muslim hanyalah menjadi pengusaha pejuang bagi berlangsungnya Islam yang kaffah bukan menjadi bagian kelanggengan negara korporasi yang bertentangan dengan syariat, rusak dan dzalim.

Jadi, Pengusaha Muslim... Yuk berbenah, yuk serius. Umat menanti kita. Bisnis penuh berkah, Ngaji penuh energi dan Dakwah penuh manfaat bagi umat. Bismillah!

Barakallahu fikum...

@bah Salim. Bengkel Pengusaha

Jerat Maut Pinjaman *Online*

Karena menggunakan mekanisme bunga yang tinggi, dalam sekejap nasabahnya bisa terjerat utang yang mencekik bahkan sampai mati.

Pada Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sedikitnya 120 entitas yang melakukan kegiatan *financial technology* (*fintech*) dan pinjaman *online* (*pinjol*) ilegal.

"Berdasarkan hasil penelusuran kami, masih banyak kegiatan *fintech* ilegal dilakukan lewat website, aplikasi ataupun sms yang beredar," kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, Sabtu (1/2).

Sebelumnya, sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat terdapat 4.020 *fintech* ilegal yang diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, pada tahun 2019 OJK juga telah menghentikan sebanyak 1.494 perusahaan *fintech* yang ilegal.

Menurut dia, penawaran yang dilakukan oleh pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, maraknya pinjol karena besarnya potensi pasar untuk pin-

jaman di Indonesia. Ditambah lagi, tingkat literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Masyarakat pun diminta waspada agar tidak menjadi korban.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pelaku *fintech* ilegal bisa dengan membuat aplikasi yang baru. Jadi ketika satu *fintech* diblokir beberapa menit kemudian akan muncul *fintech* dengan nama baru. "Tapi deskripsi yang digunakan sama, karena mereka bisa tinggal *copy paste* dari aplikasi yang diblokir," kata Bhima (31/1).

Selain itu, Bhima menilai pencegahan *fintech* ilegal ini terkesan lambat karena sistemnya masih mengandalkan aduan dari masyarakat.

Mematikan

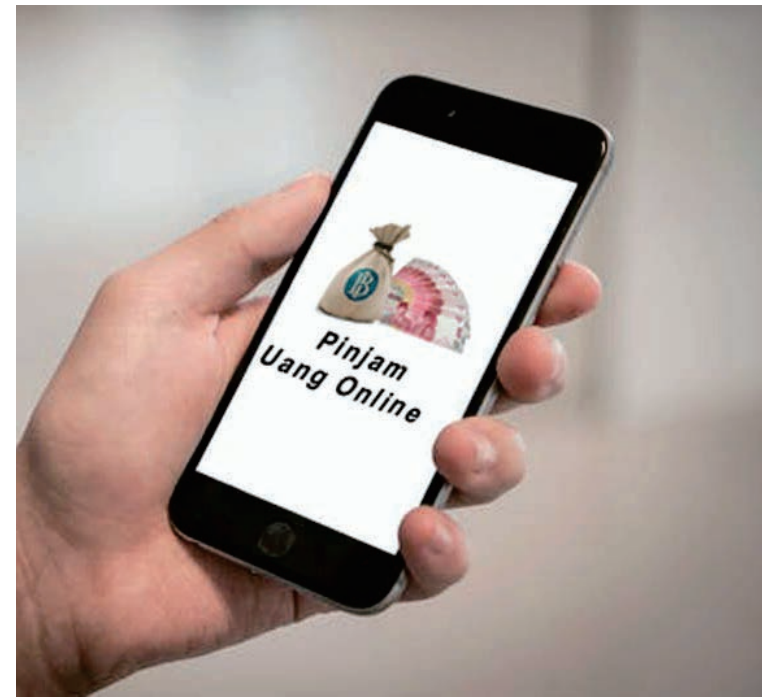
Maraknya pinjaman *online*, baik legal ataupun tidak, memberikan peluang bagi pihak yang kesulitan dana untuk memanfaatkan jasa tersebut. Celakanya, karena menggunakan mekanisme bunga yang tinggi, dalam sekejap nasabahnya bisa terjerat utang yang mencekik bahkan sampai

mati. Pada akhir November tahun lalu, seorang karyawan minimarket mengakhiri hidupnya lantaran terlilit pinjaman *online*. Tidak jauh dari jasad korban ditemukan surat yang berisi peringatan agar tidak melakukan pinjaman *online*.

"Kita temukan surat tulisan yang intinya berpisah kepada keluarga dan berpesan kepada siapa pun untuk tidak meminjam uang melalui *online* gitulah," kata petugas keamanan (26/11).

Peristiwa serupa juga terjadi awal tahun lalu. Seorang supir taksi bunuh diri lantaran tak kuat membayar utangnya yang nilai awalnya hanya Rp500 ribu. Di samping tubuh korban juga terdapat surat wasiat yang isinya meminta OJK untuk menghentikan praktik pinjaman *online*.

Keluhan masyarakat terhadap pinjaman *online* juga sangat besar. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019 dari total aduan yang diterima lembaga itu, terbanyak berasal dari sektor jasa keuangan yang jumlahnya mencapai 46,9 persen. Aduan terbesar adalah masalah perbankan dan pinjaman



online, belanja *online*/uang elektronik, leasing, dan asuransi.

"Banyaknya jumlah aduan di sektor ini menjadi indikator bahwa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum benar-benar hadir sebagai pelindung konsumen, pengawasan OJK masih lemah dan kurang efektif terhadap operator," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (14/1/2020).

Tak dapat dipungkiri, maraknya bisnis pinjol dengan bunga tinggi muncul karena masyarakat

memang tak lagi peduli halal-haram dalam bertransaksi. Sementara itu, pemerintah hanya melihat bisnis itu dari aspek legalitas belaka, tak peduli jika pinjaman berbunga, kecil ataupun besar, haram dalam kacamata Islam. Sebab, pemerintah memang tak mengenal istilah halal haram dalam mengatur rakyatnya. [] **mu**

MUAMALAH

Jasa Layanan Umum dalam Islam

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman



A da jasa yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat dan rakyat. Seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Meski untuk pendidikan, boleh saja ada masyarakat yang mendirikan lembaga pendidikan, dan mengangkat serta menggaji tenaga pendidiknya dengan dana dari mereka. Tetapi, hukum asal pendidikan ini merupakan kewajiban negara dan hak rakyat. Karena itu, negara berkewajiban menyediakan pendidikan gratis sejak SD hingga perguruan tinggi, dengan anggaran yang ditetapkan di APBN-Khilafah. Bersumber dari Baitul Mal kaum Muslim.

Begitu juga dengan kesehatan. Meski untuk kesehatan ini boleh juga ada masyarakat yang mendirikan klinik kesehatan, atau rumah sakit, serta mengangkat dan menggaji tenaga medisnya dengan dana dari mereka. Tetapi, hukum asal layanan kesehatan ini merupakan kewajiban negara dan hak rakyat. Karena itu, negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan gratis untuk berbagai level penyakit, dengan anggaran yang ditetapkan di APBN-Khilafah. Bersumber dari Baitul Mal kaum

Muslim.

Mengenai keamanan, keamanan adalah hak rakyat dan masyarakat, yang merupakan kewajiban negara. Negara wajib menjamin keamanan rakyatnya. Dalam hal ini, ditangani oleh kepolisian negara, jika tidak mampu, baru militer dilibatkan. Karena itu, tidak ada penyedia jasa layanan keamanan, seperti satpam, atau sekuriti, sebagaimana yang ada saat ini, kecuali untuk kebutuhan pribadi, atau lembaga pribadi, misalnya. Karena itu, gaji untuk layanan keamanan ini diambilkan dari Baitul Mal kaum Muslim. Diangkat, dan diberhentikan oleh negara, dengan anggaran dari APBN-Khilafah.

Begitu juga dengan hakim atau qadhi. Karena urusan peradilan ini merupakan kebutuhan umum masyarakat, maka jasa layanan qadhi atau hakim ini disediakan oleh negara. Tidak ada hakim atau qadhi non negara. Semua hakim dan qadhi diangkat, dan diberhentikan oleh negara. Mereka digaji oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat akan keadilan. Mengenai ketentuan gaji mereka telah dibahas di dalam banyak kitab, khususnya

menyangkut sistem peradilan dalam Islam, atau Negara Khilafah.

Layanan lain yang juga merupakan kewajiban negara kepada masyarakat adalah layanan publik, seperti pengelolaan administrasi kependudukan, izin mengemudi, dan sebagainya, adalah layanan publik. Masyarakat, dalam mendapatkan layanan ini, seharusnya tidak dikenakan biaya, karena semua biaya merupakan kewajiban negara. Kecuali, diperlukan untuk keperluan yang dikembalikan kepada masyarakat, tetapi jumlahnya sangat kecil. Misalnya, seperti Kartu Keluarga, KTP, SIM, dan sebagainya. Sekadar untuk mengganti biaya cetak. Karena seluruh gaji dan biaya pelayanan itu dibiayai oleh negara dengan menggunakan dana Baitul Mal.

Karena itu, seluruh layanan publik ini di zaman Nabi disediakan oleh negara. Seperti dokter, guru, pasukan keamanan, qadhi, dan pegawai yang mengurus layanan publik lainnya. Kebijakan ini dilanjutkan oleh para Khalifah setelahnya. Sampai kemudian ada Diwan, yang mengatur semua pembukuan dan administrasi dari layanan publik tersebut dengan baik dan rapi. Dengan begitu memudahkan pelaksanaannya di lapangan.

Karena itu, tidak semua jasa yang didapatkan oleh masyarakat harus dibayar oleh masyarakat, meski statusnya adalah akad *ijarah*. Karena akad *ijarah*nya bukan dilakukan antara para penyedia jasa itu dengan rakyat, tetapi dengan negara. Karena itu, negaralah yang membayar mereka. Bukan masyarakat, dan tidak akan dibebankan kepada masyarakat. *Wallahu 'alam.* []

Menkopolkam Mahfud MD mengharamkan umat Islam mencontoh sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Bukan kali pertama Mahfud berbicara menolak implementasi syariah Islam dalam bernegara. Mengapa tokoh yang dibanggakan sebuah Ormas ini terus bersuara menentang Islam? Bagaimana sistem Islam sebenarnya? Ikuti kupasan Fokus.

Mahfud Lagi, Blunder Lagi

Meneladani Rasulullah SAW adalah kewajiban kaum Muslimin. Menyelisihi sunnah beliau adalah dosa besar.

Khilafah Islam tampaknya masih menempati isu utama perbincangan di kalangan elite politik dan pemerintahan. Salah satu politisi dan pejabat negara yang getol melontarkan serangan terhadap isu negara Islam dan Khilafah Islamiyah adalah Profesor Mahfud MD.

Pada Diskusi Panel *Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia* di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta (25/1), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya.

Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah SWT. Menurutnya, umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, menurutnya, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad.

"Haram kalau kita mendirikan negara seperti Nabi, siapa Nabinya? *Nggak Ada*," kata Mahfud saat menjadi pembicara di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (25/1).

Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia ini menawarkan konsep negara islami, bukan negara Islam. Di dalam negara islami, yang ditekankan adalah nilai-nilai Islam dipraktikkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sementara bentuknya bermacam-macam; seperti Malaysia berbentuk kerajaan, dan Indonesia republik.

"Kita tak perlu negara Islam, tapi negara islami," katanya. Negara di dalam negara islami penduduknya taat hukum, sportif, tepat waktu, antikorupsi, dan sifat-sifat lainnya yang diajarkan ajaran Islam.

Entah apa argumentasinya, Mahfud lalu mengatakan, "New Zealand islami itu, Jepang islami," katanya lagi. "Keduanya, Malaysia dan Indonesia ingin membangun masyarakat islami, tapi bukan teokrasi Islam," jelas Mahfud.

Tidak makan waktu lama, pernyataan Mahfud direspon keras sejumlah kalangan. Di antaranya dari Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah. "Mahfud

MD sering sekali keseleo lidah," ujar Anton.

"Kini dia (Mahfud) haramkan ikuti cara Nabi SAW? Mestinya tak berkata sevilgar itu (mengharamkan ikuti Nabi SAW)," tegasnya. Anton menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi orang beriman. Hal itu termaktub dalam Alquran yang tidak boleh diingkari.

Atas alasan itu, ia mendesak Mahfud untuk lebih hati-hati dalam berbicara dan segera bertaubat atas kesalahan yang diperbuat. "Apalagi sampai mengharamkan perilaku Nabi untuk diikuti, maka dia harus segera bertaubat," pungkasnya.

Tokoh NU, Gus Luthfi, juga mengkritik pernyataan Mahfud. Menurutnya, statemen Mahfud MD ini justru mengungkap kekurangpahamannya terhadap syariat yang dibawa Rasulullah SAW.

Menurut Gus Luthfi, kewajiban meneladani Rasulullah sudah jelas sebagaimana termaktub dalam Alquran surat al-Ahzab: 21. "Dari sini, tegasnya, jelas sekali, bahwa, upaya mencontoh Kanjeng Nabi, tidak diharamkan, justru diperintahkan. Termasuk dalam meniru sistem pemerintahan," katanya.

"Bahwa sistem pemerintahan Rasulullah SAW sekarang masih belum tepat, atau tidak mungkin diterapkan dalam konstitusi negara kita, Indonesia, itu soal lain. Tetapi, mengharamkannya, jelas tidak boleh," tambahnya.

Gus Luthfi melanjutkan bahwa Mahfud tidak memiliki dasar ilmu syariat yang pas, jadi tidak bisa digo-longkan sebagai ahli fatwa agama. Jika dipaksakan, akan terjadi kesalahan fatal dalam berlogika, seperti munculnya fatwa haram tersebut, pungkasnya.

Pernyataan Gus Luthfi dan Anton Tabah memang tepat. Berulang kali Mahfud mencoba membelokkan paham Khilafah Islam namun selalu blunder dan malah menelanjangi ketidakpahamannya terhadap syariat Islam.

Dulu Mahfud pernah menyatakan kalau sistem pemerintahan Khilafah tidak punya bentuk baku. Namun seorang kiai muda asal Cirebon, Irkham Fahmi, dalam akun FB-nya membantah penjelasan Mahfud bahkan menantang berdialog.

Irkham menyatakan keheranannya dengan pernyataan Mahfud yang seperti tidak paham persoalan

khilafiyah dalam bidang fikih. Tata cara shalat saja terdapat banyak khilafiyah, tapi tetap wajib dilaksanakan. Lalu kenapa khilafiyah seputar hukum-hukum pemerintahan Islam justru jadi alasan untuk membatalkan kewajiban penerapan sistem khilafah?

Sedangkan dua orang pemikir Islam, Irvan Abu Naveed dan Yuana Ryan Trisna, meluncurkan buku *Konsep Baku Pemerintahan Islam*. Isi buku itu menohok pernyataan Mahfud soal tidak ada 'bentuk baku' sistem pemerintahan Islam. Dalam cuitan di akun *twitter*-nya, Mahfud sempat memuji buku itu.

Kali ini blunder Mahfud kelewat fatal dengan menyatakan haramnya mengikuti sistem pemerintahan Islam yang dibawa Nabi SAW. Padahal meneladani Rasulullah SAW adalah kewajiban kaum Muslimin. Menyelisihi sunnah beliau adalah dosa besar. Baik itu adalah urusan ibadah, akhlak, muamalah termasuk pemerintahan.

Para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah menyepakati banyak hadits yang menyatakan kewajiban mendirikan pemerintahan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwwah. Tidak pantas seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat mengingkari hadits-hadits yang telah jelas dan gamblang lagi shahih.

Imam as-Suyuthi berkata: *Barang siapa mengingkari keabsahan hadits-hadits Nabi, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang telah dimaklumi sebagai hujjah dalam masalah-masalah ushuul, maka ia telah kufur dan keluar dari lingkaran Islam*. (Lihat Miftâhul Jannah 3)

Tepatlah sabda Nabi SAW bahwa ketika banyak ulama diwafatkan Allah SWT, akan bermunculan orang-orang yang gegabah dalam memberi fatwa. "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hamba-Nya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka (orang-orang bodoh) itu berfatwa tanpa ilmu. mereka sesat dan menyesatkan." (HR Bukhari).

iwani/ls



Yuana Ryan Tresna,
Pengasuh Ma'had Darul Hadits Khadimus Sunnah Bandung

Pernyataan Mahfud MD Menyalahi Syariat

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan haram tiru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Alasannya, Nabi dibimbing langsung oleh Allah SWT. Sedangkan umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. Benarkah pendapatnya itu? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Pengasuh Ma'had Darul Hadits Khadimus Sunnah Bandung Ustaz Yuana Ryan Tresna. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Mahfud MD "haram tiru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW"?

Itu pernyataan yang tidak bernilai sama sekali, karena telah menyalahi syariat dan konsensus ulama. *Pertama*, syariat telah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai *uswah* (teladan) dalam semua hal, termasuk dalam hal mengelola negara.

Semua yang datang dari Nabi adalah wahyu. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Alquran karena sama-sama berasal dari wahyu. Allah SWT berfirman yang artinya, "Tidaklah yang dia (Muhammad) ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepada dirinya)." (TQS an-Najm [53]: 3-4).

Kedua, kewajiban untuk mengangkat khalifah yang menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah adalah telah jadi konsensus (ijmak) seluruh ulama. Jadi tidak ada pengingkaran di kalangan ulama mutaqaiddimin terkait kewajiban menerapkan sistem pemerintahan yang diwariskan Rasulullah yakni khilafah, kecuali mereka yang menyimpang dari ijmak.

Jadi dengan dua alasan tersebut, pernyataan Mahfud MD tidak memiliki bobot sama sekali.

Alasan Mahfud, "Nabi berhak dan boleh memerankan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus karena dibimbing langsung oleh Allah SWT. Sedangkan umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad." Bisa diterimakah cara penyimpulan hukum seperti itu? Mengapa?

Itu logika yang menyesatkan. Kesalahan logikanya dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, yang bersangkutan tidak paham bagaimana sistem pemerintahan Islam yang diterapkan oleh Rasulullah di Madinah. Beliau SAW sama sekali tidak menerapkan konsep trias

politika yang dijalankan oleh orang yang sama.

Trias politika merupakan ide kufur yang landasan filosofisnya adalah membangun keseimbangan bernegara agar tidak dominan dan menyimpang. Hal itu berbeda dengan yang Rasulullah jalankan. Rasulullah telah menggariskan mekanisme yang khas, kedaulatan membuat hukum ada di tangan syariat, dan pada saat yang sama posisi Rasulullah sebagai utusan Allah yang membawa risalah dan kepala negara.

Rasulullah menjalankan fungsi kepemimpinan yang mengurus rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Rasulullah juga membuat mekanisme yang jelas terkait dengan sanksi berbagai pelanggaran yang harus dihukum. Beliau juga memerankan fungsi kepala *qadhi* (hakim) yang mengangkat para *qadhi* untuk menjalankan fungsi tersebut.

Kedua, Mahfud MD telah keliru membangun asumsi. Dia berasumsi bahwa kekuasaan yang terpusat pada satu orang akan cenderung rusak dan menyimpang, *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Padahal itu tidak dikenal dalam konsep Islam.

Islam menempatkan kedaulatan ada di tangan hukum syariat. Dengan konsep kedaulatan syariat, maka siapa pun yang memimpin, akan dikontrol oleh mekanisme hukum (syariat). Bahkan pemimpin dalam sistem Islam bisa dimakzulkan jika melanggar syariat Islam.

Ketiga, Mahfud MD telah keliru dalam memaknai kewajiban meniru atau mengikuti Rasulullah. Kita diwajibkan mengikuti nabi secara persis, baik perbuatannya maupun maksud atau arah dari perbuatan tersebut.

Secara faktual-historis, hal itu telah dilakukan oleh para sahabat ra. Mulai dari Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib, semua menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana yang Rasul praktikkan. Bentuk, sistem, dan metode pengangkatannya sama, meski teknis pemilihan pemimpinnya dibolehkan berbeda.

Fakta ini dengan sendirinya membantah bahwa umat Muhammad

tidak boleh mengikuti sistem pemerintahannya Nabinya. Opini murahan ini telah dinafikan dengan fakta bahwa para sahabat justru mengikuti jejak Nabi SAW.

Mahfud menyatakan bahwa kerajaan seperti Malaysia itu islami. Tanggapan Anda bagaimana?

Istilah "Islami" perlu parameter yang jelas. Islami adalah sifat yang melekat sifat-sifat keislaman pada suatu hal tertentu. Jika dikatakan bahwa kerajaan Malaysia merupakan sistem pemerintahan Islam, jelas keliru.

Mengapa kerajaan tidak dapat dikatakan islami? Mohon jelaskan...

Membedakan mana pemerintahan Islam dan mana yang bukan, cukup dilihat dari empat pilar utama: (1) kedaulatan membuat hukum ada di tangan syariat Islam; (2) kekuasaan dalam mengangkat khalifah ada di tangan umat, bukan semua rakyat; (3) wajib ada satu orang khalifah/imam saja untuk umat Islam di dunia; (4) hanya khalifah/imam yang berhak mengadopsi salah satu hukum syariat dari berbagai pendapat islami hasil ijtihad para ulama.

Selain itu, Mahfud juga mengatakan republik seperti Indonesia itu islami. Tanggapan Anda bagaimana?

Bagaimana akan disebut Islami, sementara sistem republik menempatkan kedaulatan membuat hukum adalah kepada rakyat, termasuk para wakil rakyat, bahkan pengusaha? Ini jelas mengada-ada. Dasar negara Indonesia, harus jujur kita akui adalah sekularisme. Ini berbeda dengan sistem Islam.

Dia juga mengatakan "Kita tak perlu negara Islam, tapi negara islami. Negara di dalam negara islami penduduknya taat hukum, sportif, tepat waktu, antikorupsi, dan sifat-sifat lainnya yang diajarkan ajaran Islam." Tanggapan Anda?

Ini pernyataan yang kontradiktif. Jika mau menerima sesuatu yang islami, lantas mengapa menolak Islam? Jika mau menerima negara yang islami, lantas mengapa menolak negara Islam? Adapun

ketaatan pada hukum, sportifitas, tepat waktu, antikorupsi, dan sifat-sifat lainnya merupakan sifat bagi personal, baik rakyat maupun penyelenggara negara, bukan sifat bagi sebuah negara. Jadi ungkapan tersebut sangat manipulatif.

Dia juga mencontohkan Selandia Baru dan Jepang sebagai negara yang islami. Dalam khasanah Islam, bisa diterimakah pendapat seperti itu?

Ini berangkat dari parameter "islami" yang tidak jelas. Jika dilihat dari sistem dan konsep bernegara, Jepang dan Selandia Baru bukan sesuatu yang "islami". Namun jika yang dimaksud adalah prinsip keterbukaan, *clean and good governance* dan bebas korupsi, maka semua itu bukanlah esensi atau pokok dalam sebuah pemerintahan.

Sekali lagi ia menegaskan, "negara-negara Islam dengan bentuk negara berbeda-beda, tidak melanggar ajaran Islam. Pasalnya di dalam Alquran tidak menetapkan sama sekali bentuk negara yang harus dijalankan. Apa yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia sama-sama benarnya." Tanggapan Anda?

Ungkapan tersebut terdapat banyak *misleading information*. *Pertama*, Mahfud menyebut "negara Islam" pada negara yang berpenduduk Muslim pada hari ini. Jelas ini kekeliruan yang sangat fatal. Negara Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam, dan mengemban dakwah dan jihad ke luar negeri. Dan tidak ada satupun negara di dunia pada hari ini yang memenuhi kriteria sebagai negara islam.

Kedua, anggapan bahwa Alquran tidak menetapkan sama sekali bentuk negara yang harus dijalankan adalah *framing* jahat untuk menggiring opini bahwa Islam tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Padahal faktanya, hadits-hadits Nabi dengan jelas menerangkan terkait bentuk negara, sistem pemerintahan dan aparatatur pemerintahan bagi khilafah yang mengikuti metode kenabian.[]

Perang Hamra' Al-Asad

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Berita rencana pengejaran yang dilakukan Nabi *shalla-Llah 'alaihi wa Sallama* kepada kaum kafir Quraisy itu memang telah membuat nyali pasukan kaum kafir itu runtuh. Mereka marah, bercampur resah mendengar berita pengejaran itu. Namun, mereka akan terhina jika lari dari musuh.

Tetapi, tidak ada pilihan untuk selamat, kecuali segera kembali ke Makkah. Abu Sufyan mencari-cari cara untuk menyelamatkan muka Quraisy. Mungkin mereka bisa menghindari pasukan Muslimin melanjutkan pengejaran dan menghindarkan bentrokan lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, Abu Sufyan berpapasan dengan kafilah Abdul Qais yang pergi menuju Madinah. Dia bertanya, *"Maukah kalian mengirimkan suratku kepada Muhammad? Sekembalinya kalian ke Makkah, akan kupenuhi kendaraan kalian ini dengan kismis di Pasar Ukazh."* Mereka menjawab, *"Bolehlah."*

Abu Sufyan berpesan, *"Sampaikan kepada Muhammad, kami akan kembali untuk menghabisi dia dan sahabat-sahabatnya sampai ke akar-akarnya."* Kafilah itu akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya saat mereka akan menuju ke Hamra' al-Asad. Mereka menyampaikan pesan Abu Sufyan kepada baginda. Mereka berkata, *"Sesungguhnya, manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka." Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka mengambil keridhaan Allah. Dan Allah memiliki karunia yang besar.* [TQS Ali-'Imrân: 173-174].

Rasulullah berada di Hamra'ul Asad tiga hari lagi. Baginda tiba pada hari Ahad, dan kembali ke Madinah pada hari Rabu, 11 Syawwal 3 H. Sebelum kembali, mereka sempat menangkap Abu Izzah al-Jumahi, seorang tawanan Perang Badar yang beruntung dibebaskan tanpa tebusan, karena sangat melarat dan punya anak perempuan banyak. Dengan syarat, dia tidak boleh lagi membantu siapa pun memerangi baginda. Ternyata dia ingkar janji dan berkhianat. Dialah yang memprovokasi orang-orang kafir itu dengan syairnya untuk melawan Rasulullah. Dia juga ikut serta dalam Perang Uhud.

Ketika ditangkap, dia mengiba-iba, *"Bebaskan aku. Kasihanilah aku. Lepaskanlah aku demi anak-anak perempuanku. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku."* Rasulullah menjawab, *"Dua kali pembangkanganmu di Makkah tidak mungkin*

terhapus, dan setelah itu Engkau akan berkata, "Aku telah menipu Muhammad dua kali. Seorang Mukmin tidak akan terperosok di lubang yang sama dua kali."

Baginda kemudian menitahkan kepada Zubair atau 'Ashim bin Tsabit untuk membunuhnya. Baginda juga menjatuhkan hukuman mati kepada seorang mata-mata Makkah, yaitu Mu'awiyah bin Mughirah bin Abi al-'Ash, kakek 'Abdul Malik bin Marwan dari garis ibunya. Itu terjadi setelah pasukan

'Ammar bin Yasir untuk memburunya. Mereka berhasil menangkapnya lalu menghabisinya.

Pendek kata, Perang Hamra' al-Asad ini bukan perang yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu rangkaian yang menyempurnakan Perang Uhud.

Itulah Perang Uhud dengan seluruh tahapan dan rinciannya. Para ahli membahas perang ini dengan panjang lebar. Lalu, kubu manakah yang menang atau kalah?

diri. Mereka tetap memberikan perlawanan dengan gagah berani hingga berhasil melakukan konsolidasi di pusat komandonya. Mereka tidak sampai meletakkan senjata dan dipukul mundur oleh pasukan Makkah. Bahkan, tidak satu pun dari mereka yang berhasil ditawan musuh.

Sebaliknya, pasukan musyrikin tidak mendapatkan harta rampasan sedikit pun. Sementara pada putaran ketiga, kubu musyrikin tidak dapat melanjutkan pertempuran padahal pasukan Muslimin masih ada di baraknya. Pasukan musyrikin tidak tinggal di medan perang sampai tiga hari, sebagaimana lazim dilakukan oleh pemenang perang. Mereka juga tidak berani masuk ke Madinah untuk menjarah harta benda berharga, padahal jaraknya tidak seberapa jauh, lagi pula kondisinya kosong dan terbuka.

Semua itu menguatkan keyakinan kita tentang apa yang diraih oleh pasukan Quraisy sebenarnya gagal dimanfaatkan. Tujuan mereka untuk menghabisi pasukan Muslimin setelah berhasil mengepung itu nyatanya juga tidak terwujud. Bukan hal yang aneh jika pemenang, tetapi juga mengalami kerugian besar, sebagaimana yang dialami kaum Muslim. Tampaknya apa yang disebut kemenangan itu ternyata jauh dari jaungkauan kedua belah pihak.

Akhirnya keputusan Abu Sufyan untuk segera menarik mundur pasukannya dan kembali pulang memberikan kesan, bahwa sebenarnya dia takut pasukannya kalah, andai kata mereka melanjutkan pertarungan pada putaran ketiga. Kesan itu kian menguatkan kita melihat sikap yang diambil Abu Sufyan dalam Perang Hamra' al-Asad tadi.

Jadi, perang ini adalah perang yang tidak tuntas, sehingga tidak bisa diputuskan siapa pemenangnya. Masing-masing kubu mendapatkan bagian kemenangan, dan kerugian sendiri-sendiri. Kemudian kedua kubu menahan diri, dengan tidak melanjutkan pertempuran tanpa pergi meninggalkan medan perang, dan markasnya untuk dikuasai musuh. Inilah yang dinamakan perang yang tidak tuntas.

Keadaan ini diisyaratkan oleh firman Allah:

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka juga menderita kesakitan, sebagaimana kamu menderitanya, sedangkan kamu mengharap ridha dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [TQS. An-Nisâ': 104]

Allah memilih kedua kubu sama-sama mendapat untung dan rugi, sehingga kedudukan keduanyaimbang. Kedua pihak pulang dan masing-masing merasa menang.[]



"Sesungguhnya, manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka." Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka mengambil keridhaan Allah. Dan Allah memiliki karunia yang besar.
[TQS Ali-'Imrân: 173-174].

musyrikin pulang dari Perang Uhud. Mu'awiyah datang menemui keponakannya, Utsman ibn Affan. Ketika itu, 'Utsman memberinya jaminan keamanan kepada Rasulullah. Beliau bersedia memberikan jaminan selama tiga hari selama di Madinah. Lewat waktu itu dia akan dibunuh.

Ketika Madinah ditinggalkan oleh pasukan, ternyata dia masih tinggal di situ lebih dari tiga hari. Dia melakukan tindakan memata-matai kaum kaum Muslim untuk kepentingan Quraisy. Ketika pasukan Islam kembali, Mu'awiyah segera kabur. Rasulullah memerintahkan Zaid bin Haritsah dan

Yang jelas, pada putaran kedua, keunggulan militer milik kubu musyrikin. Mereka berhasil menguasai medan, sementara korban jiwa lebih banyak di kubu Muslimin. Bahkan ada satu regu Muslimin yang kalah total. Jalan pertarungan juga menunjukkan dominasi pasukan Makkah.

Namun, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa mempertimbangkan bahwa kubu Quraisy sudah menang. Tidak ada yang meragukan, bahwa misi kafir Quraisy gagal melibas pasukan Islam. Sekali pun kubu Muslimin sempat kacau-balau, sebagian besar dari mereka tidak melarikan

**PERINGATAN PENAKLUKAN KONSTANTINOPEL DI GUNUNG SALAK**

Bogor - Mahasiswa Islamic Geographic Institute menggelar acara *Taddabur Alam Volume 5: Peringatan Penaklukan Konstantinopel Mengingat Kita pada Kebangkitan Khilafah*, Sabtu-Ahad (11-12/1) di Gunung Salak, Bogor.[]

**JIKA KEMBALI KE SYARIAH, 2020 TAHUN UMAT ISLAM**

Yogyakarta - Di hadapan ratusan kiai, mubaligh, santri dan tokoh masyarakat, KH Muhyidin menyatakan 2020 tahun umat Islam, jika umat kembali pada syariah dalam acara *Multaqa Ulama Yogyakarta*, Ahad malam (26/1/2020) di Pondok Pesantren Al-Hadid, Gunung Kidul, Yogyakarta.[]

**ISLAM SOLUSI TUNTAS PROBLEMATIKA UMAT**

Sumenep - Para ulama Aswaja Sumenep dalam *Multaqa Ulama* bersama Tokoh Masyarakat menegaskan Islam sebagai solusi tuntas problematika umat, Sabtu (1/2/2020) di Masjid Raudhatul Jannah Lenteng Sumenep.[]

**WARGA PANGKALPINANG PERINGATI PENAKLUKAN KONSTANTINOPEL**

Pangkalpinang - Ratusan warga memperingati peristiwa bersejarah yang juga merupakan bisyarah Rasulullah SAW yaitu peristiwa Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al Fatih, Ahad (26/1/2020) di Pangkalpinang.[]

**DAKWAH KHILAFAH DITEKAN, PERTANDA TEGAKNYA KHILAFAH SEMAKIN DEKAT**

Pasuruan - Sejumlah ulama Pasuruan dalam *Multaqa Ulama Pasuruan* meyakini dakwah khilafah ditekan sebagai pertanda pertolongan Allah untuk tegaknya sistem pemerintahan Islam itu semakin dekat, kedatangannya semakin dekat, Rabu (29/1/2020) di Mushala Baitus Silmi, Pasuruan.[]

**KHILAFAH SYAR'I SEKALIGUS SOLUSI**

Jombang - Multaqa Ulama Kasepuhan menyimpulkan khilafah itu syar'i sekaligus solusi berbagai problematika hidup manusia, Ahad (19/1/2020) di Jombang.[]

**ULAMA ASWAJA BANJARMASIN KRITISI BPJS KESEHATAN**

Banjarmasin - Sejumlah kiai dan ustaz dalam *Muzakarah Ulama Aswaja Banjarmasin* mengkritisi BPJS Kesehatan, Ahad (26/1/2020) di kediaman Abu Zallum, Banjarmasin.[]

**KORUPSI ILA YAUMIL QIYAMAH?**

Malang - Forum Mahasiswa Muslim Peduli Bangsa (FMMPB) Malang Raya menggelar *Diskusi Aktivis dan Intelektual: Korupsi ila Yaumil Qiyamah?* Sabtu (1/2) di Malang.[]

Didikan Ulama Hebat Menjadikannya Orang Hebat

Adalah Shalih bin Kisan, ulama hebat, yang mendidik Umar bin Abdul Aziz hingga menjadi orang hebat. Ketika itu, Shalih tinggal di Madinah. Umar dikirim oleh ayahandanya dari Damaskus ke Madinah.

Suatu hari, Umar bin Abdul Aziz kecil ini duduk menyendiri. Pikirannya melayang, entah ke mana, tiba-tiba anak belia ini membayangkan kematian dan hari akhirat. Dia merasakan dahsyatnya kematian dan hari akhirat itu begitu rupa. Dia menangis. Air matanya mengalir. Suaranya pun sesenggukan, sehingga ibunya mengetahui tangisan-nya.

Ibunya mengutus orang untuk menanyakan ihwal tangisannya. Mengapa dia menangis sesenggukan seperti itu? Dia menuturkan, *"Aku mengingat kematian.. Ibunya pun menangis, karena tangisan putranya itu."*

Ayahanda Umar, yaitu Abdul Aziz telah memilihkan guru yang tepat, ulama luar biasa, yang telah mendidik putranya menjadi anak yang bertakwa, wara', dan zuhud. Iya, Shalih bin Kisan, telah berhasil mendidiknya, dan mengajarkan Islam kepadanya begitu sempurna.

Ketika Abdul Aziz naik haji, berangkat dari Damaskus, setelah dari Makkah, dia singgah di Madinah, menziarahi makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Sekaligus untuk melihat langsung bagaimana perkembangan putranya.



■ Makam Umar bin Abdul Aziz di Suriah (sebelum dibakar pasukan Bashar Assad)

Abdul Aziz bertanya kepada Shalih bin Kisan, tentang putranya itu. Shalih menjawab, *"Belum pernah aku mempunyai pengalaman dengan seseorang, di mana Allah begitu Maha Agung di dalam dadanya, melebihi anak ini."* Subhanal-

lah, Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa, karena didikan guru yang luar biasa.

Pernah suatu ketika, Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah, mengajak Umar bin Abdul Aziz musyawarah dengan para pemikir, dan ahli ra'yu. Ia bertanya, *"Bagaimana pandangan kalian tentang masalah ini?"* Maka, mereka yang ada di sekelilingnya menjawab, *"Tulis keputusan, penggal lehernya."*

Rupanya orang yang sedang mereka bahas itu adalah orang yang menghina Sang Khalifah. Tetapi, Umar bin Abdul Aziz yang ada di majelis itu tidak memberikan pendapatnya sepatut kata pun. Ketika itu, Sulaiman bertanya kepadanya, *"Apa gerangan, mengapa kamu diam saja?"*

Umar menjawab, *"Jika Anda bertanya kepada saya, maka saya tidak tahu cacian yang membuat darah pencacinya halal, kecuali mencaci Nabi."* Ketika itu, Umar bin Abdul Aziz berdiri, dan mereka yang ada di sekeliling Khalifah itu pun pergi. Majelis pun bubar.

Sulaiman bin Abdul Malik berkata, sambil terkagum-kagum dengan begitu cintanya Umar bin Abdul Aziz kepada kebenaran dan keadilan, *"Allah telah melakukannya dengan baik terhadapmu, wahai Umar."* **har**

KRISTOLOGI

V Day, Strategi Jajah Muslim Paling Murah

Oleh: **Hj Irena Handono**, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center

Pertengahan Januari hiasan warna *pink* sudah merebak ke mana-mana mulai dari pusat-pusat perbelanjaan, kafe, toko buku, majalah, TV dan pusat-pusat hiburan lain. Di sekolah-sekolah para remaja pun asyik merencanakan acara malam *Valentine's Day* 14 Februari, yang mereka kenal sebagai hari kasih sayang.

Seolah menjadi keharusan bagi remaja untuk mengikuti acara tersebut, bahkan ada sebuah pandangan tidak mengikutinya adalah "kuper". Tak jarang juga orang tua justru mendukung tingkah putra-putrinya itu. Benarkah demikian?

Sejarah V Day

V Day berasal dari budaya Barat. Siapa Valentine? Tidak ada kepastian siapa-kah, bahkan sejarah pastinya pun tidak jelas. Ada banyak versi tentang asal perayaan *V Day*, yang paling populer adalah kisah Santo Valentinus yang hidup di masa Kaisar Claudius II dan kemudian menemui ajalnya pada 14 Februari 269.

Meskipun demikian para sejarawan Barat tidak berbeda pendapat mengakui bahwa akar perayaan *V Day* adalah berasal dari budaya pagan kuno, budaya kafir

yang menyembah banyak dewa-dewi. Menurut budaya ini bulan Februari dikenal sebagai periode cinta dan kesuburan.

Periode antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari dalam kalender Athena Kuno disebut sebagai bulan Gamelion, bulan suci memperingati pernikahan Dewa Zeus dan Hera. Sedangkan di Romawi Kuno, 15 Februari dikenal dengan hari raya Lupercalia, hari memperingati dewa Lupercus, sang dewa kesuburan.

Perayaan Lupercalia adalah rangkaian upacara pensucian yang berlangsung dari tanggal 13-18 Februari yang puncaknya adalah tanggal 15. Dua hari pertama (13 dan 14) dipersembahkan untuk Dewi Cinta (*Queen of Feverish Love*) bernama Juno Februata.

Pada hari tersebut para pemuda berkumpul dan mengundi nama-nama gadis yang dikumpulkan dalam sebuah bejana. Tiap pemuda mengambil secara acak satu nama dan gadis yang namanya terambil akan menjadi kekasihnya selama setahun penuh untuk bersenang-senang dan menjadi objek hiburan sang pemuda yang memilihnya. Jika di antara mereka ada kecocokan maka mereka kan melanjutkan ke pelaminan tapi kalau tidak,

maka tahun berikutnya mereka bisa berganti pasangan.

Tanggal 15 Februari puncak peringatan dilakukan dengan cara mempersembahkan korban berupa kambing kepada sang dewa yang dilakukan oleh para pendeta pagan dan kemudian mereka meminum anggur dan berlari-lari di jalan-jalan dalam kota sambil membawa potongan kulit domba dan menyentuhkan kepada siapa pun yang dijumpai.

Saat itu para wanita akan berjejer di sepanjang jalan berebut untuk diusap kulit kambing, mereka percaya bahwa sentuhan kulit kambing tersebut akan membawa keberuntungan dan kesuburan. Suatu acara yang sangat populer dimasa itu.

Sinkretisme

Ketika agama Kristen masuk Roma, budaya maksiat seks bebas yang begitu digemari masyarakat ini sulit dijauhkan. Sehingga untuk menarik minat masyarakat terutama remaja agar masuk gereja maka dipertahankanlah tanggal tersebut namun diubah dengan nama-nama orang-orang suci (saint/santo) gereja. Dan pada tahun 496, Paus Gelasius I menetapkan

kan upacara pagan Romawi Kuno ini menjadi Hari Perayaan Gereja dengan nama *Saint Valentine's Day*.

Masuknya budaya ini ke negeri ini adalah bentuk perang yang cukup murah, yakni perang budaya, dengan mendangkalkan akidah Muslim dan menjauhkan Muslim dari ajaran Islam.

Dalam Konferensi Misionaris di kota Quds (1935), Samuel Zweimer, seorang Yahudi yang menjabat direktur organisasi misi Kristen, menyatakan,

"Misi utama kita bukan menghancurkan kaum Muslim sebagai seorang Kristen... Tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam, generasi yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi malas dan hanya mengejar kepuasan hawa nafsu."

Bukankah ini yang sudah terjadi sekarang? Budaya-budaya hedonisme yang mengumbar kepuasan hawa nafsu seperti *V Day*, *April Mob*, *Heloween*, *Old and New* yang kesemuanya bukan berasal dari budaya Islam, bukan berasal dari budaya lokal negeri kita, lebih dikenal oleh remaja Muslim. Masyarakat digiring untuk konsumtif. Lewat budaya, umat Islam didangkalkan akidahnya dijauhkan dari ajaran Islam. **]**



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Pada peringatan HUT-70 berdirinya, 1 Oktober 2019, Republik Rakyat Cina menggelar parade militer besar-besaran di lapangan Tianmen, Beijing. Sekitar 15.000 tentara berbagai kesatuan berbaris rapi. Diikuti oleh alutsista utama, termasuk rudal-rudal hypersonic Dong Feng DF-41 yang mampu menjangkau sasaran sejauh 12.000-15.000 Km dan membawa 10 kepala nuklir.

Cina kini sudah menjadi kekuatan global berkat jumlah penduduknya, volume ekonominya dan militernya. Di kesempatan itu, Presiden Xi Jinping dengan jumawa mengucapkan "Kini, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghentikan Cina" (*Koran Sindo*, 2 Oktober 2019).

Namun Januari 2020 Allah menegur

(Variolla), polio dan influenza, termasuk varian flu burung (H5N1) dan ebola. Penyakit pes paling sering merenggut nyawa puluhan juta orang sejak zaman Yunani kuno hingga abad-19 di Eropa.

Di masa Khilafah Islam, negara mengerahkan segenap daya upaya untuk mengatasi pandemi.

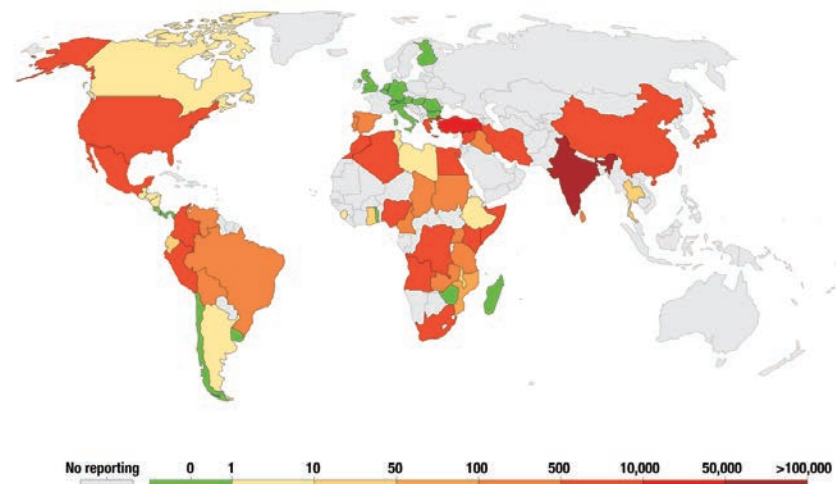
Semula, para ahli menduga pandemi cukup diatasi dengan kebersihan dan gaya hidup sehat. Namun ternyata, banyak orang yang sudah melakukan itu tetap saja tertular penyakit. Karena itu kemudian dicari cara untuk mencegah kuman atau virus menulari kita.

Sangat menarik untuk mengetahui, bahwa cikal bakal vaksinasi itu dari dokter-dokter Muslim zaman Khilafah Turki Utsmani, bahkan mungkin sudah dirintis sejak zaman Abbasiyah.

Number of reported smallpox cases, 1943

This includes endemic and imported cases, therefore some countries still recorded some cases after the official year of eradication.

Our World in Data



Source: World Health Organization (1969-1988)

CC BY

■ Peta penyebaran Cacar dari masa ke masa, bisa diakses di <https://ourworldindata.org/smallpox>

terjadi, sebelum kekebalan itu muncul, pasien sudah telanjur meninggal atau cacat. Jadi vaksinasi ini cara merangsang kekebalan dengan risiko minimal. Tentu saja yang dirangsang hanya kekebalan untuk penyakit tertentu, yang dianggap sedang amat berbahaya karena fatal dan sangat menular, seperti cacar, polio, difteri atau meningitis. Penyakit meningitis tidak ada di Indonesia, tetapi ada di Saudi Arabia, sehingga para jamaah haji atau umrah diwajibkan oleh pemerintah Saudi untuk vaksinasi meningitis.

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), istri dari duta besar Inggris untuk Turki saat itu, membawa ilmu vaksinasi ke Inggris untuk memerangi cacar. Namun Inggris perlu menunggu setengah abad, sampai tahun 1796 Edward Jenner mencoba teknik itu dan berhasil. Cacar yang pernah membunuh puluhan juta manusia hingga awal abad-20, akhirnya benar-benar berhasil dimusnahkan di seluruh dunia dengan vaksinasi yang massif. Kasus cacar ganas terakhir tercatat 1978.

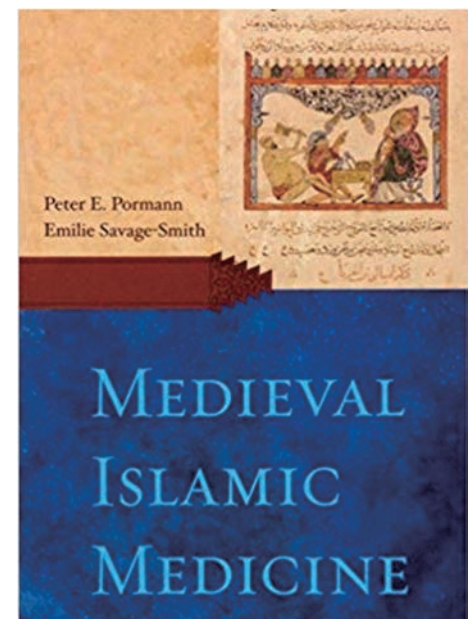
Cina adalah negara dengan teknologi dan standar kesehatan yang sudah tinggi. Namun ada sebagian kebiasaan rakyat Cina yang belum sehat, seperti toilet yang jorok dan makan hewan liar. Seperti diberitakan, ada dugaan virus Corona berasal dari kelelawar, yang di Kota Wuhan biasa disantap.

Namun ada pula dugaan virus itu senjata biologi yang bocor. Seperti negara-negara adidaya lainnya, selain nuklir, Cina juga mengembangkan senjata kimia, biologi dan antariksa.

Sebagian Muslim menganggap wabah virus Corona ini adalah teguran atas kesombongan Cina, atau balasan atas kebijakan mereka memenjarakan jutaan Muslim Uighur di Turkistan Timur

(Xinjiang). Kini belasan kota Cina dengan puluhan juta penduduknya laksana penjara. Penduduknya tidak boleh keluar, karena dikhawatirkan menyebarkan virus. Padahal tetap di dalam kota terancam kematian.

Sebagai Muslim, kita semestinya waspada dan optimis sekaligus. Waspada, bahwa virus Corona ini bisa juga menyebar ke negeri-negeri Muslim yang lambat



■ Buku sejarah kedokteran Islam zaman pertengahan

mengantisipasi. Namun juga optimis, bahwa untuk setiap penyakit, Allah pasti juga menurunkan obatnya.

Kalau Khilafah tegak berjaya, ia akan mengintensifkan upaya menemukan vaksin Corona, lalu menawarkan Cina bantuan mengatasi pandemi Corona, baru kemudian memaksa Cina mengubah politiknya terutama atas Muslim Uighur, sekaligus agar Cina membuka pintu untuk dakwah Islam yang seluas-luasnya.[]



■ Rudal balistik DF-41 yang dipamerkan Cina.

Cina dengan makhluknya yang kecil, yaitu virus Corona. Tiga belas kota besar Cina dengan total 41 juta penduduk diisolir. Virus mematikan yang belum ditemukan obat maupun vaksin penangkalnya itu telah menginfeksi ribuan orang, dan hingga 3 Februari 2020 telah mengakibatkan 425 tewas. Jumlah korban ini meningkat cepat sehingga orang khawatir virus ini menjadi pandemi.

Suatu pandemi atau wabah global merupakan terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografi yang luas. Menurut WHO, suatu pandemi dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut telah terpenuhi:

- timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi bersangkutan,
- agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius,
- agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia.

Dalam sejarah manusia, telah terjadi banyak pandemi yang signifikan. Penyakit tersebut biasanya ditularkan hewan (zoonosis) yang terjadi bersamaan dengan domestikasi hewan. Beberapa contoh pandemi yang pernah tercatat dalam sejarah: pes (*tha'un*), kolera, TBC, cacar

Vaksinasi adalah proses memasukkan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh untuk mengaktifkan sistem kekebalan spesifik yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh tapi belum aktif. Kekebalan itu tidak muncul sendiri meski saat baru lahir bayi ditahnik dan selama dua tahun mendapatkan ASI.

Tanpa vaksinasi, kekebalan itu baru muncul setelah orang terserang penyakit, bila dia selamat. Namun yang sering



■ Lady Mary Wortley Montagu, yang membawa ilmu vaksin dari Khilafah Utsmani ke Inggris

Islam atau Pancasila?

Jadi perdebatan Pancasila dan Islam adalah khasanah lama yang normal. Dan itu akan terus ada selama Pancasila tidak mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sebuah peristiwa sejarah tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan peristiwa-peristiwa yang melatarbelakanginya. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 bukanlah peristiwa tunggal, namun banyak sekali peristiwa yang ada di belakangnya. Jadi untuk melihat sebuah peristiwa, kita harus juga melihat banyak peristiwa lain di sekitarnya.

Pro kontra apakah Islam ataukah Pancasila bukanlah perkara baru yang muncul hanya beberapa jam setelah proklamasi saja, namun jauh sebelum itu. Kita tidak boleh melihat hanya sepotong kisah bagaimana Muhammad Hatta menyampaikan "keberatan Indonesia timur", yang kemudian diakomodirnya untuk diperjuangkan sebelum sidang PPKI 18 Agustus 1945. Dan singkatnya disampaikan telah terjadi kesepakatan baru dengan meninggalkan sebuah diskusi panjang yang melelahkan oleh Panitia Sembilan yang disebut Piagam Jakarta.

Islam versus Pancasila

Setelah Belanda kalah dalam Perang Pasifik (salah satu perang dalam Perang Dunia II) melawan Jepang, Nusantara dijajah oleh Jepang. Walaupun hanya 3 tahun sekian bulan, namun penderitaan yang dialami sungguh luar biasa. Nusantara dipaksa ikut dalam mendukung kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik melawan kekuatan Sekutu pimpinan Amerika Serikat.

Kekuatan Sekutu berlipat-lipat yang datang bagai air bah, menyapu wilayah Pasifik yang pada mulanya dikuasai Jepang. Di Nusantara kekalahan Jepang sudah mulai terasa sejak tahun 1944. Hal tersebut yang melatarbelakangi berbagai pemberontakan PETA (sebuah pasukan pribumi yang dibentuk Jepang untuk mendukung mempertahankan tanah air dari serangan Sekutu) oleh para pemuda Indonesia.

Jepang sadar bahwa hegemoninya di Pasifik termasuk di Nusantara akan segera berakhir. Oleh karena itu beberapa tokoh pergerakan dipanggil Jepang akan diberikan kemerdekaan dalam waktu yang tidak berapa lama. Hal tersebut disambut dengan berbagai persiapan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan hari kemerdekaan yang dijanjikan Jepang tersebut.

Dibentuklah BPUPKI yang akan merumuskan dasar-dasar utama sebuah negara merdeka. Rapat BPUPKI yang terdiri dari 60 anggota dari berbagai elemen bangsa mengalami kesulitan dalam merumuskan dasar negara. Maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang lebih kita kenal dengan "Panitia Sembilan". Namanya diambil dari jumlah orang yang terlibat di dalamnya.

Mereka adalah: Ir Sukarno, Drs Moh Hatta, H Agus Salim, Mr AA Maramis, Mr



■ Buya Hamka saat masih muda.

Muh Yamin, KH Wahid Hasyim, Mr Ahmad Subarjo, R Abikusno dan A Kahar Muzakir.

Perdebatan yang pada akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan "Piagam Jakarta" memberikan harapan besar kepada kaum Muslimin di Nusantara untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan cara Islam, karena dalam Piagam Jakarta tersebut disampaikan tujuh kata yakni: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi landasan konstitusional menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.

Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa ternyata kesepakatan itu pada akhirnya dianulir dengan "kesepakatan yang dipaksakan" beberapa saat sebelum sidang PPKI dibuka sehari setelah pengumuman kemerdekaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya janji mengadakan pertemuan untuk menentukan konstitusi negara 6 bulan setelah merdeka terucap dari Sukarno. Itulah yang pada akhirnya membuat tokoh Islam terutama Ki Bagus Hadikusumo melunak dan menyetujui dihapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Namun pada kenyataannya kondisi berkata lain. Masuknya Belanda kembali dengan membonceng tentara Sekutu yang melakukan pelucutan senjata tentara Jepang menjadikan konstelasi politik berubah dengan drastis.

Di sinilah kesabaran dan keikhlasan untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah diuji. Barulah pada 1955 dilaksanakan Pemilu Konstituante yang tugasnya memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan tersebut bertugas merumuskan kembali konstitusi negara. Dan di sinilah argumentasi Pancasila atau Islam kembali mengemuka di ruang publik bahkan di ruang formal konstitusional.

Tokoh tokoh yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari tokoh nasionalis, liberal, Kristen dan komunis. Sedangkan yang setuju dengan

Islam sebagai dasar negara dari kalangan Fraksi Masyumi, NU, PSII, PERTI, PPTI. Mereka saling beradu argumentasi manakah yang lebih layak dijadikan dasar negara Indonesia.

Argumentasi paling sering disampaikan tokoh pendukung Pancasila adalah bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan para pendiri bangsa yang tidak elok untuk kemudian diotak-atik kembali. Kesepakatan yang harusnya dihormati oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Sembari menolak Islam dengan merancukan antara Islam sebagai dasar negara dengan bentuk negara. Mereka menyodorkan pertanyaan apakah negara seperti Yaman, Afghanistan dan Saudi Arabia yang diinginkan tokoh tokoh kelompok Islam? Atau mau kembali kepada perseteruan Ali dan Muawiyah 1300 tahun yang lalu.

Allahu Akbar

Dalam penggalan pidato bantahan-bantahannya, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering kita kenal dengan Buya Hamka, seorang ulama besar dari Minang, ahli fikih dan tafsir yang terkemuka membeberkan buah pikirannya.

"Kami pun mengakui sekali-kali tidak membantah akan adanya 'Semangat Proklamasi 17 Agustus', tetapi kami tidak dapat menerima kalau sekiranya semangat itu didasarkan kepada Pancasila. Semangat yang sebenarnya dari Proklamasi tanggal 17 Agustus, ialah semangat merdeka, semangat tidak mau dijajah lagi. Pekik 'Merdeka' itulah yang bersipongang sejak dari Sabang sampai ke Merauke!.... Di bawah kilatan kalimat itu timbul sendirinya persatuan dan perpaduan kita.

Itulah yang kami kenal, jiwa atau yang menjiwai Proklamasi 17 Agustus bukanlah Pancasila! Pancasila itu belum pernah dan tidak pernah ada karena

keistimewaan hidupnya di zaman Belanda itu menggetarkan hati dan tidak pernah dikenal. Tidak populer dan belum pernah terdengar! Yang terdengar hanya sorak Allahu Akbar! Dan api yang menyala di dalam dada ini sekarang, Saudara Ketua, bukanlah Pancasila, tetapi Allahu Akbar."

Dalam kesempatan yang sama, Buya Hamka mengkhawatirkan orang-orang komunis yang nyata-nyata mendukung Pancasila dan aktif melakukan penyanggahan terhadap argumentasi argumentasi tokoh-tokoh Islam. Tokoh yang paling menonjol adalah Nyoto (kelak Nyoto terbukti aktif merancang pemberontakan PKI dalam G 30S PKI).

Hamka menyampaikan kekhawatirannya itu karena menganggap Pancasila akan mudah sekali ditunggangi oleh komunis. Sesuatu yang aneh di luar kewajaran jika komunis yang jelas-jelas anti ketuhanan namun mendukung Pancasila yang jelas-jelas mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Partai Komunis sudah sudi berbuat ganjil mengakui Tuhan, padahal pokok pendirian mereka adalah tidak bertuhan. Maka orang yang arif bijaksana lekas mengerti. Janganlah saudara berbesar hati karena mereka telah membantu, janganlah tertawa. Saya kasihan kalau ketawa saudara hari ini akan peot dibelakang hari, dalam masa yang tidak lama."

Dan kekhawatiran Hamka terbukti setelah 10 tahun berlalu. Setelah perdebatan panjang dan dinyatakan *deathlock*, Sukarno mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden antara lain Membubarkan Dewan Konstituante, Kembali ke UUD 45, UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan Pembentukan MPRS dan DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kebijakan politik pasca Dekrit mengacu kepada Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Sukarno ingin merangkul 3 elemen dasar dewan konstituante yang saling berseteru menjadi bergandengan tangan. Namun jauh dari kenyataan. Komunis dengan PKI seperti prediksi Buya Hamka akan membuat senyum dan tertawa para pendukung Pancasila menjadi peot. Karena Komunis melakukan pemberontakan bersenjata melawan Pancasila itu sendiri.

Jadi perdebatan Pancasila dan Islam adalah khasanah lama yang normal. Dan itu akan terus ada selama Pancasila tidak mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Orang akan selalu mencari alternatif agar perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih baik. Dan sistem hukum mana yang lebih baik bagi orang-orang yang mau berpikir?[]

Sigit Nur Setiyawan | guru dan praktisi multimedia



Menyerang Islam Minus Intelegktualitas

Oleh: Dr M Kusman Sadik

Pada pekan terakhir ini, cukup ramai berbagai isu yang berujung pada upaya mendiskreditkan ajaran Islam. Tentu hal ini tidak terlepas dari semakin maraknya gerakan fobia Islam di negeri ini. Ada istri seorang tokoh yang berusaha menggugat kerudung dengan mendiskreditkannya sebagai budaya Arab yang tidak wajib bagi Muslimah. Sejalan dengan itu para aktivis sekuler-liberal masif menggelar kampanye *NoHijab-Day* di media sosial.

Ada pula yang berusaha mengaitkan fenomena kerajaan fiktif *Keraton Agung Sejagat*, *Kerajaan Kandang Wesi*, *Sunda Empire*, *King of the King*, dan sejenisnya dengan sistem pemerintahan Islam yakni khilafah. Bahkan ada tokoh yang serampangan menyampaikan di hadapan publik bahwa mengikuti Rasulullah SAW dalam aspek politik dan pemerintahan itu haram.

Terkait hal tersebut ada yang perlu menjadi catatan. *Per-*

tama, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya lebih bersifat *framing* yang jauh dari intelektualitas. Misalnya kampanye *NoHijabDay*, jelas itu sekadar jargon untuk meracuni Muslimah agar melepas kerudungnya. Tentu yang mereka targetkan bukan sekadar kerudung semata, namun itulah pintu masuk mereka untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam.

Namun kaum liberalis itu pasti akan menelan kekecewaan berat. Pasalnya kini di tengah umat Islam tumbuh kesadaran untuk memahami Islam berdasarkan intelektualitas melalui berbagai kajian. Jangankan *NoHijabDay* yang sekadar propaganda, Jaringan Islam Liberal (JIL) yang sedikit berwarna intelektualitas itu pun kini sudah gulung tikar.

Ide sekularisme dan liberalisme semakin tidak laku di tengah kehidupan umat Islam. Tentu ini tidak terlepas dari perjuangan para aktivis dakwah yang terus mendakwahkan ajaran Islam kaffah secara intelektualitas.

Hasilnya kini umat makin menyadari keagungan dan ketinggian ajaran Islam.

Kedua, kemunculan kerajaan fiktif *Sunda Empire* dan sejenisnya itu, di samping sebagai alat pengalihan isu berbagai skandal korupsi, juga dimanfaatkan untuk membuat *framing* negatif terhadap khilafah. Ini mirip isu ISIS yang digunakan oleh mereka untuk menggambarkan khilafah sebagai sesuatu yang penuh keburukan, penipuan, kejahatan dan sebagainya.

Metode *framing* yang miskin intelektualitas itu jelas sebuah penyesatan. Pada era teknologi 4.0 saat ini tersedia berbagai akses pada sumber literasi. Karenanya umat akan sangat mudah menepis penyesatan semacam itu. Melalui berbagai sarana, baik digital maupun non-digital, kini jadi mudah menemukan literatur tentang Islam dan fakta sejarahnya.

Sangat banyak literatur akademik yang merekam jejak sejarah kegemilangan khilafah. Dian-

taranya adalah sejarawan Prof Paul Kennedy yang menulis tentang imperium (khilafah) Utsmani dalam bukunya *"The Rise and Fall of the Great Powers"* (Unwin-Hyman, London 1989). Menurutnya dalam beberapa abad sebelum tahun 1500, dunia Islam di bawah imperium Utsmani telah jauh melampaui Eropa dalam bidang budaya dan teknologi.

Tim Wallace-Murphy menerbitkan buku berjudul *"What Islam Did for Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization"* (Watkins Publishing, London 2006). Buku tersebut memaparkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam (khilafah) ke Barat pada abad pertengahan. Disebutkan pula bahwa Barat telah berutang kepada Islam dalam hal pendidikan dan sains. Utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapan pun.

Paul Kennedy dan Tim Wallace-Murphy itu telah melakukan penelitian yang bisa dipertang-

gungjawabkan secara akademik. Mereka menemukan berbagai fakta sejarah kegemilangan peradaban Islam di bawah sistem khilafah. Maka hanya orang-orang yang berintelektualitas minus sajalah yang menyejajarkan khilafah dengan imperium abal-abal seperti *Sunda Empire* dan sejenisnya.

Jadi kaum liberalis itu memang bertugas untuk menyerang ajaran Islam dengan berbagai cara. Mulai dari cara yang sedikit berbau intelektualitas hingga yang minus intelektualitas. Targetnya hanya satu, yakni menjauhkan umat dari akidah dan syaria.

Sementara di sisi lain, dakwah yang argumentatif dan edukatif kini makin menguat. Tumbuh meluas ghirah perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam secara kaffah. Gerakan dakwah yang bermodal intelektualitas seperti itulah yang akan menenggelamkan kaum liberalis pada keputusan. *Wallahua'lam bi ash-shawab.*[]

MEDIA GAUL



Generasi Senoparty dan Hingar Bingar Liberalisme pada Pergaulan Milenial

Oleh: Ihsan Tampubolon, Aktivis Dakwah dan Youtuber Ideologis

"Selamat datang di Senoparty," ucap Doni, seorang karyawan perusahaan *startup* kepada gengnya saat sampai di salah satu bar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Malam itu adalah malam Sabtu, momen yang ditunggu-tunggu oleh Maulana dan puluhan ribuan karyawan generasi milenial lainnya untuk melepas lelah. Malam itu mereka mengisi waktu dengan makan malam, karaoke, berhura-hura, bahkan datang ke tempat-tempat *one night stand* demi mendapatkan hiburan sebelum esok hari kembali kepada dunia kerja mereka masing-masing.

Senoparty adalah fenomena baru di kawasan Senopati yang ditopang oleh puluhan ribu generasi milenial di Jakarta Selatan. *Senoparty* diambil dari dua kata: Senopati dan *party* (pesta). Kawasan ini sangat strategis karena diapit oleh kawasan bisnis dan industri Blok M, Sudirman, dan Mampang. *Senoparty* muncul sebagai solusi liberal, pojok hura-hura khususnya untuk generasi milenial Jaksel setelah 5 hari kerja mereka dieksploitasi oleh para kapitalis.

Generasi ini identik dengan anekdot, "*gelas wine di tangan kanan, instastory dengan tangan kiri sambil melantunkan lagu Berharap Tak Berpisah*," Anekdot lain dari salah satu netizen untuk menggambarkan generasi ini: "*Saat kecil kita di ajari sopan dan santun, saat besar menjadi 'so fun n santuy'*."

Anekdot di atas memang sangat tepat untuk menggambarkan anak-anak *Senoparty* dan milenial lain yang semisal. Moto hidup YOLO (You Only Live Once) seringkali ikut muncul untuk menggambarkan bahwa hidup itu ha-

nya sekali, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk menikmati hidup.

Liberalisme, Penjajahan

Liberal adalah pemahaman yang berasaskan pada empat pilar kebebasan: kebebasan beragama, kebebasan bertingkah laku, kebebasan berpendapat, dan kebebasan kepemilikan. Paham ini dibawa oleh negara-negara berideologi kapitalisme pada setiap negara jajahannya. Paham liberal ini masuk dengan gaya yang berbeda dibandingkan dengan masa kolonialisme, namun racun yang ditawarkan jauh lebih berbahaya dan tersembunyi.

Paham liberal masuk ke dalam dunia generasi milenial dan generasi-Z, menjadikan mereka remaja yang mencintai dunia dan jauh dari agama. Standar kesuksesan diukur dari seberapa tinggi jabatan yang sudah mereka raih di usia muda. Bermunculan para eksekutif muda atau business owner di usia di bawah 30 tahun tanpa diiringi *ruh*, sehingga bisnis dan dunia kerja mereka dikelilingi dengan ekonomi ribawi dari hulu ke hilir.

Standar kebahagiaan diukur dengan sudah seberapa jauh kaki mereka menginjak tempat-tempat indah di dunia, makanan mewah apa saja yang sudah dicicipi, atau hobi-hobi ekstrem yang memacu adrenalin. Dalam kaidah hidupnya, mereka memaksimalkan *weekdays* nya dengan bekerja dari bangun subuh sampai mau tidur kembali, dan mereka memberikan hadiah untuk dirinya sendiri dengan memuaskan hidup pada *weekends*.

Jika ada diantara mereka yang "sedikit Islami", mereka

merasa sudah cukup dan berpuas diri saat bisa berbagi dalam aktivitas-aktivitas sosial, CSR, menyantuni anak yatim piatu, mendirikan yayasan, menyumbang pembangunan masjid, atau bersepeda di hari Jumat. Di antara mereka ada juga yang menonjol dan langka dengan mendirikan bisnisnya tanpa riba.

Potensi Generasi Milenial

Generasi milenial adalah generasi yang secara fisik, akal, dan mental memiliki potensi yang sangat optimal untuk kebangkitan Islam yang hakiki. Mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran kreatif, *out of the box*, memiliki dedikasi yang sangat tinggi bahkan militan. Namun sayang, liberal menggerogoti dan bercokol dalam pikiran mereka, menjadikan mereka para penghamba dunia, yang 1.400 tahun lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW atas penyakit *wahn*, yaitu cinta dunia dan takut mati.

Potensi generasi milenial yang sangat tinggi inilah yang harus disadari oleh siapapun yang menginginkan kebangkitan Islam. Di tangan mereka, bisa lahir pendakwah-pendakwah tangguh yang juga seorang yang sukses seperti Abdurrahman bin Auf atau Ustman bin Affan, yang kesuksesan mereka itu ialah saat mereka bisa mengorbankan harta, tenaga, raga, bahkan nyawa mereka di jalan dakwah. Inilah generasi milenial yang memiliki standar kebahagiaan saat seluruh hidupnya diridhai Allah, dan di tangan mereka kelak perjuangan Islam ini akan sampai pada seluruh dunia.[]

Tren Sesaat PENYIMPANGAN HIJAB



Jika ada yang menyerukan Muslimah baik-baik yang sudah mengenakan hijab agar melepasnya, itu sama saja menurunkan derajat kehormatan mereka.

Di tengah penyeru kebenaran, ada saja penyeru kebatilan. Ketika para hijaber merayakan *Hijab Day* 1 Februari lalu, ada segolongan kelompok yang menyerukan *No Hijab Day*. Karuan saja hal ini membuat gerah umat Islam. Walaupun seruan itu hanya tiap 1 Februari, ajakan semacam itu sungguh menantang Allah SWT. Memancing kegaduhan di tengah-tengah fenomena hijrah kaum Muslimah.

Sudah jelas-jelas hijab itu wajib. Banyak Muslimah sedang berjuang mengenakannya. Lalu mati-matian istiqamah agar tidak futur dengan busana barunya. Sekonyong-konyong ada gerakan yang melawan arus, mengajak lepas hijab. Sungguh kontraproduktif. Apakah mereka lupa esensi dakwah adalah amar makruf nahi munkar, bukan sebaliknya, amar munkar nahi makruf?

Busana Kehormatan

Manusia dilahirkan ke dunia memang dalam keadaan telanjang. Kelak akan kembali pada Allah SWT dalam keadaan seperti dilahirkan. Namun, bukan berarti saat hidup di dunia diserukan untuk tetap telanjang. Allah tak lupa menunjukkan tata cara berpakaian. Oleh sebab itu, diturunkanlah ayat-ayat hijab untuk menjadi panduan kaum Muslimin dalam menutup auratnya.

Tidak ada perbedaan di kalangan umat atas wajibnya menutup aurat. Juga, tidak ada perselisihan mengenai batasan aurat laki-laki maupun wanita. Paling-paling yang beda pendapat adalah soal wajib tidaknya menutup wajah (mengenakan cadar, red).

Adapun pendapat yang masyhur, aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Inilah yang harus ditutupi dengan hijab. Baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Ketika seorang Muslimah ke luar rumah, ia wajib mengenakan hijab. Demikian pula saat di rumah, namun ada tamu atau kerabat non-mahrom.

Aturan berhijab merupakan pembeda para Muslimah dari non-Muslimah. Mereka akan dicirikan dengan pakaian khasnya, jilbab dan khimar. Allah berfirman yang artinya: *"Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu."* (TQS Al-Ahzab[33]:59)

Hijab juga lambang status sosial Muslimah. Pembeda antara dia dengan golongan budak dan bahkan pelacur. Dahulu, ketika para istri Nabi keluar rumah malam-malam untuk buang hajat, mereka kerap diganggu. Lantaran itu maka turunlah ayat-ayat hijab, sehingga mereka menutup tubuhnya ketika keluar rumah.

Sementara itu, budak dan pelacur-pelacur membuka auratnya. Namun, banyak oknum-oknum pelacur yang sengaja mengenakan hijab untuk mengelabui masyarakat bahwa dia adalah perempuan baik-baik. Jadi, jika ada yang menyerukan Muslimah baik-baik yang sudah mengenakan hijab agar melepasnya, itu sama saja menurunkan derajat kehormatan mereka.

Penyimpangan

Hijab di Indonesia, mengalami perjalanan panjang hingga menjadi busana mayoritas saat ini. Jika di era 80-an penggunaanya minoritas, kini Muslimah yang tidak berhijab menjadi minoritas. Mula-mula hijab dikenakan sebagai konsekuensi ketakwaan seorang Muslimah. Mereka mengenakannya karena sadar betul akan perintah wajibnya.

Saat itu, dakwah sudah mulai menyentuh umat Islam. Terutama dakwah yang bersifat politik. Maksudnya, pilihan Muslimah untuk berhijab, tak lepas dari kesadaran dan keberanian mereka untuk menunjukkan identitas ke-Islaman yang selama Orde Baru ditekan. Dahulu, orang berhijab dicurigai karena dianggap melawan aturan negara. Banyak produk-

produk aturan yang melarang hijab, baik di dunia pendidikan, pemerintahan hingga ketentaraan.

Namun, ketika seruan dakwah menyentuh kalangan terdidik, gelombang hijab tak bisa dihalau. Kalangan menengah yang cukup stabil secara ekonomi ini, banyak yang memilih hidup lebih religius dibanding sekuler. Mereka bukan kalangan yang mudah ikut-ikutan, namun berpikir jernih dalam mengambil keputusan, berdasar keyakinan.

Kalangan inilah yang berperan memperbesar gelombang hijabisasi—kalau boleh disebut demikian—hingga hijab menjadi tren. Terlebih ketika tahun 2000-an muncul para *public figure* cantik yang mengenalkan hijab sebagai *lifestyle*, penggunaan hijab kian melesat.

Ciri khas masyarakat Asia, apalagi Indonesia, memang menyukai dan mudah meniru hal-hal yang sedang digemari. Begitu hijab *booming*, mereka lantas berbondong-bondong mengenakannya. Sayangnya, tidak diikuti dengan pemahaman yang benar. Inilah setitik kelemahan itu. Yakni, ketika Muslimah rame-rame berhijab, tanpa dilandasi kesadaran dan ketakwaan yang cukup mapan.

Muncul malahijab alias penyimpangan dalam berhijab. Semisal fenomena *jilboobs*, yakni para Muslimah yang membungkus aurat dengan pakaian serba ketat, bahkan menonjolkan buah dada atau pantatnya. Bentuk lain malahijab adalah ketika perilaku para hijaber ini ternyata tak ada bedanya dengan yang belum berhijab. Ada yang pacaran, dugem, bahkan sampai berzina. Di kalangan dewasa, Muslimah berhijab malah korupsi, selingkuh, membunuh dan kelakuan minus lainnya. Fenomena ini membuat persepsi buruk akan hijab. Bahkan menjadi dalih untuk tidak berhijab.

Memang, secara umum tak ada hubungan antara perilaku dengan busana. Seorang berpakaian sopan, belum tentu baik. Namun, hijab berbeda. Ia adalah simbol ketakwaan. Aneh jika Muslimah

berhijab tidak mampu mengerem perilakunya. Sebab, sejarah hijab sendiri berbicara soal status Muslimah baik-baik, seperti disebutkan sebelumnya.

Nah, inilah tugas para dai dan daiyah. Merangkul kalangan Muslimah minoritas yang belum berhijab sempurna. Yakni, mereka yang masih mengenakan *jilboobs*, atau bahkan belum berhijab sama sekali. Bukannya malah mengajak mereka yang sudah berhijab untuk melepaskannya. *Na'udzubillahi minzalik.*

Tren Hijab Syar'i

Tahun 2020 saat ini, diramalkan tren hijab adalah syar'i. Makin panjang, makin digemari. Makin besar atau lebar, makin disukai. Tampaknya, para Muslimah mulai menemukan bentuk hijab sejati yang membuat mereka nyaman, bebas beraktivitas dan tak melanggar aturan agama. Demikianlah Allah Swt. telah merancang busana terbaik untuk hamba-Nya.

Produsen hijab dari brand Dauky, Tika Latifani Mulya mengatakan, busana syar'i akan semakin populer di 2020. Menurutnyanya sejak 2019, permintaan busana syar'i terus meningkat. "Gamis pun sekarang naik, karena semakin marak orang-orang yang hijrah juga. Jadi marketnya semakin besar juga. Dan kenapa hijab ukurannya juga semakin banyak yang besar? 120x120 cm, 140x140 dan juga bisa 150x150 cm. Ini kenapa ukuran hijab *square* jadi membesar, ya karena itu, agar bisa dipakai lebih syar'i," ungkapnyanya (*wolipop*).

Melihat fenomena tersebut, tampaknya ajakan menyedatkan untuk melepas hijab tidak akan mendapat tempat di hati para Muslimah. Kecuali di hati segelintir oknum-oknum Muslim dan Muslimah liberal yang tidak takut melawan perintah Allah SWT.

Ya Allah, hancurkanlah upaya mereka memasarkan kemunkaran dan kebatilan. Menangkanlah kebenaran agar mereka segera bertobat. **kholda**

Jangan Turuti Bisikan Lepas Hijab

Istiqamah dalam menjalankan syariat Islam memang tidak mudah. Salah satu godaan terberat bagi Muslimah adalah keistiqamahannya dalam berhijab syar'i. Kadang ada saja bisikan agar melepas hijab, khususnya yang baru hijrah. Seperti perasaan tidak nyaman karena panas, rasa tidak percaya diri karena tampil beda dari lingkungannya, dan masih banyak lagi. Berikut alasan lain yang menggoda Muslimah untuk lepas hijab:

1. Belum Berakhlak Baik

Mengenakan hijab syar'i otomatis memang menjadi duta Islam. Sebab, masyarakat masih memiliki persepsi kuat bahwa mereka yang berhijab syar'i adalah Muslimah yang taat dalam agama. Makanya kita sering mendengar ungkapan, "Udah berhijab kok kelakuan kayak gitu." Ini karena hijab menuntut pemakainya untuk berakhlakul karimah. Berakhlak Islam.

Namun, jika merasa belum baik akhlaknya, bukan hijabnya yang dilucuti. Tapi, hadirkan akhlak Islam itu dalam diri kita. Dengan cara begini, justru kita akan terdorong terus menerus memperbaiki diri. Beda jika hijab dilepas, bukannya makin baik, justru akan memburuk.

2. Ingin Tampil Fashionable

Bagi yang suka sekali tampil *fashionable*, terkadang ada perasaan terkekang dengan hijab syar'i. Tidak bisa mengenakan celana, kulot atau rok seperti dulu lagi. Merasa kurang variasi. Kadang bosan dengan tampilan bergamis yang itu-itu saja.

Hai, jangan berkecil hati. Berhijab syar'i masih bisa memuaskan rasa *fashionable*-mu. Misalnya, pilih model gamis yang ada variasinya. Jangan lupa, nafsu dandan *fashionable* tetap bisa diaplikasikan di rumah. Selama



sopan dan tetap menjaga aurat, tidak dilarang. Bahkan jika ingin tampil seksi sekalipun, juga tidak ada larangan. Misalnya di depan suami bagi yang sudah menikah. Justru ini yang benar.

3. Tak Bisa Dandan Cantik

Berhijab syar'i biasanya memang tanpa polesan *make up*. Sebab ada larangan untuk bertabarruj, yaitu menampakkan kecantikan di ruang publik. Padahal sudah fitrah wanita memang suka berdandan. Di sinilah ketaatan seorang Muslimah terhadap Rabb-nya diuji. Apakah akan mementingkan untuk menyenangkan pandangan orang lain, atau taat pada Allah SWT. Soal dandan, tahan diri. Masih bisa dilakukan di tempat yang tidak dilarang, yakni di rumah.

4. Hijab Syar'i Tanggung Jawabnya Besar

Iya betul, berhijab syar'i membawa nama baik diri, keluarga dan agama. Maka itu, tidak cukup sampai berubah pakaian saja, tapi akal pikiran juga harus mengikuti. Harus lebih rajin mengunjungi majelis ilmu. Berbenah menambah wawasan. Namun, ini jangan terlalu menjadi beban. Semua orang berproses menuju lebih baik. Lagipula, manusia tidak ada yang sempurna.

Tanggungjawab yang kita pikul sebatas kemampuan kita saja.

5. Memikirkan Omongan Orang

Terkadang, berhijab syar'i berhadapan dengan perasaan diri sendiri akan omongan orang. Khawatir dengan bisik-bisik teman, omongan tetangga atau kerabat. Terutama jika kondisi keluarga belum tersentuh dakwah. Belum mengikuti arus berhijab pula.

6. Diuji Penyakit

Terkadang, ada juga hijaber yang diuji dengan rasa tidak nyaman, atau bahkan rasa sakit. Seperti rambot rontok, kepala migrain dan bahkan delesiensi vitamin D. Jika hal ini menimpa, jangan menyalahkan hijab. Sebab ia tetaplah wajib. Mungkin bisa dipecahkan dengan bantuan tenaga medis yang berpengalaman.

7. Ujian Pergaulan

Terhadap, berhijab membuat kita tidak bisa sebebaskan dulu dalam pergaulan. Teman-teman mengajak reuni, tergoda. Teman-teman mengajak nongkrong, jalan-jalan, atau kegiatan seru lainnya. Kini kita tak bisa lagi bergabung. Demi menjaga imej berhijab.

Ingat, hijab bukan membatasi pergaulan, tapi menyeleksi pergaulan. Kita tetap bisa berteman seru dengan kawan-kawan yang sudah satu frekuensi dalam hijab. Tak apa kehilangan 1-2 teman lama, toh Allah menggantinya dengan teman-teman baru. Bahkan jumlahnya lebih banyak dan lebih membawa efek manfaat.

Nah, dengan penjabaran di atas, jangan coba-coba tergoda melepas hijab, ya. Istiqamah saja. Pasti ada kebaikan di sana. **kholda**



Agar Ayah Layak Diteladani

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga, saya seorang ibu, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan peran ayah dalam keluarga. Nasihat seperti apa ya Bu yang bisa saya sampaikan ke ayahnya anak-anak agar dia bisa menjadi teladan yang baik buat saya dan anak-anak kami?

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

GTM

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu GTM yang baik,

Keteladanan orang tua dalam pendidikan anak itu sangat penting. Ayah dan ibu mesti menyadari hal ini, terus berusaha menjadi figur yang layak diteladani anak-anak. Anak belajar segala sesuatu dari apa yang mereka lihat sehari-hari utamanya dari orang tua. Berbagai ketrampilan sosial, seperti cara berbicara, mengelola stres, menyelesaikan masalah dan sebagainya biasanya anak belajar dari para orang tuanya. Bagaimana orang tua berbuat, berucap, bersikap, akan dicontoh oleh anak-anak. Pendidikan dalam keluarga hanya akan berhasil manakala orang tua mendidik dengan menunjukkan teladan.

Karena selain sebagai pendidik, orang tua harus juga menjadi model tentang segala sesuatu yang diajarkan. Biasanya seorang anak akan lebih mudah mencontoh dari pada disuruh. Maka, berikanlah contoh-contoh yang baik agar anak dapat meniru kebaikan tersebut.

Ibu GTM yang baik,

Ibu dan ayah memiliki pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan anak pada setiap tahapan perkembangannya. Maka, anak tak hanya memerlukan peran ibu, tapi juga ayah. Peran ayah sangat penting dalam banyak hal. Bukan hanya bertanggung jawab penuh harus menafkahi dan menghidupi keluarga, seorang ayah juga harus bisa mendalami perannya sebagai pendidik semua anggota keluarga. Jika peran ayah tidak berfungsi, anak biasanya mengalami banyak masalah, seperti masalah di sekolah misalnya. Dalam bayangan anak-anak seorang ayah adalah sosok yang selalu diingat karena wibawanya, ketegasan dalam hal mendidik dan membuat aturan dalam rumah.

Ibu GTM yang baik,

Selain memberikan contoh yang baik

pada anak, agar ayah bisa menjadi teladan, ciptakan kedekatan dengan anak. Sampaikan pada ayah, untuk meluangkan waktu buat anak-anak. Jalin kedekatan dengan mereka. Jadilah pendengar yang baik, dengarkanlah dengan penuh perhatian setiap kali anak bercerita tentang segala hal yang mereka alami. Ayah semestinya menjadi sahabat terbaik, utamanya buat anak laki-laki. Jika anak cenderung dekat dan bersahabat dengan orang tuanya, mereka tak mudah terpengaruh dengan lingkungan buruk yang mungkin mereka temui di luar. Seorang ayah harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan secara persuasif terhadap anak agar terjalin kedekatan di antara keduanya.

Ibu GTM yang baik,

Sampaikan juga pada ayah untuk lebih memperhatikan apa yang diminati anak-anak. Kalau perlu melibatkan diri dengan apa yang menjadi *passion* mereka. Bersama-sama melakukan hal-hal yang menarik membuat anak mau melakukannya dengan senang hati dan bersemangat. Kedekatan akan memudahkan anak untuk patuh dan mengikuti

hal-hal baik yang dilakukan ayahnya. Ayah bisa menjalin kedekatan dengan memiliki hati yang lembut, tidak mudah berlaku kasar, penuh wibawa, agar tetap disegani oleh anak-anak. Hargai perasaan, minat, dan hak-hak anak dengan tetap memberikan arahan yang baik. Seorang ayah juga pun harus memperlihatkan sikap yang baik terhadap ibu mereka. Kondisi keluarga yang harmonis akan membuat anak menjadi lebih nyaman berada di rumah, dan bangga dengan ayahnya.

Ibu GTM yang baik,

Mintalah pada suami untuk mempelajari tiga sosok ayah luar biasa dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yaqub. Tiga sosok ayah yang lembut dan tegas pada anak-anaknya jika memang mereka melakukan kesalahan. Seorang ayah haruslah bersikap tegas, namun tidak serta merta menghakimi bahkan melebel negatif mengenai anaknya. Ia haruslah meluruskan atau membimbing langkah anak-anaknya agar kembali ke jalan yang benar. Ketiga sosok ayah dalam Islam tersebut telah menjadi teladan umat. []

Hukum Jastip (Jasa Titip)



Diasuh Oleh: **Ustaz M Shiddiq Al Jawi**

Tanya:

Ayah, apa hukumnya jastip (jasa titip)? (Atina Fahma Rosyada, Yogyakarta)

Jawab:

Jastip adalah jasa yang dilakukan pemberi jasa titip (disebut "jastiper") untuk menawarkan suatu barang yang dijual di destinasi tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, via media sosial, kemudian *customer* memesan barang itu dengan harga yang telah disepakati.

Contoh, ketika seseorang berlibur di Yogyakarta, dia masuk ke toko yang menjual blangkon, kemudian memfoto blangkon-blankon yang dijual dan meng-upload-nya di akun sosial media miliknya, seperti Instagram, disertai keterangan harganya. Jastiper kadangkala menetapkan harga baru kepada *customer*, yaitu harga yang sudah termasuk ongkos kirim dan upah untuk jasa titip. Bisa juga jastiper menyampaikan harga asli apa adanya di toko, kemudian meminta tambahan uang tertentu sebagai upah jasa titipnya. Besarnya uang jasa berkisar 5-10 persen dari harga toko untuk barang dalam negeri, atau hingga 20 persen dari harga toko untuk barang luar negeri.

Dari penelusuran fakta, diketahui ada 2 (dua) macam cara pembayaran oleh *customer*. *Pertama*, jastip dengan talangan, yaitu jastiper menggunakan uangnya sendiri lebih dulu untuk belanja barang. Jadi, *customer* tidak

mentransfer uang lebih dulu kepada jastiper. *Kedua*, jastip tanpa talangan, yaitu jastiper menunggu transfer lebih dulu dari *customer*, sehingga jastiper berbelanja menggunakan uang *customer*.

Hukum *syara'* untuk jastip ada rincian (*tafshil*) sbb;

Pertama, haram hukumnya jastip dengan talangan. Alasannya, karena telah terjadi penggabungan akad talangan/pinjaman (*qardh*) dengan akad *ijarah* (jasa titip) yang telah diharamkan oleh *syara'*. Akad *qardh* terjadi karena jastiper memberi talangan lebih dulu, yaitu membeli barang dengan uang jastip sendiri. Sedang akad *ijarah* (jasa titip) terjadi ketika pemberi jasa membelikan barang pesanan *customer* dengan mendapat upah.

Padahal *syara'* telah mengharamkan penggabungan akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *tijarah* (komersial), seperti akad jual beli, *ijarah*, dan semisalnya. Dalilnya sabda Nabi SAW, "Tidak halal menggabungkan *salaf* (*qardh*) dengan jual beli (*laa yahillu salafun wa bai'un*)..." (HR. Tirmidzi, no. 1252, hadis shahih).

Yang dimaksud "salaf" dalam hadits itu adalah *qardh*. (Imam Syaekani, *Nailul Authar*, hlm. 1052; Imam Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, hlm. 13; Imam Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Al Jami' At Tirmidzi*, Juz IV, hlm. 432).

Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Makna umum dari hadits ini, bahwa tidak boleh menggabungkan akad *mu'awadiah* (komersial) dengan akad *tabarru'* (sosial)." (Ibnu Taimiyyah, *Maj'mu' al Fatawa*, Juz ke-29, hlm. 22; *Al Qawaa'id An Nuraaniyyah*, hlm. 284).

Jadi, yang haram tidak hanya penggabungan *qardh* dengan jual beli saja, tetapi lebih umum, yaitu mencakup penggabungan akad *tabarru'* (sosial), seperti akad *qardh*, dengan akad *tijarah* (komersial), seperti jual beli, *ijarah*, syirkah, dan sebagainya.

Kedua, boleh hukumnya jastip tanpa talangan, yaitu jastip dengan transfer uang lebih dulu dari *customer* kepada jastiper. Alasan kebolehan, karena jastip ini dapat mengamalkan hukum bolehnya akad *wakalah bil ujah* atau bolehnya akad *samsarah*. Jadi selama jastip mengamalkan segala rukun dan syarat dalam akad *wakalah bil ujah* atau akad *samsarah*, hukumnya boleh.

Wakalah bil ujah adalah akad mewakili urusan kepada orang lain dengan memberikan upah kepadanya. Sedang akad *samsarah* adalah akad menjadi perantara (*broker*) antara penjual dan pembeli. Perbedaan di antara keduanya, dalam akad *wakalah bil ujah*, jastiper wajib menyampaikan harga asli toko apa adanya. Jastiper tidak boleh melakukan *mark up* harga itu secara berbeda dengan harga toko. Sedang dalam akad *samsarah*, jastiper boleh melakukan *mark up* harga yang berbeda dengan harga toko, sebagai upah baginya, asalkan sudah disepakati dengan *customer*. Wallahu a'lam.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat
mediaumat.news | Memberjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :
Alamat Pengiriman 1 :
Alamat Pengiriman 2 :
Telpon/ No. Hp-WA :
Jumlah Langganan : eksemplar
Dikirim Mulai edisi :
Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks



Inilah Perbedaan Kritik dan Ujaran Kebencian

Oleh: **Chandra Purna Irawan**, Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjen LBH Pelita Umat

Ada yang bertanya kepada saya apakah perbedaan kritik dan ujaran kebencian. Menanggapi pertanyaan tersebut saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

Pertama, melakukan kritik dan/atau berpendapat di muka umum tanpa takut, telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang yaitu UUD 45 Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum;

Kedua, kritik adalah kecaman atau tanggapan yang bersifat konstruktif untuk memberikan masukan, disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, tindakan dan kebijakan.

Kritik bertujuan sebagai kontrol, pengingat, pengimbang, meningkatkan pemahaman, memberikan masukan, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan dan/atau kebijakan. Kritik disampaikan untuk memperbaiki perilaku/tindakan, pendapat dan/atau kebijakan seseorang atau penguasa;

Ketiga, berdasarkan nomor dua di atas kritik dapat dituangkan dalam bentuk poster, video dan tulisan. Apabila dalam bentuk tulisan, sebaiknya disertakan fakta dan peris-

tiwa yang diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Misalnya dari situs web media nasional yang berada di bawah dewan pers, argumentatif dan apabila memungkinkan disertakan teori yang menunjang pendapat, hindari bahasa cacian-makian-hinaan terhadap individu, hindari seruan atau ajakan untuk melakukan tindakan fisik.

Gunakan kata "patut diduga", "diduga", "berpotensi" dan semisalnya. Semua kata tersebut adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) namun tetap tidak mengurangi esensi kritik adalah suatu keharusan;

Keempat, yang dimaksud ucapan kebencian (*hate speech*) adalah sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. Sedangkan ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik yaitu menyerang kehormatan atau nama baik (lisan maupun tertulis), fitnah, pengaduan fitnah dan penghinaan kepada



orang mati;

Kelima, kritik tidak identik dengan menghina, tetapi perbuatan menghina adalah perbuatan jahat, karena di dalamnya terkandung maksud jahat untuk menghina atau sengaja membuat orang lain terhina. Oleh karena itu apabila akan mengomentari atau mengkritik penguasa sebaiknya kritik argumentatif terkait kebijakan, regulasi dan tindakannya terhadap urusan rakyat;

Keenam, apabila hal-hal tersebut di atas (rambuan hukum) sudah dilakukan tetapi tetap dipersoalkan secara hukum, maka patut diduga rezim berlaku represif terhadap rakyat tanpa mengindahkan norma dan aturan hukum.[]

Bahaya di Balik Dewan Pengarah Pembangunan Ibukota Baru

Oleh: **Siti Aisyah**, Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis (KMM)

Pemindahan ibu kota adalah kebijakan strategis. Anehnya, Presiden Jokowi justru mengangkat orang asing duduk sebagai pengarahnya. Mereka yakni Mohamed bin Zayed (MBZ) sebagai ketua dan dibantu Masayoshi Son, dan Tony Blair. Bukankah ini sangat berbahaya? Setidaknya akan semakin mengokohkan Indonesia sebagai negara korporatokrasi dan anti Islam kaffah.

Memang Presiden Jokowi mengatakan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ) diangkat karena mempunyai reputasi baik terkait membangun kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sedangkan CEO SoftBank Masayoshi Son dipilih lantaran memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Adapun mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Tetapi pernyataan Jokowi tersebut tidak bisa menutupi fakta bahwa pengangkatan mereka dilakukan setelah MBZ memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US\$ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia. Tak beda dengan MBZ, Masayoshi Son pun demikian. Melalui Menlu Jepang Motegi Toshimitsu, Softbank akan memberikan suntikan dana US\$100 miliar untuk ibukota baru.

Timbul pertanyaan, apakah pengangkatan mereka murni karena reputasi itu atau sebagai balas budi investasi? Tapi yang jelas, sekarang Cina punya mitra baru untuk sama-sama melakukan intervensi guna menancapkan gurita ekonominya terkait pembangunan ibukota yang sebenarnya belum mendesak untuk dipindah. Apalagi Indonesia belum memiliki uang yang cukup untuk pemindahannya. Lantas mengapa harus buru-buru dipindah? Pakai investasi asing lagi!?

Dan lihat saja, meski pemerintah menyatakan tidak

akan memberikan gaji kepada dewan pengarah karena mereka memiliki kekayaan yang besar, namun bakal menawarkan investasi di beberapa daerah kepada para tokoh tersebut. Proyek yang ditawarkan antara lain berada di Pulau Mori, Morowali, Sulawesi Tengah dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Patut diduga, pembangunan ibu kota baru maupun investasi di Mori dan Labuan Bajo semata dilakukan untuk semakin mengokohkan Indonesia sebagai negara korporatokrasi. Yakni, negara yang fokus pembangunannya untuk membuka jalan lebar dan mulus kepada kepentingan bisnis asing tanpa peduli akan menguntungkan atau merugikan rakyat sendiri.

Anti Islam Kaffah

Lantas bagaimana dengan Tony Blair? Bila yang lain semakin menguatkan Indonesia sebagai negara korporatokrasi, kehadiran Tony Blair semakin mengukuhkan rezim Jokowi ini sebagai rezim anti Islam kaffah.

Siapa yang tak tahu sepak terjang Tony Blair ketika menjadi Perdana Menteri Inggris? Publik mesti masih ingat, dialah yang membawa Inggris terlibat menginvasi Irak bersama Amerika Serikat pada 2003. Invasi itu berujung pada Perang Irak dan pelengseran Presiden Saddam Hussein. Pemerintahan Saddam pun hancur lebur dan ia dieksekusi pada Idul Adha 2006.

Bersama Presiden Amerika saat itu George W Bush, Tony Blair menginvasi Irak dengan tuduhan Saddam menyimpan senjata pembunuh massal. Tapi kemudian terbukti, senjata itu hanya isapan jempol belaka. Tapi yang pasti puluhan ribu nyawa kaum Muslimin Irak telah meregang nyawa akibat kejahatannya yang dilakukan bersama George W Bush. Dengan kata lain, Tony Blair bersama

sekutunya itu adalah penjahat perang!

Dia pula yang memfitnah para pejuang Islam kaffah sebagai para teroris penganut ideologi setan (*evil ideology*) karena ciri-ciri yang disebutkan itu bukanlah ciri-ciri "teoris penganut ideologi setan" melainkan ciri-ciri kaum Muslimin yang anti penjajahan serta ingin tegaknya syariat Islam secara kaffah.

Seperti dilansir *BBC News*, pada 16 Juli 2005, Tony Blair memfitnah seperti ini: "para teroris penganut ideologi setan memiliki empat ciri yakni: anti Israel, anti nilai-nilai Barat, ingin menerapkan syariah Islam dan mempersatukan umat Islam dengan khilafah."

Tapi anehnya kejahatan yang menelan puluhan ribu nyawa kaum Muslimin dan fitnah keji Tony Blair terhadap pejuang Islam kaffah tidak dijadikan pertimbangan rezim untuk menolaknya jadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru.

Apakah itu bukan masalah serius bagi rezim!? Apakah malah dianggap sebagai suatu prestasi!? Mengingat, rezim Jokowi memang dikenal sebagai rezim yang hobi mempersekusi dan mengkriminalisasi para aktivis Islam terutama kepada yang menyerukan kewajiban menegakkan khilafah.

Maka, siap-siaplah kita memiliki ibu kota baru yang indah dan megah yang diisi oleh rezim dengan berbagai kebijakannya yang semakin mementingkan para investor serta semakin represif terutama kepada para pendakwah Islam kaffah. *Naudzubillahi min dzalik*.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Peta Arogansi Trump-Israel bagi Palestina

Persoalan krisis Palestina ini, bukanlah masalah ibu kotanya di mana, atau pembagian batas wilayah antara Yahudi dan Palestina, tapi persoalan penjajahan.



Proposal perdamaian baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera memunculkan penolakan. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (28/1), Trump menyatakan telah membuat draf perdamaian Israel-Palestina, meskipun tanpa melibatkan Palestina di dalamnya. Dalam draf itu Trump kembali menegaskan Yerusalem sebagai ibu kota entitas penjajah Yahudi.

Media Israel, *The Jerusalem Post*, memaparkan dalam draf Trump ini, Palestina

tetap akan memiliki wilayah Tepi Barat, namun 20 persen wilayah itu akan jatuh ke tangan penjajah Yahudi. Semua permukiman Israel di wilayah ini tetap dipertahankan.

Disebutkan juga, daerah Yerusalem Timur seperti Kafr Akab, Abu Dis dan setengah dari Shuafat, akan menjadi milik Palestina. Lembah Yordan dikuasai Yahudi dan Palestina kehilangan tanah di Negev, dekat perbatasan Gaza dan Mesir. Palestina dijanjikan penduduk Tepi Barat dan Gaza, diberi jalur khusus untuk menuju kedua wilayah. Namun kontrol perbatasan akan

dikendalikan Israel.

Sebagaimana yang diberitakan *BBC online* (29/1), Trump memperingatkan prakarsanya itu mungkin merupakan peluang satu-satunya bagi Palestina untuk meraih kemerdekaan sejati.

"Visi saya menghadirkan peluang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, solusi dua negara yang realistis," kata Trump kepada para pejabat dan wartawan di Gedung Putih. Dikatakan oleh Trump, rencana perdamaian itu juga akan menawarkan pihak Palestina wilayah berdampingan bagi negara itu dan juga bantuan keuangan dalam jumlah besar, dengan syarat Palestina memenuhi sejumlah tuntutan.

Tidak hanya itu, dalam *Twitter*-nya Trump menggambarkan peta masa depan Palestina. "Ini adalah bagaimana negara Palestina terlihat di masa depan, dengan ibu kota di Yerusalem bagian Timur," tulisnya melalui akun @realDonaldTrump.

Wakil-wakil Palestina yang tidak hadir dalam peluncuran rencana perdamaian, mengecam prakarsa Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak rencana Trump tersebut dan menyebutnya sebagai "konspirasi".

Sementara para pejabat Hamas, kelompok utama Palestina di wilayah Gaza, menyebut usulan itu tidak masuk akal. Hamas mengatakan Trump berusaha melikuidasi proyek nasional Palestina. Pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, juga menolak usulan agar ibu kota Palestina berada di Yerusalem Timur yang diduduki Israel.

Arogansi Amerika

Proposal perdamaian ala Trump ini, menurut pengamat politik internasional Budi Mulyana, merupakan cerminan arogansi Amerika dan Trump. Budi mempertanyakan, bagaimana Trump dan Netanyahu membuat kesepakatan tanpa melibatkan pihak Palestina sama sekali.

"Jelas ini cermin sikap arogan, seolah-oleh Palestina itu tanah milik Trump, yang bisa seenaknya dibagi-bagi sesuai dengan selera Amerika," ujarnya.

Namun di sisi lain, Budi melihat tawaran Trump ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Karena sejak awal, menurutnya, solusi Amerika adalah keberadaan dua negara di sana yang dikenal dengan *two states solution*, yaitu negara Yahudi dan Palestina.

Lebih lanjut, menurutnya, persoalan krisis Palestina ini, bukanlah masalah ibu kotanya di mana, atau pembagian batas wilayah antara Yahudi dan Palestina, tapi persoalan penjajahan. "Jelas persoalan utamanya adalah penjajahan Yahudi di tanah Palestina, jadi selama entitas Yahudi masih ada di sana persoalan Palestina, tidak akan selesai," ujarnya.

Adapun solusi dua negara, menurutnya, tidak lain hanya menguntungkan entitas penjajah Yahudi, karena itu berarti secara legal mengakui keberadaan penjajah Yahudi. Tidak hanya, itu kalaupun berdirinya negara Palestina yang berdampingan dengan Israel terwujud, kendali utama tetap pada Yahudi, karena mensyaratkan pembatasan kekuatan pasukan dan senjata Palestina.

Budi juga menambahkan, arogansi Trump dan Yahudi ini, semakin menjadi-jadi, karena mereka tahu penguasa negeri-negeri Islam, terutama negara-negara Arab, lemah. Semuanya berada dalam kendali Amerika.

"Penolakan dari Abbas dan beberapa penguasa Arab hanya pura-pura saja karena mereka tidak benar-benar serius menyelesaikan persoalan Palestina yang hanya bisa diselesaikan dengan mengirimkan pasukan perang," tegas Bud.[] **af**

Usulan Penjajah Trump

AS akan mengakui kedaulatan Israel terhadap wilayah yang direncanakan Trump sebagai bagian dari Israel. Rencana itu meliputi sebuah peta konsep yang, menurut Trump, menggambarkan luasan teritori yang dapat Israel kompromikan.

Peta itu "lebih dari dua kali lipat teritori Palestina dan menyediakan ibu kota Palestina di Yerusalem Timur", tempat AS akan membuka kedutaan, kata Trump. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan rencana Trump akan memberikan kendali pada Palestina sebesar 15 persen dari yang disebut "kawasan bersejarah Palestina".

Yerusalem "akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi". Baik Israel dan Palestina saling mengklaim kota tersebut. Palestina berkeras Yerusalem Timur, yang diduduki Israel pada Perang Timur Tengah 1967, bakal menjadi ibu kota negara masa depan mereka.

Peluang bagi Palestina untuk "mencapai negara independen". Akan tetapi dia hanya memberikan sekelumit rincian.

"Tidak ada warga Palestina atau Israel yang akan tercerabut dari rumah mereka" —yang mengindikasikan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel akan tetap seperti itu.

Israel akan bekerja sama dengan Raja Yordania untuk memastikan status quo pengelolaan tempat-tempat suci di Yerusalem, yang dikenal oleh warga Yahudi sebagai Temple Mount dan al-Haram al-Sharif oleh umat Muslim, tetap terjaga. Selama ini Yordania mengelola tempat-tempat itu.

Teritori untuk Palestina dalam peta versi Trump "akan tetap terbuka dan tidak dikembangkan selama empat tahun". Pada periode itu, Palestina dapat mengkaji kesepakatan, berunding dengan Israel, dan "mencapai kriteria sebagai sebuah negara".[]

bbc online

Kisah Muslim Selamatkan Yahudi dari Holokaus

Khaled Abdul Wahab, Muslim Arab yang menyelamatkan lebih dari dua lusin Yahudi Tunisia



■ Abdol Hossein Sardari, kedua dari kanan, ditugaskan menjadi Duta Besar Iran di Paris saat kedutaan besar dipindahkan ke Vichy.

Setiap 27 Januari, beberapa negara di dunia mengadakan Hari Peringatan Holokaus. Hal ini untuk mengenang peristiwa Holokaus pada Perang Dunia II. Peringatan hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB Resolusi 60/7 pada 1 November 2005.

Dalam peringatan tahun ini 27 Januari 2020 yang lalu, lebih dari 200 orang dari seluruh dunia yang selamat melakukan perjalanan ke Auschwitz untuk menandai peringatan yang ke-75 tahun. Banyak yang mengenakan syal biru-putih—peringat seragam penjara bergaris yang dikenakan para korban di kamp konsentrasi.

Bagi penjajah Yahudi dan beberapa negara Barat, peringatan Holokaus juga digunakan untuk mengangkat kembali isu anti Semit. Propaganda anti Semit yang sering digunakan untuk menyerang siapa pun yang mempersoalkan perlakuan keji entitas penjajah Yahudi di Palestina. Di Paris, Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di sebuah upacara menandai peringatan ke-75, "Kembalinya anti-Semit ini bukan hanya masalah bagi orang Yahudi. Ini adalah masalah bagi kita semua. Ini adalah masalah Republik," kata Presiden Macron.

Bagi beberapa pihak, peringatan Holokaus dianggap sebagai sikap hipokrit Barat. Di satu sisi mengecam pembantaian terhadap orang-orang Yahudi saat Nazi berkuasa, namun di sisi lain melegalkan pembantaian penjajah Yahudi di Palestina hingga saat ini.

Satu hal yang sering juga dilupakan bagaimana umat Islam banyak menyelamatkan nyawa orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Salah satunya adalah kisah Abdol Hossein Sardari, seorang diplomat Iran. Sardari mencoba meyakinkan petinggi-petinggi Nazi di Prancis bahwa Yahudi Prancis sebenarnya adalah warga negara Iran. Sardari tidak keberatan mengeluarkan ribuan paspor Iran untuk Yahudi-Yahudi Prancis itu. Paspor pun menjadi batas antara kematian dengan kehidupan.

Kisah lain adalah Khaled Abdul Wahab, Muslim Arab yang menyelamatkan lebih dari dua lusin Yahudi Tunisia. Faiza Abdul-Wahab, putri Khaled, pada 2007 silam menceritakan kesaksian ayahnya sebelum meninggal pada 1997. "Ya, saya menyembunyikan beberapa keluarga di ladang pertanian selama perang, keluarga Yahudi," kata Khaled se-

perti ditirukan Faiza.

Pada bulan Maret 1938, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Penguasa Albania, Raja Zog membuka perbatasan Albania bagi para pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi di seluruh Eropa - memberikan suaka kepada mereka. Ketika Nazi masuk ke Albania pada 1943, penduduk Muslim negeri ini menolak untuk mematuhi undang-undang anti-Semit Nazi. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah Yahudi Albania justru melonjak semasa perang karena pencari suaka memilih lari ke Albania. Sepanjang perang, hampir 2.000 orang Yahudi mencari perlindungan di Albania, dan itu adalah satu-satunya negara di Eropa yang memiliki populasi Yahudi lebih besar setelah perang.

Diselamatkan Khilafah Islam

Kisah heroik bagaimana Muslim menyelamatkan Yahudi terjadi jauh sebelum Holokaus. Inkuisisi tanah Spanyol dari Kekhalifahan Islam pada Juli 1492, berakibat dengan diusirnya penduduk Yahudi -termasuk Islam- dari wilayah tersebut. Menanggapi pengusiran itu, Sultan Bayezid II mengirim Angkatan Laut Utsmaniyah di bawah komando Laksamana Kemal Reis ke Spanyol untuk mengevakuasi mereka dengan selamat ke tanah Utsmaniyah.

Tercatat lebih dari 150 ribu pengungsi Yahudi mencari perlindungan (suaka) kepada Kesultanan Ottoman. Sultan kemudian mengutus orang-orang terbaiknya ke seluruh Kesultanan agar para pengungsi disambut. "Mengurus keturunan Nabi Ibrahim dan Yakub, adalah perintah Tuhan," demikian pidato Sultan Bayezid II ketika memerintahkan kesultanan untuk menolong kaum Yahudi itu.

Kesultanan Ottoman sendiri berdiri selama lebih dari 600 tahun, serta menguasai wilayah geografis yang luas termasuk Palestina, Irak, dan Suriah. Keadilan dan kemanusiaan, itu ciri khas yang dapat ditemukan di dalam masa khalifah ini. Kesultanan Ottoman memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat—baik untuk kalangan Muslim maupun non-Muslim—selain itu mendukung pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni berkembang. Sangat berbeda dengan sikap negara-negara Barat sekarang ini yang justru mendukung kejahatan entitas penjajah Yahudi di Palestina terhadap umat Islam. [] **af dari berbagai sumber**

KRONIK MANCANEGERA

Virus Corona, Cina Tuduh AS Hanya Menyebarkan Kepanikan

Cina menuduh Amerika Serikat (AS) tidak membantu, hanya menyebarkan kepanikan, di tengah wabah virus corona yang jumlah korban meninggalnya melampaui wabah Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS).

Sampai Senin (3/2) saja, Komisi Kesehatan Nasional Cina sudah mencatat 425 orang meninggal akibat Corona atau bertambah sebanyak 64 orang dari satu hari sebelumnya. Adapun wabah SARS yang sempat melanda dunia pada 2002 hingga 2003 silam menelan korban jiwa hingga 349 orang di daratan utama Cina.

Juru bicara kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying dalam keterangan tertulis menyatakan, banyak negara mengapresiasi mereka untuk menangkal virus corona. "Namun di momen lain, beberapa negara, sebut saja AS, secara tidak bertanggung jawab bersikap berlebihan, dengan tak mengindahkan saran Badan Kesehatan Dunia (WHO)," jelas Hua.

Diwartakan AFP dan dikutip *kompas.com*, Senin (3/2/2020), Hua menyebut Washington sama sekali tidak menawarkan bantuan substansial kepada mereka. Namun, AS yang pertama menarik personel dari konsulat di Wuhan. Hua merujuk kepada ibu kota di Provinsi Hubei yang menjadi pusat penyebaran virus, patogen tersebut pertama kali terdeteksi di Pasar Seafood Huanan.

Dia menjelaskan, AS adalah negara yang pertama menyarankan penarikan staf kedutaan, dan juga yang pertama menerapkan larangan bepergian. "Yang mereka lakukan hanya menyebabkan dan menyebarkan kepanikan, itu merupakan contoh yang tidak baik," kritik Hua. []

Uganda Kaji Buka Kedubes di Yerusalem



Uganda sedang mengkaji kemungkinan membuka kedutaan besar untuk Israel di Yerusalem. Hal itu diungkapkan Presiden Uganda Yoweri Museveni setelah bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kampala, Senin (3/2).

Museveni mengatakan, Netanyahu memintanya agar membuka kedutaan besar Uganda untuk Israel di Yerusalem. Namun, dia masih mempertimbangkan hal tersebut. "Kami sedang mempelajari hal itu," ujarnya.

Netanyahu berharap permintaannya itu dapat segera dieksekusi. "Anda membuka kedutaan di Yerusalem dan saya akan membuka kedutaan di Kampala. Kami berharap melakukan ini dalam waktu dekat," kata dia seperti diberitakan *republika.co.id*.

Uganda dan Israel memang belum memiliki kedutaan besar di negara masing-masing. Kedutaan Israel di Nairobi, Kenya, merupakan jembatan yang hingga kini digunakan untuk menjalin hubungan dengan Uganda.

Netanyahu mengungkapkan, selain membuka kedutaan, Israel dan Uganda juga sedang menjajaki kemungkinan membuka rute penerbangan langsung antara kedua negara. Mereka pun ingin mempererat kerja sama keamanan siber. []

Pertama Kali Masjid Jadi Lokasi Sistem Kaukus Demokrat di Iowa

Untuk pertama kali dalam sejarah Iowa, masjid digunakan sebagai tuan rumah sistem kaukus Partai Demokrat untuk memilih calon presiden pada pilpres AS November mendatang.

Empat tahun lalu, Mohamed Ali, seorang sukarelawan kampanye Bernie Sanders, mengatakan sulit untuk membuat orang-orang di komunitas Muslim ambil bagian dalam sistem kaukus di negara bagian Iowa, Amerika Serikat.

"Mereka hanya tidak memiliki kepercayaan diri atau mereka merasa tidak nyaman," kata Ali, yang merupakan agen real estat Palestina-Amerika di daerah Des Moines, dikutip dari *Al Jazeera*, 4 Februari 2020. Yang lain, katanya, tidak mau terlibat dalam politik karena takut menjadi sasaran atau didiskriminasi.

"Tetapi tahun ini partisipasi komunitas Arab-Muslim sangat besar ... sungguh luar biasa," katanya.

Menurut Ali, itu sebagian besar disebabkan oleh lima masjid yang menjadi tuan rumah kaukus pada Senin malam. Ini pertama kalinya pusat-pusat Islam berfungsi sebagai tempat untuk pertemuan partai, di mana warga Iowa secara terbuka mendiskusikan dan memilih kandidat Demokrat yang mereka inginkan dalam pemilihan presiden 2020 AS. [] **joy dari berbagai sumber**

Wanita Berpakaian Tapi Telanjang

Dua golongan diantara penghuni neraka yang belum aku lihat keduanya : suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang; dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang cenderung dan mencenderungkan orang lain, rambut mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian" (HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban).

Meski menggunakan redaksi berita, hadits ini bermakna *thalabun li-tarki* (tuntutan untuk meninggalkan) perbuatan atau karakter yang diberitakan. Dan ungkapan *min ahli an-nâr* merupakan *qarinah* bahwa karakter atau perbuatan yang digambarkan setelahnya merupakan suatu yang haram. Bahkan lebih ditegaskan dengan ungkapan bahwa mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Sekaligus hal itu menunjukkan betapa besar dosanya.

Dua golongan penghuni neraka itu adalah: *pertama*, kaum yang membawa cambuk yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang. Ini merupakan perumpamaan dari para pemimpin diktator (*al-jabbârûn*) dan kaki tangannya. Mereka menyengsarakan dan menzalimi orang-orang atau rakyat.

Golongan kedua, *nisâun kâsiyâtun 'âriyâtun mâilâtun mumilâtun* (wanita yang berpakaian tapi telanjang yang cenderung dan mencenderungkan orang lain).

Frase *kâsiyâtun 'âriyâtun* (berpakaian tapi telanjang) menurut imam an-Nawawi di dalam *Syarhu Shahih Muslim* memiliki beberapa makna baik secara majazi maupun hakiki. *Pertama*, berpakaian (dibungkus) oleh nikmat Allah tetapi telanjang dari syukur kepada-Nya. *Kedua*, berpakaian yakni terbungkus dengan pakaian, tetapi telanjang dari perbuatan baik dan perhatian terhadap kehidupan akhirat mereka serta tidak berbuat taat. *Ketiga*, mengenakan pakaian tetapi tampak sebagian anggota badannya untuk menampilkan kecantikannya. *Keempat*, mengenakan pakaian tipis yang masih memperlihatkan warna kulitnya dan bentuk tubuhnya. Mereka ini berpakaian tapi telanjang dalam makna.

Makna keempat ini juga yang dipilih oleh Ibnu 'Abd al-Bar di dalam *at-Tamhîd li Ibni Abd al-Bâr*. Menurutnnya, makna frase tersebut adalah wanita-wanita itu mengenakan pakaian yang tipis yang masih menggambarkan (warna kulit atau bentuk tubuhnya) dan tidak menutupi (tubuhnya). Mereka memang mengenakan pakaian (kain) namun hakikatnya mereka telanjang.

Frase *mâilâtun mumilâtun* sebagaimana yang dijelaskan oleh imam an-Nawawi maknanya: *pertama*, menyimpang dari taat kepada Allah dan keharusan menjaga kemaluan dan mendorong wanita lain melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. *Kedua*, *mâilâtun* yaitu wanita yang memperindah gaya jalannya dan menggoyangkan bahu mereka. *Ketiga*, *mâilâtun* yakni memakai tanda serupa sisir yang miring, yang merupakan sisir tanda pelacur yang dikenal untuk mereka. *Mumilâtun* yang memakaikan tanda serupa sisir itu kepada wanita lainnya. Artinya bisa kita maknai sebagai wanita yang memakai dan memakaikan kepada wanita lain, pa-

kaian, perhiasan atau asesoris yang dikenal sebagai tanda atau ciri wanita yang suka melacur. *Keempat*, *mâilâtun* wanita yang cenderung kepada laki-laki dan memikat atau menarik perhatian laki-laki dengan perhiasan, kecantikan atau keindahan anggota tubuh yang mereka tampilkan atau mereka perlihatkan.

Sedangkan frase *ruûsuhunna kaasnimati al-buht al-mâilah* (kepala mereka seperti punuk onta yang miring), maknanya: *pertama*, membesarkan kepala dengan kerudung atau serban dan sebagainya yang disambungkan atau ditumpuk diatas rambut sehingga menjadi seperti punuk onta. Inilah tafsir yang masyhur untuk frase ini. Bisa juga dimaknai menarik rambut ke atas atau menata rambut sedemikian rupa sehingga seperti punuk onta.

Makna hadits ini saling menjelaskan dan melengkapi dengan riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Rasul saw pernah bersabda: "Perempuan siapa saja yang memakai wangi-wangian lalu berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya maka perempuan itu seperti seorang pezina" (HR. an-Nasai, at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Bahkan ketika wanita itu hendak pergi ke masjid untuk beribadah atau shalat, tetap dilarang memakai wewangian dan tercium oleh orang di sekitarnya.

Hadits-hadits di atas sangat jelas. Ironisnya, ada wanita yang bangga melakukannya dan menganggapnya sebagai bentuk syukur karena dikaruniai kecantikan dan keindahan tubuh. Cukuplah hadits diatas sebagai pemutusnnya. [] **yahyaabdurrahman**

KUNJUNGI... STAND AL AZHAR PRESS

PAMERAN BUKU TERBESAR di Indonesia

19th

معرض الكتاب الإسلامي

Islamic Book Fair

١٤٤١ / 2020



Jakarta Convention Center (JCC)
Senayan Jakarta



26 Februari -
1 Maret 2020



No Stand 76-77

DISKON
up to
50%

Kritik Total Komunisme-Sosialisme-Marhaenisme // soft cover // tebal: 274 halaman // size: 15,5 x 23,5 cm // harga: Rp.75.000

Buku baru:

Mendidik Anak Pra Baligh // soft cover // 228 halaman // size: 13,5 x 17,5 cm // harga: Rp.56.000



Jl KS Tubun No 19, Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor, 16151

🌐 : al-azharpress.com 📞 : 0817 011 7771 📷 : @tokobukualazhar

📧 : AlAzharPress ✉ : alazhar.fresh@gmail.com / alazhar_press@yahoo.com

SMK & Pesantren ROBBI RODLIYYA

PONPES ROBBI RODLIYYA SEMARANG

PONDOK 4.0

CORE VALUE : PAHAM FIQH MUAMALAH, SKILL DIGITAL MARKETER / LISTRIK PEMBANGKIT

KURIKULUM DIGITAL MARKETING

- Desain Grafis
- Fotografi & Videografi
- Design for Social Media
- Design for Advertising
- Dasar-dasar Website
- Membuat Landing Page
- FB Ads & Google Ads

KURIKULUM & GIAT KEPESANTREAN

- Hafalan Al-Qur'an, Kajian Bahasa Arab (Nahwu Wadhih), Siroh Nabi, Fiqh Mu'amalah, Fiqh Ibadah (Bulughul Marom), Pergaulan (Ijtima'iy), Akhlaq (Min Muqowimat Nafsiyah Islamiyyah), Pemikiran Islam (Al-Fikru Al-Islami)
- Ekskurikuler renang & silat

PROFIL LULUSAN

- Da'i sekaligus profesional yang berkepribadian Islam dan paham fiqh mu'amalah
- Profesional Multimedia berbasis Industri 4.0 (videografer, desainer grafis, analis media sosial, advertiser dengan kompetensi khusus).

FASILITAS

- Akreditasi, Ijazah Diknas
- 1 Bed & Almari per @santri
- Makan Sehari 3 Kali
- Kamar mandi privat
- Lapangan Olahraga
- Gedung Vokasi Mandiri
- Gedung Asrama 4 It Mandiri
- Akses Jalan Kota
- Full Multimedia

PILIHAN JURUSAN SMK

- Multimedia
- Teknik Listrik Pembangkit

Jl. Wolter Monginsidi, 59 Genuk Semarang Telp. 024- 6580473

0888 2500 226 smkrobrirodliyya@gmail.com robrirodliyya.sch.id

SCAN ME!

MediaUmat
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam



Ketentuan Iklan

- ☒ Materi iklan dikirimkan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum terbit ke email: **iklan.tabloidmu@gmail.com**
- ☒ Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR/JPG/TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- ☒ Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- ☒ Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- ☒ Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- ☒ Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- ☒ Pembayaran di transfer ke Rekening:
BNI Syariah: 0245 8009 73 atau
BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.

Tarif Iklan

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 350 mm	Rp 16,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 340 mm	Rp 12,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 170 mm	Rp 8,000,000
¼ Halaman Dalam	125 X 170 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 85 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 43 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	520 X 340 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 340 mm	Rp 36,000,000

**DAPATKAN
DISCOUNT
SPECIAL**

Informasi :
0857.1713.5759



TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA QADLA MASHALIH BANJIR & LONGSOR ISLAM SELAMATKAN NEGERI

Alhamdulillah, atas ijin Allah swt. Bantuan dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu telah didistribusikan kepada warga terdampak Banjir, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang-barang yang diperlukan (pakaian, makanan, Al Qur'an, obat-obatan, alat rumah tangga, kebutuhan pribadi, bibit tanaman, dll), maupun trauma healing kepada para korban banjir dan longsor.

Adapun lokasi yang menjadi titik Posko maupun tujuan bantuandiantaranya:

- **Wilayah Jakarta Timur:**
Kalibata, Duren Sawit, Kramatdjati,
- **Wilayah Jakarta Selatan:**
Cengkareng, Ciledug, Tanah Abang
- **Wilayah Bekasi:** Tambun, Tarumajaya
- **Wilayah Bogor bagian Barat:**
(Kec. Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga). Masih berlangsung hingga saat ini
- **Wilayah Tangerang** yang baru terdampak banjir

DANA BANTUAN

Penerimaan dana bantuan:

Rp. 426.707.112,-

Penyaluran bantuan:

■ wilayah DKI, Bekasi :

Rp. 165.000.000,-

■ wilayah Bogor:

Rp. 143.707.112,-

■ wilayah Tangerang:

Rp. 10.000.000,-

(bantuan awal)

Sisa dana: **Rp. 108.000.000,-**

Demikian laporan ringkas dari kami. Atas segala kedermawanan dan kebaikan Masyarakat Indonesia, kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya, teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa.

Jakarta, Februari 2020
a.n. Tim Islam Selamatkan Negeri

Bey Laspriana
Koordinator